



access¹⁸
accounting competition
& strategic seminar

**Essay Booklet;
The Transformative Power
of Fintech**

Call For
Essays





Daftar Isi

Kata Pengantar	1
<i>Fintech dan Cashless Society: Sebuah Revolusi Pendongkrak Ekonomi Kerakyatan</i>	2
Implementasi <i>Financial Technology</i> dalam Pengembangan UMKM di Indonesia	21
Pengaruh <i>Financial Technology</i> terhadap Dorongan Pembentukan <i>Start Up</i> di Indonesia	32
Teknologi Finansial: Dari Keuangan Inklusif Menuju Pembangunan Inklusif Melalui Skema <i>Peer to Peer (P2P) Lending</i> bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	46
<i>Social Crowdfunding</i> Ancaman Perbankan.....	58
<i>Artificial Intelligence (AI)</i> yang Diintegrasikan dengan Sistem <i>Blockchain</i> untuk Menghadapi Tantangan Keamanan Teknologi Finansial Era Disruptif di Indonesia	68
Perkembangan <i>Fintech</i> di Indonesia	77



KATA PENGANTAR

Era revolusi 4.0 diawali dengan lahirnya globalisasi ekonomi. Pergerakan kemajuan bisnis di era ini disertai dengan perkembangan teknologi mutakhir. Kemajuan yang pesat dibuktikan dengan munculnya ide-ide bisnis kreatif dan inovatif berlatar teknologi. Masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia dituntut untuk mampu mengikuti arus perkembangan dan kemajuan teknologi di era revolusi 4.0 saat ini. Upaya memperkaya pengetahuan digencarkan untuk meningkatkan awareness terhadap perkembangan teknologi yang saat ini telah merasuk pada setiap lini masyarakat.

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (Maksi FEB UGM) merupakan salah satu program studi berstandar internasional yang dibuktikan dengan akreditasi AACSB atau *Association to Advance Collegiate Schools of Business*. Sebagai salah satu program studi unggulan UGM, Program Maksi FEB UGM tidak ingin ketinggalan dalam memberikan kontribusi kepada bangsa dalam kemajuan era revolusi 4.0 saat ini dengan menghadirkan *Accounting Competition, Call for Essay and Strategic Seminar 2018* atau ACCESS'18.

ACCESS'18 merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengedukasi civitas akademika dan masyarakat umum akan kehadiran *Financial Technology* atau *Fintech* yang saat ini tengah menjamur di seluruh dunia. Rangkaian kegiatan ini terdiri dari, *Strategic Seminar, Fintech Now!, MAKSI Accounting Competition, dan Call for Essay competition* yang mengupas dengan tuntas mengenai *Fintech*. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 28 September 2018 bertempat di Auditorium Lantai 8 Gedung *Learning Center* FEB UGM.

Edukasi yang diberikan oleh regulator, asosiasi sekaligus pelaku *Fintech* Indonesia disempurnakan dengan adanya kontribusi dari para mahasiswa yang memiliki gagasan-gagasan menarik mengenai *fintech* di Indonesia. Hal tersebut diwadahi oleh kompetisi *Call for Essay* yang telah berhasil menghimpun karya tulis terbaik dari mahasiswa dari perguruan tinggi lintas nasional. Dengan bangga kami sajikan tujuh karya tulis terbaik yang telah dipresentasikan apik oleh para peserta *Call for Essays* dalam *Essay Booklet; The Transformative Power of Fintech*. ini. Apresiasi tinggi diberikan kepada para mahasiswa yang telah dapat menyuarakan gagasan sesuai, emoga karya tulis yang dihasilkan dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.



FINTECH DAN CASHLESS SOCIETY: SEBUAH REVOLUSI PENDONGRAK EKONOMI KERAKYATAN

Oleh: Elshabyta Auditya Bintarto
Universitas Airlangga

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang pesat serta didukung oleh infrastruktur komunikasi yang semakin kuat dan stabil telah membawa dampak baru terhadap masyarakat, yakni hadirnya *gadget* dengan harga yang jauh lebih terjangkau dari sebelumnya yang memungkinkan kita mengakses internet dengan biaya yang lebih murah.

Inovasi yang bermunculan tidak berhenti hanya sampai di situ. Internet telah membawa kita ke sebuah era dimana semua kegiatan lebih cepat, akurat, disertai murahnya biaya pengaksesan dibandingkan era-era sebelumnya. Penguatan infrastruktur teknologi pun juga membawa kita ke era baru, yakni era digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi, dimana hampir semua data yang kita butuhkan berada di internet, sehingga kita pun mampu melakukan segala aktivitas dengan cepat, akurat, dan mudah.

Selain kemampuan teknologi yang makin mumpuni untuk melakukan aktivitas yang dulu hanya bisa dilakukan oleh manusia, teknologi juga merombak cara kita melakukan berbagai aktivitas serta cara kita melakukan pekerjaan dan bisnis. Inilah era *big data*, era disruptif yang membawa kita ke era baru, era dimana semua hal hampir terdigitalisasi. Di era ini segala hal dituntut cepat, akurat, dan efisien. Adanya inovasi ini, tak hanya melibatkan pemilik modal besar. Melainkan rakyat pun bisa berpartisipasi dengan modal yang sangat minimal. Dalam era ini, dikenalkan konsep *sharing-economy*. Dimana pemilik modal dan rakyat berkolaborasi untuk menciptakan layanan jasa dan produksi yang lebih murah, mudah, dan efisien.

Sebut saja Go-Jek, yang berhasil menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat dengan hanya bermodalkan sepeda motor. Atau pun Tokopedia dan Bukalapak, yang berhasil menghubungkan pengusaha-pengusaha lokal dengan pembeli tanpa sekat dari seluruh dunia. Dengan adanya digital ekonomi, karya anak-anak bangsa bisa melesat menembus pasar dunia. Tentunya, dengan biaya yang lebih murah, akses yang lebih cepat dan efisien.

Inovasi perkembangan teknologi dan kecerdasan tak luput mempengaruhi industri keuangan dan tata kelola. Munculnya *financial technology* dalam berbagai *platform* kini bisa dirasakan oleh masyarakat. Menurut Bank Indonesia, *financial technology* atau teknologi finansial merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya sistem pembayaran dilakukan dengan tatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dan dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Sedangkan menurut *National Digital Research Centre* di Dublin, Irlandia mendefinisikan *financial technology* atau *fintech* sebagai: “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan”. *Financial technology* dengan segala inovasinya pada layanan keuangan tidak hanya dapat dikembangkan pada sektor swasta saja, melainkan juga kehidupan bernegara.

Utamanya, *financial technology* adalah layanan keuangan digital yang artinya kita bisa membayar tanpa harus ada bentuk fisik. Layanan inilah yang kelak merombak sistem pembayaran secara tunai dan konvensional dalam masyarakat. Layanan lain yang dapat diberikan oleh *financial technology* adalah pengawasan dan transparansi jejak penggunaan uang secara digital dan *real-time*. Contohnya adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan setiap rumah makan di Banyuwangi untuk memasang printer thermal yang bertugas untuk memantau penerimaan negara melalui pajak daerah atau disebut *e-tax*. Dengan adanya *e-tax*, pemerintah dapat memantau penerimaan pajak daerah secara *real time* atau langsung pada waktunya dan didukung oleh data yang akurat, sehingga tidak bisa dimanipulasi oleh pemilik restoran yang bersangkutan.

Dengan adanya revolusi industri 4.0., yang menggunakan teknologi dan internet sebagai penggerak utama ekonomi, merombak kondisi ekonomi di berbagai belahan dunia. Inovasi ini seharusnya jadi momentum penting perkembangan konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia. Karena dengan adanya ekonomi digital, rakyat dapat berpartisipasi menuju pasar dunia tanpa harus mengeluarkan modal besar.

Keberadaan dan aplikasi penggunaan *financial technology* di Indonesia pun harus terus dikembangkan, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat untuk memantau dan mengontrol aktivitas keuangan baik di level negara, perusahaan, hingga penggunaan pribadi. Penggunaan *financial technology* secara masif akan mewujudkan *cashless society*, atau masyarakat non-tunai. Dengan adanya kedua hal ini, rakyat dapat merasakan berbagai layanan keuangan kerakyatan yang inovatif dan lebih murah serta meningkatkan tingkat kompetitif bangsa di mata dunia.

Potensi Penggunaan & Pengembangan *Financial Technology* pada Masyarakat di Indonesia



Gambar 1.1 Jumlah Masyarakat Digital di ASEAN



Ekonomi digital adalah ekonomi yang didasarkan pada penggunaan teknologi digital, sering dipersepsikan dengan melakukan aktivitas bisnis terhadap pasar melalui internet dan *world wide web* (British Corporate Society, 2017). Ekonomi digital yang didasari oleh kemajuan teknologi dan semakin mudahnya akses internet terhadap masyarakat tidak hanya merombak aktivitas bisnis dengan hanya memindahkan aktivitas bisnis konvensional melalui internet saja. Banyak bidang yang terkena dampaknya dan menjadi terdisrupsi akibat adanya keterlibatan internet dalam proses bisnis yang belum masif di era sebelumnya. Berikut ini bidang-bidang yang terdisrupsi karena keterlibatan internet dalam proses bisnis konvensional (UNCTAD, 2017):

1.) Peralatan dan perlengkapan produksi yang canggih, penggunaan robot dan automasi proses bisnis dalam pabrik.

Seiring dengan semakin fleksibel, cepat, cerdas dan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dekade-dekade sebelumnya, penggunaan robot dalam proses industri semakin masif. Dengan kemajuan teknologi, robot industri tidak lagi kaku dan berbahaya, dan pada kenyataannya, semakin cerdas dan mampu memiliki kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya, memungkinkan ia bekerja berkolaboratif dengan manusia di sekitarnya, tanpa harus menggantikan mereka (Hollinger, 2016).

2.) Munculnya sumber data baru melalui *gadget* yang *mobile* dan *Internet of Things (IoT)*.

Peningkatan produktivitas dalam industri amat sangat bergantung pada tersedianya data dalam proses produksi. *Internet of Things* adalah penggunaan internet yang memberikan informasi secara *real time* dan akurat mengenai performa tugas dan hasil dari setiap proses produksi. Dengan adanya *IoT*, pengusaha UMKM mendapatkan informasi yang akurat mengenai proses bisnisnya.

3.) Adanya komputasi awan (*cloud computing*)

Pengembangan *cloud computing* adalah salah satu kunci utama kemantapan *platform* ekonomi digital (European Commission, 2015). *Cloud computing* atau komputasi awan adalah salah satu kemampuan teknologi dimana penyimpanan dan pengaksesan data yang tersimpan di internet atau disebut "*the cloud*" (IBM, 2017).

Adanya komputasi awan yang menyimpan data kita di internet memungkinkan kita mengakses informasi di mana saja dan kapan saja, dengan gawai yang kompatibel. Ini mengartikan bisnis bisa berjalan dimana saja, dan kapan saja tanpa terbatas oleh gadget atau gawai yang dibawa. Berbeda dengan zaman dahulu dimana kita menyimpan informasi pada gadget, sehingga tidak bisa fleksibel (Business News Daily, 2017). Penggunaan komputasi awan pun mudah dan terjangkau, seperti Google Drive. Dengan adanya inovasi demikian, rakyat bisa mengakses banyak informasi dalam waktu yang bersamaan.

4.) Adanya analisa *big data* (*big data analytics*)

Dengan adanya *Internet of Things (IoT)*, data dari mesin dan dari segala aktivitas dapat dikalkulasi secara akurat dan dipantau oleh pengguna hanya dengan melalui internet. Banyaknya data yang tersedia dengan kompleksitas yang berbeda inilah yang disebut *big data*. Analisis *big data* adalah analisis data yang dilakukan untuk mempelajari pola, mengukur,

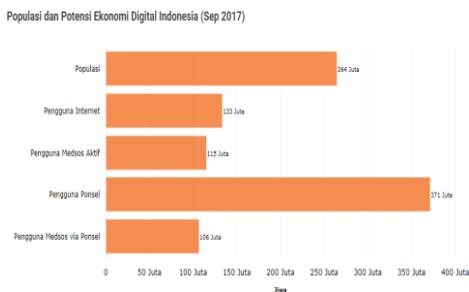
mengontrol, dan mengomunikasikan ketidakpastian data. Adanya analisis *big data* ini membuat segala keputusan bisnis didasarkan pada data yang akurat dan *real time* atau bisa disebut *data driven decision (DDD)* (London School of Economics and Political Science, 2017). Dengan adanya inovasi *big data analytics*, pengusaha UMKM dapat membuat keputusan bisnis secara akurat dan efisien.

5.) Adanya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*)

Kecerdasan buatan adalah sebuah area dari komputasi sains yang menekankan penciptaan mesin intelejen yang bekerja dan bereaksi seperti manusia. Berbagai kemampuan artificial intelligence yang umum adalah pengenalan suara, belajar pola dan perencanaan, serta penyelesaian masalah (Techopedia, n.d.)

Indonesia dengan total populasi penduduk sebesar 265.4 juta penduduk adalah salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Indonesia menempati peringkat keempat dalam negara dengan penduduk terpadat di dunia, dengan rata-rata usia penduduk 28,3 tahun (Jawa Pos, 2018). Rata-rata penduduk Indonesia pun dalam usia yang produktif, yang menjadi tumpuan bagi masa depan negara. Dalam data yang disajikan tabel 1.1 diatas, Indonesia menjadi negara dengan populasi pengguna internet dan sosial media terbesar di antara negara ASEAN lainnya. Jakarta adalah kota nomor dua di dunia dengan pengguna media sosial terbanyak (Liputan 6, 2018).

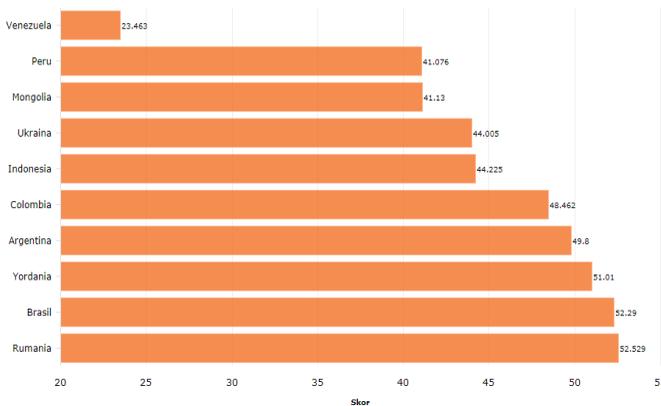
Dengan populasi pengguna internet dan media sosial di Indonesia yang demikian banyaknya, potensi ekonomi digital di Indonesia diperkirakan akan terus berkembang pesat. Saat ini pasar ekonomi digital dunia masih dirajai oleh China dan Amerika Serikat, yang masing-masing memiliki populasi pengguna internet sebesar 702 juta dan 265 juta penduduk (Liputan 6, 2018). Potensi China pun digadang-gadang akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar dunia, karena masih banyaknya potensi penduduk yang belum memanfaatkan internet dalam berbisnis. Dari segi ekonomi dan sosial, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan ekonomi digital untuk kemakmuran rakyat.



Gambar 1.2 Jumlah Populasi dan Potensi Ekonomi Digital Indonesia

Dilansir data yang disajikan gambar 1.2, dapat dikatakan bahwa pengguna ponsel di Indonesia bahkan melebihi jumlah populasi Indonesia secara keseluruhan. Hal ini bisa dikatakan bahwa potensi populasi Indonesia terhadap adanya ekonomi digital berpotensi besar bagi kemajuan ekonomi rakyat Indonesia, karena mayoritas penduduknya sudah bisa mengakses internet dan menggunakan ponsel.

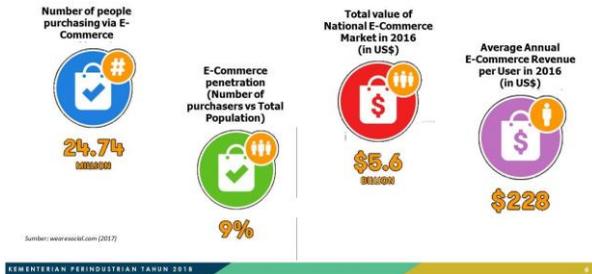
Skor 10 Negara dengan Daya Saing Digital Terendah 2017



Gambar 1.3 Perbandingan Daya Saing Digital Terendah Tahun 2017

Akan tetapi meskipun pengguna ponsel di Indonesia bisa terbilang besar dibanding dengan negara ASEAN lainnya, namun tingkat daya saing digital Indonesia masih terbilang rendah. Indonesia masuk dalam negara dengan 10 negara dengan daya saing digital terendah di 2017, dilansir dari *IMD World Digital Competitiveness*. Indonesia menempati peringkat ke-59 dari 63 negara yang disurvei. Informasi ini mengindikasikan bahwa partisipasi rakyat dalam ekonomi digital belum optimal.

Pemeringkat ini merupakan indikator kemampuan suatu negara dalam mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang bertujuan pada transformasi dalam praktik pemerintah, model bisnis, dan masyarakat pada umumnya. Menurut Direktur *IMD World Competitiveness Centre* Arturo Bris, rendahnya skor daya saing digital negara-negara tersebut karena memiliki peringkat yang rendah dalam hal talenta serta tidak berinvestasi untuk melakukan mengembangkan SDM yang mereka miliki (Kata Data, 2017).



Gambar 1.4 Pendapatan E-commerce di Indonesia Tahun 2017

Grafik yang ditampilkan diatas pun menyatakan, pada tahun 2016, pengguna *e-commerce* masih hanya 9% dari total populasi. Informasi ini juga mengindikasikan bahwa partisipasi rakyat dalam ekonomi digital belum optimal.

Potensi ini masih dapat diperbaiki dan dikembangkan, mengingat Indonesia dalam 5 sampai 15 tahun ke depan akan memasuki era bonus demografi, dimana jumlah populasi dengan usia produktif akan mencapai puncaknya.



Gambar 1.5 Perbandingan Usia Produktif dan Non-produktif Potensi ekonomi digital masih akan terbuka lebar dalam momentum bonus

Potensi ekonomi digital masih akan terbuka lebar dalam momentum bonus demografi, karena populasi usia produktif pun akan didominasi oleh generasi Z dan milenial (Youth Manual, 2017). Generasi ini dibesarkan dengan keadaan teknologi yang berkembang pesat dan internet sebagai bagian kehidupan mereka (Good News From Indonesia, 2017). Generasi yang akrab dengan teknologi semenjak dini inilah yang akan menjadi pemimpin pada era bonus demografi kelak dan menjadi tumpuan kemajuan bangsa kedepannya.

Karena generasi Z dan milenial ini telah akrab dengan teknologi, tentunya pada era bonus demografi dapat diharapkan semakin berkembangnya ekonomi digital. Kementerian Perdagangan dan Industri Indonesia telah menargetkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Pada tahun tersebut, bersamaan dengan terjadinya momentum bonus demografi, ditargetkan nilai *e-commerce* Indonesia sebesar USD 130 miliar (Merdeka, 2018).

Pemerintah menaruh perhatian khusus pada perkembangan ekonomi digital di Indonesia karena potensinya yang dapat meningkatkan ekonomi rakyat di Indonesia. Melalui paket kebijakan XIV, pemerintah membuat peta jalan perdagangan nasional berbasis elektronik. Dijelaskan dalam paket kebijakan ini, pemerintah menargetkan adanya 1.00 *technopreneur* untuk memajukan ekonomi digital di Indonesia.



Gambar 1.6 Paket Kebijakan Ekonomi XIV di Indonesia

Financial Technology di Indonesia

Selain keberadaan *e-commerce* besar yang mulai menjamur keberadaannya, pengembangan aplikasi teknologi finansial di Indonesia juga patut diperhitungkan. Bentuk jasa *fintech* yang umum di Indonesia antara lain, sistem pembayaran (*payment system*), *peer-to-peer lending* yang menyediakan akses pembiayaan, *investment management*, *market provisioning*, dan *equity crowdfunding*.

Perlu diketahui, bahwa rasio penyaluran kredit terhadap PDB masih berada di angka 39,1% (World Bank, 2015). Terlebih penyaluran kredit terhadap UMKM, stagnan hanya di angka 20-22%. Di tahun 2018, penyaluran kredit *fintech* menembus Rp7,64 triliun dan banyak disalurkan ke sektor perdagangan dan pertanian (Finance Detik, 2018). Keberadaan *fintech* mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi rakyat yang selama ini belum terjangkau oleh bank penyelesaiannya.



Sejauh ini, keberadaan *platform* dan aplikasi teknologi finansial di Indonesia telah meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian secara makro. Hal ini terbukti dari adanya *financial technology*, mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga sebanyak 8,94 triliun dan mendorong produk domestik bruto (PDB) sebesar 25,97 triliun pada kuartal I tahun 2018 (Finansial Bisnis, 2018).

Potensi *fintech* yang masih dapat terus berkembang ini masih memiliki tantangan yang harus diselesaikan, agar aplikasinya optimal dan tepat guna. Diantaranya dari segi regulasi yang kurang melindungi *fintech* adalah risiko *fraud* atau pencurian karena data palsu dan adanya prinsip *know your customer (KYC)* yang konvensional.

Prinsip KYC di Indonesia mengharuskan adanya tatap muka dan tanda tangan basah nasabah (Kata Data, 2018). Biaya akuisisi pelanggan yang cukup signifikan tersebut, dapat menghambat fokus pengembangan *fintech* itu sendiri. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia memanfaatkan prinsip teknologi berkelanjutan dan tersinkronisasi, yang dalam hal ini adalah *big data analysis*.

Dengan *big data analysis* dan keberadaan *fintech*, akan semakin mudah mengetahui pola dan karakter keuangan individu, selain itu data ini akan menyinkronisasi dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat secara akurat, pola pembelian masyarakat secara *real time*, hingga memprediksi penerimaan dan pembayaran pajak secara akurat.

Apa itu *Cashless Society*?

Beberapa negara di dunia sudah mulai mengaplikasikan *fintech* secara masif dan menyeluruh. Sebut saja Swedia, India, dan China. Ketiga negara ini memiliki populasi *cashless society* terbesar di dunia.

Cashless society adalah sebutan yang merujuk pada masyarakat yang dalam bertransaksi, tidak lagi menggunakan uang fisik, melainkan melalui perpindahan informasi finansial secara digital. Dalam bertransaksi sehari-hari, masyarakat tidak menggunakan uang nyata, melainkan uang digital.

Penerapan sistem *cashless payment* memperbarui sistem pembayaran tunai konvensional yang sudah dikenal. Biasanya, dalam sistem pembayaran menggunakan uang *cash*, orang menukarkan uang, baik uang koin maupun uang kertas ataupun cek untuk mendapatkan barang dan jasa tertentu. Dengan adanya sistem *cashless payment*, pembayaran tersebut dapat melalui penggunaan aplikasi *fintech*, seperti *e-wallet* atau berupa kartu debit dan kredit yang cukup lazim dikenal selama ini (Banque France, 2018).

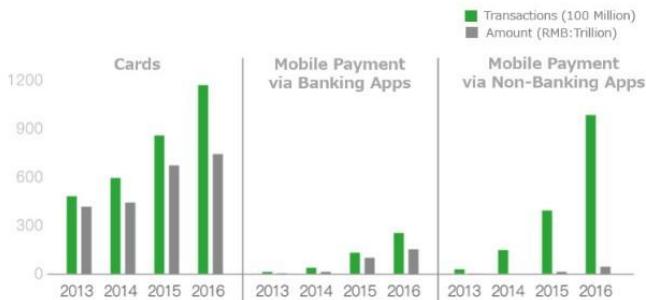
Penerapan *Cashless Society* di Berbagai Negara

Swedia adalah negara pertama yang mengaplikasikan hampir keseluruhan pembayaran digital dalam kehidupan bermasyarakatnya. Permintaan uang secara fisik menurun secara 50% dalam satu dekade, karena beralihnya penggunaan masyarakat menuju kartu kredit dan debit ataupun aplikasi digital. Pada tahun 2017, kurang dari 2% transaksi dari PDB yang menggunakan uang fisik ataupun cek bank. 85% penduduk memiliki akses terhadap online banking. Swedia berambisi untuk menjadi negara pertama yang menerapkan sistem pembayaran *cashless* secara keseluruhan di dunia pada tahun 2023 (Knowledge Wharton, 2018).

Dalam praktiknya sehari-hari, mayoritas toko bahkan pedagang kecil menengah sudah tak lagi menerima pembayaran menggunakan uang fisik. “*No Cash Accepted*” atau “Pembayaran Uang Fisik Tidak Diterima” terpampang di depan toko-toko di Swedia. Tempat-tempat publik seperti restoran dan museum bahkan hanya menerima pembayaran melalui kartu ataupun aplikasi ponsel (Bloomberg, 2018).

China sebagai negara dengan populasi terpadat di dunia pun tak ketinggalan. Tak hanya pembayaran melalui sistem *cashless*, namun mayoritas transaksi belanja pun dilakukan secara online melalui *e-commerce*. Di China, aplikasi chatting seperti WeChat, bisa melakukan berbagai hal. Mulai dari chatting dengan teman, memesan taksi, hingga membayar sewa tempat tinggal (Bloomberg, 2018). China adalah negara dengan tingkat pengguna internet terbesar di dunia, dengan 62% penduduknya menggunakan *smartphone*, melebihi U.S., U.K., dan Jerman. Di kota-kota besar seperti Shanghai dan Beijing, 80% penduduknya memiliki akses terhadap *smartphone*.

THE DEVELOPMENT OF CASHLESS PAYMENTS IN CHINA: 2013-2016



Source:
People's Bank of China, (2013, 2014, 2015, 2016).
China Payment System Development Report
Payment and Clearing Association of China, (2013, 2014, 2015, 2016).
Operation Report of China's Payment and Clearing Industry



(Image credit: 2017 Mobile Payment Usage in China Report)

Gambar 1.7 Pertumbuhan Keuangan Cashless di Negara China



Melalui data yang disajikan dalam grafik di atas, pengembangan pembayaran melalui *fintech* di China jauh lebih pesat dibandingkan dengan aplikasi mobile banking. Hal ini dikarenakan, masyarakat lebih memilih aplikasi yang tidak hanya menyediakan jasa pembayaran digital, akan tetapi juga memiliki fungsi lainnya. Transaksi digital di China tahun 2017 mencetak angka hingga \$5.5 triliun dollar, 50 kali lebih besar dibandingkan Amerika (Technode, 2017).

Masifnya penggunaan aplikasi *fintech* di China, terutama penggunaan WeChat dan AliPay, membuat pemerintah China mewajibkan pengguna aplikasi tersebut untuk memiliki rekening di bank, untuk mematuhi prinsip KYC dan pencegahan pencucian uang (Bloomberg, 2018). Beberapa negara di Asia, seperti India, Pakistan Kenya, dan Tanzania sudah mulai terbiasa menggunakan sistem pembayaran *cashless* dalam transaksi sehari-hari.

Potensi *Cashless Society* di Indonesia

Perlu untuk diketahui, beberapa informasi terkait penggunaan transaksi non-kas (*cashless*) di Indonesia (KPMG Indonesia, 2017):

- ⇒ Indonesia adalah pengguna transaksi cash terbesar kedua di dunia
- ⇒ Hanya 36% penduduk dari total populasi di Indonesia yang memiliki rekening bank
- ⇒ Adopsi untuk penggunaan transaksi non-kas di Indonesia hanya 10% dari total transaksi
- ⇒ Sekitar 96% populasi tidak menggunakan kartu kredit

Kekurangan pengetahuan keuangan yang mumpuni dan takut akan pencurian data via pembayaran non-tunai masih menghantui mayoritas populasi di Indonesia. Pengembangan *fintech* sebagai gerbang pembayaran transaksi non-kas patut untuk dikembangkan.

Indonesia dengan populasi generasi milenial dan generasi Z, yang tumbuh dengan teknologi yang berkembang pesat, akan menjadi leader dalam penggunaan transaksi non-tunai nantinya. Negara-negara OECD mayoritas telah menggunakan 50% transaksi non-tunai dalam kegiatan sehari-hari. Mengapa pengembangan *fintech* sebagai pelopor transaksi non-tunai patut dikembangkan?

1. Transparansi Pejabat dan Aparat Negara dalam Mengelola Keuangan Negara

Mayoritas penggunaan transaksi berbasis tunai memicu penggunaan uang secara *off the record* dan susah untuk dilacak keberadaan penggunaan negara secara akurat. Berbagai permasalahan korupsi pun muncul, seperti tanda penerimaan atau harga pembelian barang dan jasa yang dapat dimanipulasi. Selain itu, berbagai pungutan liar yang dikarenakan transaksi berbasis tunai juga menjadi perkara yang serius.

Hal ini terbukti dari tertangkap tangannya para koruptor yang mengandalkan uang kas sebagai bagian dari transaksi mereka. Agustus 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat salah satu nilai tangkap tangan terbesar sepanjang sejarah badan anti-rasuah itu berdiri. Antonius Tonny Budiono ditangkap bersama dengan barang bukti total uang Rp18,9



miliar. Sebagian besar merupakan uang tunai yang dibagi-bagi dalam puluhan tas dan hanya Rp1,174 miliar yang berupa saldo rekening (Vice Indonesia, 2018).

Tidak adanya pengawasan yang signifikan terhadap aliran kas inilah yang menyebabkan korupsi masih menjamur di Indonesia. Ambil contoh kasus pungutan liar terhadap proses logistik di Indonesia. Adanya pungutan-pungutan liar juga marak terjadi di pelabuhan dan tol oleh aparat-aparat logistik. Bahkan beban yang harus ditanggung untuk pungutan liar mencapai 24% dari total harga barang (Republika, 2017). Menurut Kementerian Perdagangan Indonesia, pada tahun 2011 saja, pungutan liar mencapai 25 triliun rupiah per tahun.

Penggunaan transaksi berbasis tunai sudah seharusnya dibatasi dan dikurangi dengan adanya *financial technology*. Penggunaan aplikasi *financial technology* seharusnya wajib diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan negara dalam mengelola APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara). *Financial technology* dalam hal ini aplikasi berbasis non-tunai yang mewajibkan setiap pejabat dan aparat negara untuk bertransaksi menggunakan *fintech*. Dengan hal ini, dan didukung oleh penggunaan tunai yang semakin berkurang di masyarakat, transaksi yang tak wajar akan mudah untuk diketahui.

Adanya masyarakat non tunai atau *cashless society* juga akan berdampak baik bagi transparansi baik di tingkat individu, tingkat RT, RW hingga tingkat nasional. Dengan adanya pengembangan *fintech* yang berfokus pada aplikasi non tunai, maka pungutan-pungutan liar secara tunai tidak dapat dilakukan dengan tunai. Dan apabila ada pungutan liar pun akan jelas terlacak ke pihak penerima secara akurat. Pengembangan *fintech* dan masyarakat non tunai bagi pemerintah, pejabat dan aparat negara di multi-level, akan sangat memperkecil kemungkinan korupsi. Adanya *fintech* akan memantau setiap transaksi pejabat dan adanya masyarakat non tunai, membuat pejabat sulit untuk menggunakan uang tunai hasil korupsinya.

Selain itu, penggunaan *fintech* pun dapat diterapkan dalam cakupan luas, cakupan nasional misalnya. Seperti yang telah mulai diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang telah menggunakan *e-tax*. *E-tax* merupakan sebuah *platform* digital yang ditempatkan di rumah makan seluruh Banyuwangi, yang terhubung langsung dengan sistem pembayaran di kasir. Dengan adanya *e-tax*, pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat mengetahui secara akurat dan *real-time* mengenai pemasukan daerah melalui pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi, karena banyaknya penghindaran pajak dari pengusaha restoran, dengan memanipulasi nilai pendapatan mereka. Dengan adanya *e-tax*, maka semakin minim kemungkinan adanya manipulasi dan kecurangan oleh pengusaha.

Penerapan *e-tax* yang semakin sukses digalakkan oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi ini tentu akan semakin bermanfaat jika diaplikasikan ke cakupan nasional. Tidak hanya untuk mengawasi pengusaha saja, akan tetapi juga memberikan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Lagi-lagi, pemerintah kabupaten Banyuwangi memberikan contoh yang baik untuk mengawali penerapan *fintech* dalam transparansi pengelolaan anggaran negara. Setiap tahunnya, pemerintah kabupaten Banyuwangi akan mengumumkan anggaran APBD yang di-



kelola oleh pemkab setiap tahunnya. Besaran alokasi APBD, lengkap dengan bidangnya dipajang di sudut strategis kota. Mulai dari besaran anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, hingga penanganan kemiskinan. Adanya inovasi kebijakan demikian, tentu akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai prioritas pembangunan pemerintah di daerahnya. Masyarakat pun dapat dengan akurat dan *real-time* mengetahui informasi tersebut, dan menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah.

Tentunya, inovasi kebijakan tersebut akan sangat membantu rakyat menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah. Dan disisi lain, pemerintah juga meminimalisir adanya korupsi, karena masyarakat dengan mudahnya mengakses informasi tersebut secara detail. Penerapan *fintech* yang demikian dibarengi dengan adanya masyarakat non-tunai, tentu akan merombak praktik korupsi dan pungutan liar. Dengan adanya masyarakat non-tunai yang terwujud secara menyeluruh, maka tidak akan ada transaksi korupsi yang melalui uang tunai. Dan satu-satunya pengiriman transaksi melalui uang digital melalui *fintech*. Dengan adanya *fintech*, semua akan terdata secara detail, dan akurat. Tidak ada celah lagi untuk korupsi.

2. Memajukan Transparansi Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Besarnya usaha mikro kecil menengah di Indonesia patut diperhitungkan kontribusinya bagi kemajuan ekonomi negara. Namun sayangnya, masih banyak pengusaha UMKM yang belum memahami pentingnya sistem pencatatan transaksi dalam bisnisnya. Pemerintah pun menargetkan 8 juta UMKM digital pada tahun 2020 (Kumparan, 2017).Indonesia pun juga memiliki beberap *fintech* yang tidak saing bagi UMKM, seperti OVO dan Go-Pay, yang mampu membantu memberikan layanan pencatatan bagi pengusaha UMKM.

Pentingnya pencatatan dan penerimaan secara digital transaksi ini tidak hanya untuk mengetahui profit saja, tetapi juga untuk mempermudah akses pinjaman ke bank dan institusi keuangan lainnya. Dengan adanya transaksi non tunai, pengusaha UMKM akan mengetahui secara pasti dan akurat perputaran kasnya. Selain itu, akan didapatkan pola informasi yang mampu menujung bisnis, seperti pola pembelian barang, pola pembelian konsumen, dan lainnya. Terciptanya laporan yang relevan dan dapat diandalkan, dapat memperkuat kepercayaan investor pengembangan UMKM untuk memperbesar modal saat dibutuhkan.

Dengan adanya *platform fintech* yang mumpuni, serta didukung oleh keberadaan masyarakat non tunai, UMKM dapat memacu diri untuk mendapatkan sistem informasi akuntansi yang akurat dan murah. *Fintech* dalam hal ini memajukan potensi transparansi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Bagi pemerintah, adanya sistem terdigitalisasi dan terintegrasi untuk UMKM dapat memberikan informasi mengenai UMKM secara akurat.

3. *Fintech* sebagai Problem-Solver Kebutuhan Finansial Masyarakat

Perkembangan *fintech* yang pesat, dikarenakan kemampuan *fintech* untuk menjawab berbagai kebutuhan finansial masyarakat yang selama ini belum terakomodir oleh bank konvensional. seperti contohnya sektor *peer to peer lending* yang mampu menyediakan pinjaman bagi masyarakat dengan mudah dan proses yang jauh lebih cepat dan bisa disesuaikan dengan jangka waktu dan kemampuan membayar.

Sebagai contoh lainnya, *fintech* CICIL, yang berfokus menyediakan layanan peminjaman untuk mahasiswa. Mahasiswa boleh untuk mengajukan pinjaman mulai dari pembelian barang personal hingga pembayaran uang kuliah. Tentunya, sektor seperti ini yang luput dari bank konvensional, mampu diselesaikan dengan adanya *fintech*. Atau Go-Pay, yang selama ini kita kenal, sehingga ketika kita melaksanakan order di Go-Jek, kita tak perlu menyerahkan uang secara fisik. Atau Investree yang membantu masyarakat awam yang selama ini bingung untuk memulai investasi.

Hadirnya *fintech* yang menyediakan layanan *crowdfunding* juga membantu UMKM dan *start-up* yang ingin mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya, namun terhambat oleh regulasi bank yang rumit. Hadirnya *fintech* yang teregulasi secara baik, akan dapat membantu menyelesaikan permasalahan keuangan masyarakat yang selama ini belum tersentuh. *Fintech* dapat menjadi media untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara mandiri.

4. Memantau Transaksi Beredar di Masyarakat dan Penghindaran Uang Palsu

Dengan adanya transaksi-transaksi digital yang terorganisir dalam *fintech* yang teregulasi, dapat memberikan sinyal-sinyal ekonomi kepada pemerintah. Antara lain, tren pembelian konsumsi, dan investasi masyarakat. Untuk mengetahui apakah masyarakat saat ini sedang konsumtif atau tidak. Sinyal-sinyal seperti ini akan terdeteksi secara dini dan akurat, sehingga pemerintah dapat memaksimalkan proses pembuatan kebijakan yang tepat guna. Pemerintah pun dapat mengantisipasi kemunduran ekonomi di masyarakat, jika memiliki data yang akurat dan *real-time*.

Akan lebih baik apabila data di *fintech* bisa terintegrasi dengan data e-ktip. Dengan terwujudnya hal ini, tentu akan mengurangi potensi penipuan transaksi *via-online*. Data yang diberikan yakni data yang terintegrasi oleh big data. Tentunya, apabila didukung oleh masyarakat non-tunai maka apabila terjadi penipuan dapat terlacak hingga ke lokasi akurat. Transaksi dalam ekonomi rakyat pun terjamin dan aman.

Dengan adanya *fintech* dan penerapan masyarakat non-tunai, pemerintah dapat memantau transaksi uang digital yang beredar di masyarakat. Peredaran uang palsu yang selama ini menghantui pengusaha di multi-level, terutama UMKM dapat dibasmi. Tidak adanya uang palsu tentu akan menjamin kesejahteraan dan keamanan masyarakat dalam bertransaksi.

Hambatan-hambatan dalam Penerapan *Cashless Society*

Dalam pembahasan diatas, banyak sekali manfaat strategis akan penerapan *cashless society* atau masyarakat non-tunai secara keseluruhan. Mewujudkan masyarakat non-tunai di Indonesia. Akan tetapi, fakta yang ada di lapangan, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh rakyat Indonesia. Berikut ini berbagai faktor yang harus diperbaiki, tidak hanya dalam mendukung potensi *financial technology*, akan tetapi keseluruhan infrastruktur ekonomi digital:

1. Kurangnya Pengetahuan Keuangan di Masyarakat

Pengetahuan atau literasi keuangan masyarakat menjadi salah satu faktor yang penting dalam perkembangan ekonomi digital. Literasi keuangan adalah pengetahuan, perencanaan, dan pengelolaan keuangan pribadi atau keluarga yang merupakan salah satu perilaku ekonomi yang berkembang di masyarakat dengan sadar ataupun tidak sadar telah dijalani selama bertahun-tahun. Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari kesulitan keuangan dan bagaimana mengelola keuangan serta teknik dalam berinvestasi dengan tujuan mencapai kesejahteraan (Lusardi & Mitchell, 2007).

Literasi keuanganan mempengaruhi bagaimana orang menabung, meminjam, berinvestasi dan mengelola keuangan (Hailwood, 2007). Dalam tingkat nasional, literasi keuangan yang baik dari masyarakat, akan memberikan dampak yang positif bagi kemajuan ekonomi bangsa.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masyarakat yang sudah menggunakan produk dan layanan keuangan (inklusi keuangan) telah mencapai 67,8 persen. Namun sayangnya, ini tidak dibarengi dengan tingkat literasi keuangan yang memadai. Tingkat literasi keuangan penduduk pada awal tahun 2018 sebesar 31%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2016, yang hanya 29,7% (Muthmainah, 2018).

Literasi keuangan memiliki peranan yang penting dalam perekonomian bangsa. Menurut Bank Dunia, peningkatan inklusi keuangan dengan nilai satu persen saja, maka pertumbuhan ekonomi bertambah 0,03 persen. Survei Literasi dan Inklusi keuangan oleh OJK pada tahun 2016 juga mencatat bahwa pengetahuan mengenai keuangan untuk hampir keseluruhan Indonesia Timur lebih rendah dibandingkan wilayah-wilayah lain. Papua Barat menduduki peringkat terendah di 19,27 persen dan Papua 22,18 persen. Dampak dari rendahnya literasi keuangan ini, antara lain adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS), 27,74% penduduk Papua masih hidup dalam kemiskinan, dan 63.770 orang Papua menganggur (Pramita, 2018).

Tidak adanya pendidikan khusus mengenai pengetahuan keuangan tentu menjadi salah satu penyebab rendahnya literasi keuangan di Indonesia. Indonesia memiliki target agar pada tahun 2020 nanti, 75 persen masyarakat sudah memiliki literasi keuangan yang memadai (Henley, 2018).



Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat penetrasi internet di Tanah Air mencapai 51,8 persen. Dari jumlah itu, mayoritas berada pada usia muda, yaitu 25 tahun sampai 34 tahun. Kemudian sebanyak 47,6 persen masyarakat Indonesia pun sudah menggunakan *smartphone* untuk mengakses internet. Namun, fakta menarik tergambar dari hasil survei SNLIK tahun 2016. Menurut survei, 80,5 persen masyarakat masih cenderung mendatangi kantor lembaga jasa keuangan dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa keuangan. Hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap internet banking dan *financial technology* (Henley, 2018).

Indonesia memiliki target untuk mencapai posisi ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara pada tahun 2020 nanti. Dengan nilai potensi sebesar \$130 miliar, rakyat Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan potensi tersebut dengan baik. Literasi keuangan berperan sangat krusial. Karena tanpa adanya literasi keuangan yang mumpuni, masyarakat tak akan meraih manfaat dari ekonomi digital secara maksimal.

2. Infrastruktur yang Masih Perlu Dikembangkan

Menteri keuangan Sri Mulyani, memaparkan hambatan perkembangan ekonomi digital Indonesia dalam diskusi *High Level Conference Annual Meetings* 2018 di Jakarta. Salah satu hambatan Indonesia meraih potensi ekonomi digital, ialah infrastruktur. Belum meratanya infrastruktur dan jaringan internet di Indonesia adalah salah satu masalah krusial yang harus diatasi. Dengan adanya ekonomi digital, khususnya *financial technology*, masyarakat dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan tanpa harus pergi ke bank. Bahkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan yang tidak tersedia di bank konvensional. Seperti misalnya, sarana investasi dan *crowdfunding*, ataupun meminjam uang tanpa harus melalui proses yang kompleks.

Tentunya tanpa infrastruktur dan jaringan internet yang memadai, wacana masyarakat non-tunai juga tidak akan terwujud. Jika infrastruktur dan jaringan internet tidak mendukung, masyarakat akan menggunakan uang fisik untuk bertransaksi. Potensi korupsi dan transparansi anggaran tidak mudah untuk ditekan. Selain itu, masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari *fintech* maupun ekonomi digital secara keseluruhan. Posisi infrastruktur Indonesia berada di peringkat 52 dunia. Disparitas antar wilayah terutama Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur (Sembiring, 2018).

Saat ini, 94 persen Indonesia Barat telah memiliki akses terhadap internet. Sedangkan di daerah Indonesia Timur, khususnya Papua, 35 persen daerah yang tersambung dengan koneksi internet (Widyanuratkah, 2018). Menurut International Telecommunication Union (ITU), organisasi di bawah Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang membidangi urusan telekomunikasi dan informasi, mengakui bahwa infrastuktur teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) Indonesia



akan menjadi yang terbaik kedua di Asia Tenggara dalam dua tahun kedepan (Jemadu, 2018). Posisi tersebut mungkin dicapai, apabila Indonesia mampu menepati visinya untuk melakukan pemerataan internet di desa- desa. Berbagai tantangan harus diselesaikan untuk mencapai visi tersebut. Salah satunya, kondisi geografis Indonesia yang terletak diatas *Ring of Fire* juga menjadi salah satu tantangan perbaikan infrastruktur internet.

Infrastruktur internet adalah salah satu kunci yang krusial dalam pelaksanaan ekonomi digital. Tanpa adanya akses menuju internet, masyarakat tak akan bisa memanfaatkan keberadaan *financial technology*, ataupun mewujudkan masyarakat non-tunai.

Konklusi

Indonesia dengan sumber daya alam dan manusianya memiliki potensi menjadi negara dengan ekonomi yang maju. Dengan adanya revolusi industri 4.0, yang berbasis teknologi dan internet tentu memperbesar peluang Indonesia untuk memakmurkan rakyatnya. Adanya teknologi dan akses internet yang jauh lebih mudah, cepat, dan murah bagi rakyat, tentu akan meningkatkan partisipasi Indonesia dalam ekonomi digital.

Adanya terobosan-terobosan dalam ekonomi digital, seperti *financial technology*, akan dapat membantu menggerakkan roda perekonomian rakyat. *Financial technology* pun menjadi solusi rakyat, memberikan layanan yang dibutuhkan oleh rakyat, yang selama ini absen dilayani oleh institusi keuangan konvensional.

Financial technology pun dalam perkembangannya dapat menjadikan kita masyarakat non-tunai. Dengan adanya masyarakat non-tunai, korupsi dan pungutan liar bisa dicegah dan diawasi, selain itu meningkatkan ekonomi rakyat. Dengan adanya masyarakat non-tunai dan *financial technology*, masyarakat bisa membawa bisnisnya keluar daerah tanpa banyak biaya. Pengembangan ekonomi digital, khususnya *financial technology* dan masyarakat non-tunai, adalah revolusi ekonomi rakyat yang kita butuhkan.

Daftar Referensi

- Banque France. (2018, December 06). www.banque-france.fr. Retrieved from www.banque-france.fr/en/financial-stability/monitoring-cashless-payments/overview-cashless-payment-instruments-france
- Bloomberg. (2018, February 19). Bloomberg. Retrieved from Bloomberg: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-18/no-cash-signs-everywhere-has-sweden-worried-it-s-gone-too-far>
- Bloomberg. (2018, February 21). Bloomberg. Retrieved from Bloomberg: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-13/it-s-becoming-harder-to-use-cash-in-china>
- British Corporate Society. (2017, December 12). *The Digital Economy*. p. 1.
- Business News Daily. (2017, June 13). Business News Daily. Retrieved from Business News Daily: <https://www.businessnewsdaily.com/4427-cloud-computing-small-business.html>
- European Commission. (2015, June 26). European Commission. Retrieved from European Commission: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blog/cloud-computing-forefront-digital-economy>
- Finance Detik. (2018, August 28). finance.detik.com. Retrieved from finance.detik.com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4186162/fintech-bisa-berpotensi-tingkatkan-pdb-rp-25-triliun>
- Finansial Bisnis. (2018, August 28). finansial.bisnis.com. Retrieved from finansial.bisnis.com: <http://finansial.bisnis.com/read/20180828/89/832512/studi-indef-fintech-lending-dongkrak-pdb-rp2597-triliun>
- Good News From Indonesia. (2017, October 11). www.goodnewsfromindonesia.id. Retrieved from www.goodnewsfromindonesia.id: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/10/11/gen-z-harus-siap-eksekusi-bonus-demografi-indonesia>
- Hailwood, D. (2007). "Financial Literacy and its Role in Promoting a Sound Financial System". Reserve Bank of New Zealand Vol. 5, 2-20.
- Henley, W. (2018, July 23). *Republika Online*. Retrieved from *Republika Online*: <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/07/22/pc9s12396-soal-literasi-dan-inklusi-keuangan>
- IBM. (2017, 12 1). *IBM.com*. Retrieved from *IBM.com*: <https://www.ibm.com/cloud/learn/what-is-cloud-computing>
- Jawa Pos. (2018, July 01). *Jawa Pos*. Retrieved from *Jawa Pos*: <https://www.jawapos.com/internasional/11/07/2018/hari-populasi-sedunia-ini-10-negara-dengan-jumlah-populasi-terbanyak>
- Jemadu, L. (2018, January 30). *Suara*. Retrieved from *Suara*: <https://www.suara.com/tekno/2018/01/30/190658/pbb-infrastruktur-internet-indonesia-terbaik-kedua-di-asean>
- Kata Data. (2017, June 05). databoks.katadata.co.id. Retrieved from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/06/05/daya-saing-digital-indonesia-masih-rendah>
- Kata Data. (2018, August 8). katadata.co.id. Retrieved from katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2018/08/28/fintech-lending-diklaim-sumbang-rp-26-triliun-ke-pdb-indonesia>
- Knowledge Wharton. (2018, August 31). Knowledge Wharton. Retrieved from Knowledge Wharton: <http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/going-cashless-can-learn-swedens-experience/>
- Indonesia. (2017). *Retail Payments in Indonesia*. Jakarta: KPMG Indonesia.
- Kumparan. (2017, December 19). Kumparan. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/@kumparantech/pemerintah-mau-8-juta-umkm-pakai-layanan-pembayaran-digital-pada-2020>

- Liputan 6. (2018, April 24). Liputan 6.com. Retrieved from Liputan 6.com: <https://www.liputan6.com/tekno/read/3481323/5-negara-dengan-jumlah-pengguna-media-sosial-terbanyak-indonesia-berapa>
- Liputan 6. (2018, January 26). Liputan 6.com. Retrieved from Liputan 6.com: <https://economy.okezone.com/read/2018/01/26/320/1850496/china-geser-as-jadi-pasar-ekonomi-digital-terbesar-dunia-2018>
- London School of Economics and Political Science. (2017, December 01). Lse.ac.uk. Retrieved from Lse.ac.uk: <http://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Summer-Schools/lse-pku-summer-school/courses/lps-my201>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. (2007). "Baby Boomer retirement security: The roles of planning, financial literacy, and housing wealth.". *Journal of Monetary Economics* Vol. 54, 205-244.
- Merdeka. (2018, September 04). Merdeka.com. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/uang/kemenperin-target-indonesia-jadi-negara-ekonomi-digital-terbesar-dl-2020.html>
- Muthmainah, D. A. (2018, May 21). CNN Indonesia. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180521141246-78-299985/ojk-klaim-31-persen-penduduk-indonesia-melek-keuangan>
- Pramita, E. W. (2018, August 14). Jurnas.com. Retrieved from Jurnas.com: <http://www.jurnas.com/artikel/39297/Literasi-Kuangan-Indonesia-Timur-Duduki-Peringkat-Terendah/>
- Republika. (2017, January 27). Republika. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/01/26/oke5aq415-pungli-penyebab-tingginya-biaya-logistik-dalam-negeri>
- Sembiring, L. J. (2018, April 13). Economy Okezone. Retrieved from Economy Okezone: <https://economy.okezone.com/read/2018/04/13/320/1886166/infrastruktur-indonesia-di-peringkat-52-dunia-apa-masalahnya>
- Technode. (2017, August 15). Technode. Retrieved from Technode: <https://technode.com/2017/08/15/the-rise-of-chinas-cashless-society-mobile-payment-trends-in-2017/>
- Techopedia. (n.d.). Techopedia.com. Retrieved from Techopedia.com: <https://www.techopedia.com/definition/190/artificial-intelligence-ai>
- UNCTAD. (2017). *The New Digital Economy and Development*. France: United Nations Conference on Trade and Development.
- Vice Indonesia. (2018, April 25). Vice Indonesia. Retrieved from Vice Indonesia: https://www.vice.com/id_id/article/8xkj53/pembatasan-transaksi-uang-tunai-belum-tentu-membeaskan-indonesia-dari-suap
- Widyanuratkah, I. (2018, September 05). Republika. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/18/09/05/pekyf1335-kemenkoinfo-fokuskan-pemerataan-internet>
- Youth Manual. (2017, October 29). www.youthmanual.com. Retrieved from www.youthmanual.com: <https://www.youthmanual.com/post/fun/you-have-to-see-this/infografik-anak-muda-indonesia-sudah-siap-menghadapi-bonus-demografi>



ELSHABYTA AUDITYA BINTARTO

STUDENT OF ACCOUNTING
AIRLANGGA UNIVERSITY

PERSONAL DATA



ELSHA.AUDITYA@GMAIL.COM



0851 – 3041 – 2551

SKILLS & ABILITIES

• ACCOUNTING SKILLS AND KNOWLEDGE



• AUDITING SKILLS AND KNOWLEDGE



• MICROSOFT APPLICATIONS



• ENGLISH VERBAL AND NON VERBAL



EXPERIENCES

SEKTOR – EDITORIAL STAFF

2015 - 2017

RESPONSIBLE FOR CREATING CONTENT FOR WALL MAGAZINE AND MAGAZINE.

SUPERVISOR STAFF OF HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS AIRLANGGA

2018 - NOW

RESPONSIBLE FOR SUPERVISING ACTIVITIES AND THE GOVERNANCE OF HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS AIRLANGGA.

PUSAT DATA FEB UNAIR – MANAGER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

2017 - 2018

RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE ORGANIZATION.

EDUCATION

2 SENIOR HIGH SCHOOL • SURABAYA • SCIENCE MAJOR

2012 - 2015

AIRLANGGA UNIVERSITY • SURABAYA • ACCOUNTING MAJOR

2015 - NOW

ACHIEVEMENTS

• 1ST PLACE OF WRITING COMPETITION OF FESTIVAL BAHASA 2 SENIOR HIGH SCHOOL SURABAYA 2013

• 50 SELECTED PARTICIPANTS OF MAMAJP PROGRAM BY JAWA POS 2015

• SELECTED DELEGATION FOR FORUM MAHASISWA EKONOMI INDONESIA 2017

• 2ND PLACE DEBATE COMPETITION ON FEB JUARA 2017

• AWARDEE OF DELOITTE'S STUDENT AMBASSADOR 2018

• DELEGATES OF 1ST ASIA PACIFIC YOUTH LEADERSHIP SUMMIT IN UNIVERSITI UTARA MALAYSIA AUGUST 2018

IMPLEMENTASI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA

Oleh: Nur Arifah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENDAHULUAN

Adanya perkembangan revolusi industri yang begitu pesat, mengakibatkan perubahan penggunaan alat-alat produksi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Revolusi Industri keempat (Revolusi industri 4.0) akan memberikan dampak yang mendalam terhadap ekonomi global. Semua variabel makro yang kita tahu seperti: GDP, investasi, konsumsi, pengangguran, perdagangan, inflasi, dan lain-lain akan dipengaruhi oleh revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat memiliki empat dampak utama dari sektor bisnis, yaitu: 1. Ekspektasi pelanggan yang bergeser; 2. Produktivitas aset yang meningkat melalui analisis data; 3. Terbentuknya Kerja sama baru dibentuk banyak perusahaan karena ingin belajar pentingnya bentuk baru dari kolaborasi; dan 4. Model operasional bisnis yang bertransformasi menjadi model digital¹. Revolusi industri 4.0 saat ini mengakibatkan pemanfaatan teknologi yang canggih dalam setiap produksi barang dan jasa dalam perekonomian, salah satunya adalah penerapan *Financial Technology* dalam bidang keuangan. *Financial Technology* atau yang biasa disebut *fintech* memberikan sebuah tawaran baru bagi perekonomian Indonesia, yaitu sebuah peluang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi atau sebuah ancaman untuk merusak perekonomian yang sudah ada. Peluang dan ancaman dari *fintech* sendiri tergantung pada masyarakat Indonesia, apakah sudah siap untuk menerima perubahan atau belum. Perkembangan *fintech* sendiri biasa menimbulkan *Creative Disruption* untuk masyarakat Indonesia yang masih belum siap untuk menerima perubahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Disisi lain, *fintech* memberikan peluang baru bagi ekonomi Indonesia untuk meningkatkan aktivitas perekonomiannya secara lebih efisien dan efektif. Bisnis tersebut telah membantu dalam pembiayaan usaha kecil menengah yang kurang memiliki akses pada perbankan. Dengan adanya regulasi yang matang mendorong UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan peminjaman transaksi yang mudah. Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah berjudul "Implementasi *Financial Technology* dalam Pengembangan UMKM di Indonesia"

METODE

Sumber Data

Dalam penulisan paper ini, data dan informasi lain terkait diperoleh menggunakan data sekunder berupa dokumen yang diperoleh (dengan ketentuan) dari data publikasi. Sumber data berasal dari Data Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), LPPi-BI, dan Departemen Pengembangan UMKM, Data Kementerian Koperasi dan UKM, Review Data Ikatan Akuntan Indonesia, Data kredit UMKM Bank Indonesia dan studi literatur.

¹ Majalah Sef-Ugm "Sef-Meyapa"-Edisi 1 Tahun 2018 Hlm.2

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Sumber data yang telah diperoleh dianalisis berdasarkan fakta yang ada dan dikembangkan sesuai dengan analisis pemikiran yang digambarkan dalam kerangka konseptual penulisan. Analisis data diperlukan untuk menunjukkan uraian dan deskriptif dari data sebagai sumber informasi terkait permasalahan yang diangkat.

Studi Literatur

Dalam penulisan ini dilakukan sebuah studi literatur sebagai penegas kerangka konseptual yang dikemabngkan. Menurut Nazir (2003:93) menyebutkan bahwa studi literatur menekuni dan menalaah sebuah literatur tanpa memperdulikan apakah penelitian literatur yang digunakan dilakukan menggunakan data sekunder maupun primer². Studi Literatur diperlukan dalam mendukung sumber data yang dianalisis, sehingga memperoleh uraian yang relevan atas data yang diperoleh. Studi Literatur sebagai bagian dalam pengembangan pemikiran konseptual pemecahan masalah yang diangkat.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah analisis data dan sumber informasi lain terkait telah dilakukan, sehingga kerangka pemikiran sesuai dengan kerangka konseptual. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap rumusan masalah yang diangkat serta rekomendasi atas uraian pemecahan masalah tersebut. Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam menarik titik temu permasalahan yang diangkat sesuai dengan data dan informasi terkait sebagai pendukung kesimpulan akhir.

Pemberian Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan berupa rekomendasi yang mempertimbangkan tingkat *cost and benefit* serta hambatan dan dorongannya setelah rekomendasi tersebut diterapkan. Tujuan analisis ini adalah untuk menunjukkan bahwa rekomendasi yang diajukan bersifat *applicable* bagi keberlanjutan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah terkait pembiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

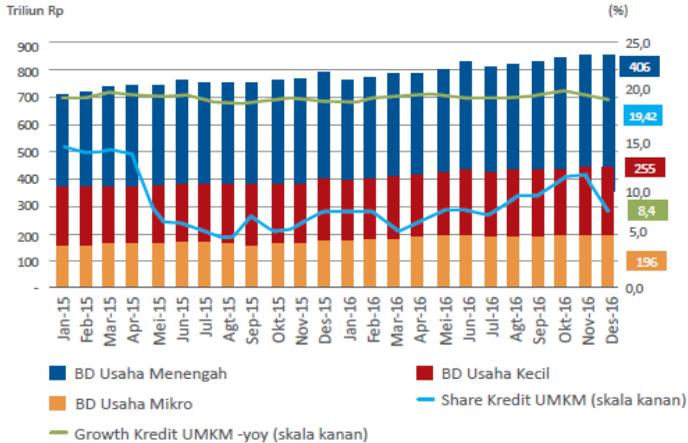
Perkembangan Kredit UMKM

Penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada semester II 2016 mencapai Rp857 Triliun atau 19,4% dari total penyaluran kredit perbankan. Penyaluran kredit UMKM tersebut tumbuh 8,4% meningkat dibandingkan dengan semester sebelumnya sebesar 8,3% dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (semester II 2015) yaitu 8%. Meningkatnya pertumbuhan kredit UMKM menjadi salah satu indikator mulai membaiknya perekonomian

² Nadzir Dalam Fahmi, M. Walidur Dan Bunga *Internet Financial Reporting: Ditektor Eskalasi Pembiayaan Modal Umkm Berbasis Stakeholder Value sebagai Implementasi Financial Technology*, Prosiding 4th Seminar Nasional Dan Call For Papers Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember, hlm 107

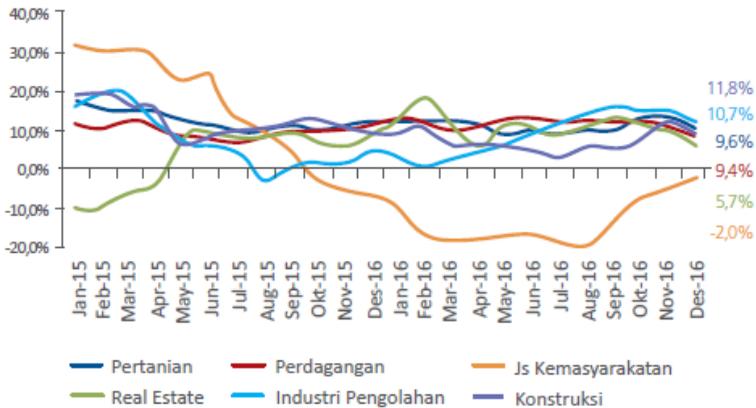
domestik dari kondisi perlambatan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi likuiditas perbankan dan masih berlanjutnya penurunan suku bunga kredit turut mendorong peningkatan pertumbuhan kredit UMKM pada akhir tahun 2016 (Bank Indonesia, 2018).

Grafik 1.1. Perkembangan Kredit UMKM



Sumber: Bank Indonesia, 2016

Grafik 1.2. Pertumbuhan Kredit UMKM pada 6 Sektor Ekonomi



Sumber: Bank Indonesia, Laporan Bulanan Bank Umum 2016, diolah.

Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Pangsa Kredit UMKM berdasarkan BUKU

BUKU	Pertumbuhan Kredit UMKM				Pangsa Kredit UMKM			
	Sem I	Sem II	Sem I	Sem II	Sem I	Sem II	Sem I	Sem II
	2015	2015	2016	2016	2015	2015	2016	2016
Buku 1	5,1%	-0,6%	-1,9%	-44,4%	5,1%	5,1%	5,1%	2,6%
Buku 2	13,1%	-11,1%	-10,4%	12,3%	13,1 %	13,7%	13,1 %	14,2 %
Buku 3	26,4%	6,4%	3,7%	2,7%	26,4 %	28,3%	26,4 %	26,8 %
Buku 4	55,3%	16,4%	17,7%	15,6%	55,3 %	52,9%	55,3 %	56,4 %

Sumber : Bank Indonesia Laporan Bank Umum 2016, diolah

Menurut data Bank Indonesia, selama periode laporan, risiko kredit UMKM mengalami tren penurunan dibandingkan kondisi NPL selama awal tahun 2016 bahkan lebih rendah dibandingkan periode semester akhir tahun 2015. Perbaikan tersebut ditunjukkan dengan menurunnya NPL pada semester II 2016 menjadi 4,15% dari 4,20% pada semester II 2015.

Dalam rangka mendorong pengembangan UMKM, melalui PBI No.14/22/PBI tanggal 21 Desember 2012 sebagaimana diubah oleh PBI No.17/12/PBI tanggal 25 Juni 2015 tentang Pemberian Kredit/Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bank umum diwajibkan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM minimum sebesar 20% (secara bertahap) dari total kredit yang disalurkan.

Menurut berita Kompas (16/08) bahwa industri kreatif memiliki potensi untuk menggerakkan roda perekonomian bangsa. Selama ini, ekonomi kreatif terus bergulir dari inisiatif keompok masyarakat maupun personal. Mengembangkan industri kreatif juga membutuhkan upaya penggalian potensi daerah dan kearifan lokal sehingga dapat menciptakan UMKM berbasis industri kreatif. Berdasarkan data BI, total UMKM di Indonesia mencapai 57,83 unit usaha. Sebanyak 28,33 juta unit diantaranya bergerak di subsektor pertanian/peternakan. Sebanyak 16,77 juta unit di subsektor perdagangan dan 8,2 juta unit di subsektor industri kreatif³

Menurut data Bank Indonesia, berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak Perbankan, beberapa kendala yang dihadapi bank dalam memenuhi ketentuan rasio kredit UMKM, salah satunya adalah Kurangnya keahlian dan kapasitas Bank dalam penyaluran kredit UMKM yang mencakup aspek keterbatasan jaringan kantor, (SDM) secara kuantitas dan kualitas, minimnya infrastruktur dan Teknologi Informasi (TI), terbiasa dalam penyaluran kredit konsumtif, bukan produktif. Oleh karena itu, melalui pendanaan crowdfunding peer too peer menjadi alternatif untuk UMKM yang akan mengajukan pinjaman atau pembiayaan.

³ Koran Kompas "Cintai Negeri, Bangga dan Gunakan Produk Lokal" terbit hari Rabu 16 Agustus 2018 hal 29

Peluang Start-Up

Perkembangan perekonomian digital di Indonesia menunjukkan tren yang menggembirakan. Dengan kemajuan teknologi dan penggunaan telepon genggam yang semakin meningkat, usaha bisnis digital semakin meningkat. Dengan prospek yang sangat bagus ini, perusahaan besar pun tidak ragu-ragu melakukan investasi pada *marketplace* di Indonesia (Bank Indonesia, 2018). Sebagai negara dengan jumlah penduduk 250 juta, Indonesia memiliki potensi pasar dan potensi pengusaha yang sangat besar. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2025, pemerintah memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Visi ini terdapat di dalam Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang menargetkan terciptanya 1.000 *technopreneur* dengan valuasi bisnis sebesar USD10 miliar dan nilai *e-commerce* mencapai USD130 miliar. Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan meluncurkan Gerakan Nasional 1000 *Start-up* (usaha pemula) Digital di tahun 2016. Untuk mendorong pencapaian visi tumbuhnya 1.000 *startup* digital, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Roadmap e-Commerce*) 2017–2019 (Peta Jalan SPNBE 2017-2019).

Implementasi *Financial Technology* pada UMKM

Perkembangan dunia teknologi telah merambah ke berbagai bidang, salah satunya adalah keuangan. *Financial technology* (*fintech*) sebagai bentuk baru dalam kegiatan keuangan mulai dekat dengan masyarakat. Namun sayangnya, pengetahuan pengguna akan teknologi tersebut masih terbatas sehingga penggunaannya belum maksimal. *Fintech startup* di Indonesia berkolaborasi dengan industri perbankan, bukan berkompetisi. Selain itu, ia juga menjelaskan adanya perbedaan antara perbankan dan penyelenggara *peer-to-peer* (P2P) lending, penyelenggara P2P lending tidak menghimpun dana publik, melainkan hanya mempertemukan peminjam dana dan pemilik dana, tidak seperti bank yang mengelola dan menyalurkannya dalam bentuk kredit⁴. *Peer-to-peer* (P2P) lending menjadi salah satu pilihan investasi dalam upaya diversifikasi risiko investasi. Skema bisnis p2p lending pada dasarnya adalah pinjam meminjam secara online, dimana investor berperan sebagai pemberi dana pinjaman untuk pembiayaan usaha para peminjam, yang umumnya merupakan pelaku UMKM di Indonesia. merupakan pelaku UMKM di Indonesia. Pemberi pinjaman akan mendapat keuntungan ketika peminjam melunasi pinjaman beserta nilai bunga yang disepakati. Untuk dapat meraih keuntungan maksimal ketika berinvestasi pada p2p lending, terdapat beberapa risiko umum terkait dengan p2p lending⁵

⁴ <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2107-indonesia-milikipeluang-besar-dalam-fintech> diakses pada 1 September 2018 pukul 13.56 WIB

⁵ <https://amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/04/27/123000326/kelola-risiko-dan-raihkeuntungan-maksimal-lewat-investasi-pada-peer-topeer> diakses pada 1 September 2018 pukul 14.03 WIB



Berdasarkan data OJK, langkah mengoptimalkan peran *FinTech* di Indonesia, maka perlu membangun sinergi bisnis *FinTech* dengan Industri *Incumbents* (Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank) Upaya ini dapat ditempuh dalam beberapa bentuk antara lain :

- a. Kolaborasi jalur informasi antara *FinTech* dan lembaga keuangan yang ada dengan memanfaatkan data nasabah yang banyak dan jalur distribusi (*distribution channel*) yang sudah dibangun. Pemanfaatan fungsi *FinTech* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi bisnis bank dan lembaga keuangan.
- b. Kolaborasi produk yang menjadi solusi bagi konsumen. Untuk ini, pelaku *FinTech* bersama bank dan lembaga keuangan perlu melakukan proses desain (*desain thinking*) untuk membuat produk (*bundling product*) yang bermanfaat bagi kedua pihak. Sinergi ini bisa dilakukan oleh bank yang berbisnis inti di UMKM dengan *FinTech* yang menyediakan platform UMKM digital.

Payung hukum *FinTech* memakai Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan PBI (Peraturan Bank Indonesia) 18/40/PBI/2016 tanggal 14 November 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. (Djawahir, 2018:5). Dalam peraturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjam dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan peer to peer lending (P2P lending). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan⁶.

Salah satu opsi yang aman adalah melalui crowdfunding yang berbasis pinjaman modal usaha melalui layanan perusahaan teknologi sebagai perantara antara pemberi pinjaman dengan pelaku usaha, khususnya UKM, sebagai peminjam. Sebagaimana dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), para pelaku usaha UKM dituntut untuk meningkatkan kualitas barang dagangannya untuk dapat bersaing di tingkat regional. Crowdfunding melalui mekanisme peer-to-peer lending mampu menjawab kebutuhan para pelaku usaha terhadap alternatif permodalan usaha⁷. Tercatat sebanyak 85 perusahaan *Fintech* P2P lending sedang dalam proses pendaftaran sampai dengan November 2017. Hingga per Januari 2018, terdapat 32 perusahaan financial technology yang sudah terdaftar di OJK (OJK, 2018).

Financial technology merupakan inovasi yang dinilai dapat meningkatkan pangsa pasar UMKM sebagai langkah dalam mengatasi permasalahan terkait pembiayaan modal, penyusunan laporan keuangan, pembayaran dan pemasaran, serta transaksi keuangan dan literasi keuangan lainnya. Beberapa *fitur startup financial technology* dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan UMKM saat ini (Fahmi, 2018). Kehadiran sejumlah perusahaan *fintech* turut

⁶ <https://www.google.co.id/amp/goukm.id/startupfintech-pinjaman-modal-ukm-yang-telah-terdaftar-ojk/> amp/ diakses pada 1 September pukul 13.27 WIB

⁷ <https://www.wartaekonomi.co.id/read83925/crowdfunding-solusi-kebutuhan-pendanaan-ukm.html> diakses pada 11 Juli 2018 pukul 14.07



berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran Fintech juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan (Muzdalifah, 2018).

Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai ketika sumber daya produktif dapat dimanfaatkan secara optimal dan dialokasikan secara merata. Tujuan pembangunan ekonomi untuk mencapai sasaran utama dalam menciptakan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan. Dalam proses pembangunan perekonomian Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting (Muzdalifa, 2018)

Menurut (Muzdalifah, et all, 2018) Usaha mikro kecil menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah memandang penting keberadaan para pelaku UMKM bersama dengan Koperasi memiliki wadah secara khusus dibawah kementerian koperasi dan UKM. ada 3 peran penting UMKM dalam kehidupan masyarakat kecil.

1. Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan
Dalam data milik kementrian koperasi dan UKM tahun 2011 disebutkan lebih dari 55.2 juta unit. UMKM mampu menyerap sekitar 101.7 juta orang. Angka tersebut meningkat menjadi 57.8 juta unit UMKM dengan jumlah tenaga kerja mencapai 114 juta orang
2. Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil
UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat, termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan jaman sekalipun. Keberadaan UMKN Di 34 Provinsi yang ada di Indonesia tersebut memperkecil jurang ekonomi antara orang miskin dan orang kaya. Selain itu masyarakat kecil tak perlu berbondong-bondong untuk pergi ke kota guna memperoleh kehidupan yang layak.
3. Memberikan pemasukan Devisa bagi negara
Data dari kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2017 menunjukkan devisa negara dari pelaku UMKM. Angkanya pun sangat tinggi mencapai Rp.88,45 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat dibanding 2016.

Analisis Risiko

Menurut berita kompas.com, terdapat langkah investor untuk mengelola risiko yaitu dengan cara:

1. Kredibilitas Penyedia Layanan P2P Lending.
Perkembangan pesat industri tekfin di Indonesia mendorong melesatnya angka dana pinjaman, jumlah pemberi pinjaman dan peminjam di Indonesia. Sebelum berinvestasi, investor disarankan untuk meneliti kredibilitas penyedia layanan p2p lending, yang mencakup status terdaftarnya perusahaan dalam yang mencakup status terdaftarnya perusahaan dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK), reputasi perusahaan, serta layanan yang ditawarkan. Faktor penting dalam memilih penyedia layanan p2p lending yang tepat adalah memastikan dana yang ditangani dengan aman dan transparan.



Penyedia layanan p2p lending yang terpercaya memiliki akun escrow, dimana dana investor dipisahkan dari dana perusahaan; serta menyediakan fasilitas sistem akun virtual sehingga dapat memeriksa saldo dan penggunaan akun kapanpun diperlukan.

2. Pembayaran pinjaman yang tertunda.

Setelah dana pinjaman dicairkan, peminjam berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas pinjamannya sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati. Namun, ada beberapa kasus dimana peminjam terlambat melakukan pembayaran karena berbagai alasan, seperti memburuknya iklim bisnis yang berakibat pada menurunnya kinerja usaha peminjam, atau terlambatnya pembayaran dari konsumen mereka. Seorang investor potensial perlu memeriksa performa pembayaran yang dilakukan oleh peminjam pada masa lalu. Investor sebaiknya dapat melihat informasi rekam jejak pembayaran peminjam yang pernah melakukan pinjaman lebih dari satu kali. Data tersebut dapat memperlihatkan pembayaran yang tepat waktu dan yang tertunda. Selain itu, Anda harus rajin memantau jadwal pembayaran yang sedang berlangsung secara aktual dan dapat bertanya kepada penyedia layanan p2p lending jika ada pembayaran pinjaman yang tertunda. Beberapa penyedia layanan p2p lending memiliki laman khusus yang memuat data pinjaman yang tertunda tersebut.

3. Risiko gagal bayar.

Setelah dana pinjaman disalurkan, salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah terjadinya gagal bayar oleh peminjam. Penyedia layanan p2p lending oleh peminjam. Penyedia layanan p2p lending sebaiknya memiliki langkah antisipasi apabila kemungkinan terburuk ini terjadi. Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan agar status gagal bayar tersebut dapat diselesaikan, seperti melakukan restrukturisasi, penjadwalan ulang pembayaran, hingga pencairan jaminan. Menyadari adanya risiko-risiko tersebut, penyedia layanan p2p lending memiliki beberapa upaya pencegahan risiko, salah satunya lewat uji kelayakan yang ketat terhadap peminjam.

Peluang Fintech Peer to Peer Lending

Menurut berita yang termuat dalam koran Kompas (29/08), bahwa pelaku UMKM di Indonesia tergolong segmen masyarakat yang terbesar yang belum terakses layanan pinjaman perbankan. Untuk menjangkau segmen ini, perbankan butuh ongkos besar. Situasi ini mendorong kolaborasi perusahaan tekfin pembiayaan perbankan. Bank umum kegiatan usaha (BUKU) III dan IV sekarang menjadikan perusahaan tekfin pembiayaan sebagai mitra yang membantu peningkatan rasio kredit UMKM⁸. Menurut berita dari [republika.id](https://m.republika.id)⁹ Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menyatakan, industri financial technology (fintech) Peer to Peer (P2P) lending tumbuh

⁸ Koran Kompas "Tekfin Beri Nilai Tambah" terbit pada hari Rabu, 29 Agustus 2018 halaman 14

⁹ <https://m.republika.co.id/amp/p2slug382> diakses pada 1 September 2018 pukul 14.07 WIB



paling cepat dibandingkan lainnya. Hal ini karena, total pembiayaan yang tersalurkan naik dari Rp 200 miliar pada akhir 2016 menjadi Rp 2,5 triliun pada akhir 2017. Untuk saat ini, muncul inovasi terbaru mengenai Fintech peer to peer lending berbasis agunan. PT Mulia Inovasi Digital memperkenalkan platform danain.co.id sebagai layanan teknologi finansial (financial technology) yang fokus terhadap pendanaan berbasis agunan di Indonesia. Sebagai pionir model bisnis peer to peer (P2P) lending dengan jaminan, danain menawarkan pengalaman investasi yang aman dan menguntungkan bagi Lender (pendana). Setelah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor S-280/NB.213/2018 tanggal 20 April 2018 dan juga telah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) platform Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) platform danain secara resmi dapat diakses melalui website www.danain.co.id.¹⁰

KESIMPULAN

Financial technology merupakan inovasi yang dinilai dapat meningkatkan pangsa pasar UMKM sebagai langkah dalam mengatasi permasalahan terkait pembiayaan modal, penyusunan laporan keuangan, pembayaran dan pemasaran, serta transaksi keuangan dan literasi keuangan lainnya. Terdapat tiga peran penting UMKM yaitu :

1. Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan
2. Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil
3. Memberikan pemasukan devisa bagi negara

Terdapat beberapa risiko yang harus dihadapi oleh investor yaitu kredibilitas penyedia layanan P2P lending, terdapat pembayaran pinjaman yang tertunda, dan terdapat risiko gagal bayar. Oleh karena itu, investor harus memiliki strategi untuk mengelola risiko tersebut dengan tindakan yang bijak.

¹⁰<https://m.republika.co.id/amp/pb9zw7383> diakses pada 1 September 2018 pukul 14.09 WIB

Daftar Referensi

- Djawahir, Abdillah Ubaidi. 2018. *Teknologi-Layanan Keuangan, Literasi-Inklusi Keuangan, dan Value Pada Fintech Syariah di Indonesia: Perspektif S-O-R (Stimulus-Organism-Response) Model dalam Jurnal 2sd Proceeding Annual Conference for Muslim Scholar Kopertais Wilayah IV Surabaya 21-22 April 2018*. Universitas Islam Raden Rahmat Malang
- Fahmi, Firdaus. Dkk. *INTERNET FINANCIAL REPORTING: DITEKTOR ESKALASI PEMBIAYAAN MODAL UMKM BERBASIS STAKEHOLDER VALUE SEBAGAI IMPLEMENTASI FINANCIAL TECHNOLOGY*. Prosiding 4th Seminar Nasional Dan Call For Papers Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember Hal 104-125
- Financial Technology, Financial Technology (FinTech) di Indonesia OJK*. MuliamaD. Hadad, Ph.D KuliahUmum tentang FinTech-IBS Jakarta, 2 Juni 2017
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read83925/crowdfunding-solusi-kebutuhan-pendanaan-ukm.html> diakses pada 11 Juli 2018 pukul 14.07 WIB
- <https://www.google.co.id/amp/goukm.id/startupfintech-pinjaman-modal-ukm-yang-telah-terdaftar-ojk/amp/> diakses pada 1 September pukul 13.27 WIB
- <https://www.google.co.id/amp/goukm.id/startupfintech-pinjaman-modal-ukm-yang-telah-terdaftar-ojk/amp/> diakses pada 1 September pukul 13.27 WIB
- <https://amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/04/27/123000326/kelola-risiko-dan-raihkeuntungan-maksimal-lewat-investasi-pada-peer-topeer> diakses pada 1 September 2018 pukul 14.03 WIB
- <https://m.republika.co.id/amp/p2slug382> diakses pada 1 September 2018 pukul 14.07 WIB
- <https://m.republika.co.id/amp/pb9zw7383> diakses pada 1 September 2018 pukul 14.09 WIB
- Koran Kompas "Cintai Negeri, Bangga dan Gunakan Produk Lokal" terbit hari Rabu 16 Agustus 2018 hal 29
- Koran Kompas "Tekfin Beri Nilai Tambah" terbit pada hari Rabu, 29 Agustus 2018 halaman 14
- Majalah SEF-UGM"SEF-Menyapa, Revolusi Industri 4.0". Edisi 1 Tahun 2018
- Media Keuangan Transparasi Informasi Fiskal. Volume XIII/No. 130/Juli 2018
- Muzdalifa, Irma dkk. 2018. *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Vol. 3, No. 1, 2018

Tentang Penulis



- Nama : Nur Arifah
- Tempat, tanggal lahir : Magelang, 28 Februari 1998
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Status : Mahasiswa
- Agama : Islam
- Alamat daerah : Soborojo (15/07), Japan, Tegalrejo, Magelang
- Domisili : PP. Nurul Ummah Putri (Jalan Raden Ronggo KG II/981, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta)
- Asal Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga
- Program Studi : Akuntansi Syari'ah
- Golongan darah : AB
- Hobi : Membaca, menulis, bulutangkis
- Email : arifahnur0@gmail.com
- No. Handphone : 0857-0328-2768



PENGARUH *FINANCIAL TECHNOLOGY* TERHADAP DORONGAN PEMBENTUKAN *STARTUP* DI INDONESIA

Oleh: Rizqi Fitriana
Institut Pertanian Bogor

Pada zaman modern yaitu di abad 21, hampir seluruh aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia menggunakan sentuhan teknologi. Teknologi telah berkembang dengan pesat yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, maupun budaya bagi masyarakat di seluruh penjuru dunia. Teknologi yang semakin canggih juga menyebabkan dunia ekonomi mengalami perubahan yang signifikan dan menjadi lebih efisien. Kegiatan finansial terutama transaksi nasabah menjadi lebih mudah dibantu dengan adanya teknologi di bidang keuangan yang sering disebut dengan *financial technology* (FinTech). Pengertian FinTech menurut The Oxford Dictionary yaitu “*Computer programs and other technology used to support or enable banking and financial services*”. Sedangkan menurut Weekly FinTech yaitu “*A business that aims at providing financial services by making use of software and modern technology*”. FinTech berperan sebagai *new market* yang mengkombinasikan antara keuangan dan teknologi (Arner, Barberis, & Buckley, 2015).

Secara umum, *financial technology* (FinTech) yaitu implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa keuangan dengan menggunakan media software, internet, komunikasi, dan komputasi masa kini yang lebih sering dilakukan oleh perusahaan rintisan atau *startup*. Pertumbuhan dunia FinTech saat ini tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan uang dalam bentuk fisik tidak akan dibutuhkan lagi dan sebagai ganti segala bentuk transaksi menggunakan uang elektronik atau digital. Tahun 2000, merupakan tahun lahirnya gagasan revolusi industri 4.0 yang merupakan langkah pengoptimalan penggunaan teknologi dalam berbagai aktivitas dan kerja di segala sektor, hal ini salah satunya juga dimaknai sebagai FinTech *digital revolution*. Seorang ahli dari Hongkong University yang bernama Arner mengkategorikan perkembangan FinTech dalam empat era.

Era FinTech 1.0 terjadi periode tahun 1866 – 1967 yang berkonsentrasi pada pengembangan infrastruktur dan komputerisasi sehingga terbentuk jaringan *global financial*. Era FinTech 2.0 terjadi tahun 1967–2008 yang menekankan penuh pada penggunaan internet dan digitalisasi di sektor *finance*. Era FinTech 3.0 dan FinTech 3.5 terjadi pada periode tahun 2008 hingga sekarang. Perbedaan kedua kategori FinTech tersebut yaitu, jika FinTech 3.0 yaitu era penggunaan telepon maupun smartphone di *finance sector*. Sedangkan Era FinTech 3.5 yaitu ditandai dengan lahirnya bisnis teknologi keuangan atau FinTech sebagai pendatang baru yang memanfaatkan perkembangan inovasi teknologi, produk dan model bisnis serta perilaku masyarakat. Menurut menteri teknologi dan informasi, bahwa dunia FinTech akan semakin melejit di masa depan dan perkiraan pada tahun 2020 akan memberikan keuntungan pada pelaku ekonomi bahkan mencapai US\$ 135 miliar. FinTech seakan mendorong evolusi dunia perekonomian dengan melahirkan berbagai produk aplikasi handal nan canggih.



Dewasa ini beberapa aplikasi FinTech dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya yaitu *e-money* (uang elektronik) dan *e-wallets* (dompet digital), *Loan Based Crowdfunding* (pinjaman atau kredit), *pledge* (gadai), *payment* (pembayaran), *reward* atau *donation based crowdfunding* (platform online untuk mengumpulkan donasi dan bantuan), *financial planning* (perencanaan keuangan) misalnya *big data analysis* dan *predictive modelling*, *capital market* (pasar modal), *internet banking* (layanan bank dalam bentuk software), dan *insurance* (asuransi).

Pada awalnya, *FinTech* digunakan untuk teknologi yang dipakai pada *backend customer* atau institusi finansial yang sudah masuk dalam kategori mapan. Namun, karena adanya krisis ekonomi pada tahun 2008, membuat perusahaan-perusahaan menyalurkan sebagian besar sumber daya pada kebijakan baru dengan tujuan memuaskan pembuat regulasi. Akibat penyaluran dana, perusahaan kekurangan sumber daya untuk melakukan riset dan pembuatan inovasi. Permasalahan ini memunculkan pangsa pasar yang luas bagi perusahaan-perusahaan baru atau biasa dikenal dengan *startup* untuk menciptakan inovasi bagi perusahaan yang kekurangan dana serta menyediakan solusi *big data* bagi institusi-institusi *financial* yang telah ada. Kata *startup* dalam bahasa Inggris yang berarti tindakan maupun proses untuk memulai sebuah organisasi baru atau usaha bisnis. Beberapa perusahaan baru tersebut mulai berkembang pada periode tahun 1990-2000. Jenis bisnis *startup* saat ini lebih sering diartikan sebagai usaha bisnis yang berbau teknologi, karena didasari pada tahun 1998-2000 dengan ditandai masa buble *dot-com*. Buble *dot-com* yaitu fenomena lahirnya perusahaan *dot-com* yang didirikan pada masa 1998-2000 secara bersamaan. Perusahaan beramai-ramai membuat website untuk mengenalkan usaha kepada masyarakat. Selain itu, pada masa tersebut masyarakat sedang gencar menggunakan internet untuk memulai bisnis. Dari berbagai pengertian dari *startup*, maka dapat dicirikan suatu *startup* sebagai berikut :

1. Usia perusahaan kurang dari 3 tahun
2. Jumlah pegawai kurang dari 20 orang
3. Pendapatan kurang dari \$ 100.000/tahun
4. Masih dalam tahap berkembang
5. Umumnya beroperasi dalam bidang teknologi, namun ada juga *startup* yang tidak berbau teknologi
6. Produk teknologi yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital
7. Biasanya perusahaan beroperasi lewat website

Perkembangan *startup* di Indonesia dapat disebut terus mengalami peningkatan yang pesat. *Startup* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *startup* jenis *e-commerce* dan *startup* di bidang *FinTech*. *Startup* di bidang *E-commerce* merupakan bentuk perusahaan yang menyediakan platform atau wadah jual beli secara online. Berbeda dengan *Startup* *FinTech* yang lebih cenderung pada bentuk perusahaan yang melakukan pengembangan inovasi sehingga melahirkan pelayanan di bidang jasa keuangan dengan mengadopsi kecanggihan teknologi. Sehingga pengertian *startup* *FinTech* secara umum yaitu jenis perusahaan atau bisnis yang baru mulai dirintis dan berbau teknologi keuangan. Mayoritas konsumen menginginkan transaksi



keuangan yang mudah dan efisien sehingga membuat para inovator berlomba-lomba mendirikan bisnis *startup* yang berkaitan dengan layanan berbasis FinTech. FinTech pada dasarnya memang bersifat *user centric* sehingga lebih memfokuskan pada kebutuhan dan kepuasan pengguna atau konsumen. Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam bidang *financial* membuat lahirnya ide kreatif dipaksa berpacu dengan perubahan inovasi serta kreasi teknologi yang kian melesat. Contoh sederhana, jika dahulu dalam melakukan transaksi *transfer* harus menuju ke Anjungan Tunai Mandiri, kini hanya berselang beberapa tahun teknologi mobile banking telah lahir dan memudahkan berbagai transaksi layaknya pelayanan di bank.

Perkembangan FinTech tidak lepas dari pengaruh perangkat mobile, perangkat lunak virtual cloud, personalisasi layanan online dan teknologi komunikasi (Dapp 2014). Lahirnya FinTech juga disebabkan oleh kendala-kendala transaksi dari industri keuangan tradisional yaitu perbankan yang terikat aturan ketat sehingga menyusahakan transaksi dari masyarakat terutama terkait pinjaman. Kendala kedua yaitu keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di suatu daerah tertentu, seperti yang telah kita ketahui bahwa layanan perbankan belum sepenuhnya merata di penjuru wilayah suatu negara. Sehingga munculnya inovasi layanan keuangan yang menjawab kendala-kendala tersebut melalui FinTech yang memberikan beberapa kemudahan seperti layanan keuangan yang lebih efisien dan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Menurut ahli *financial* di Eropa, kekuatan yang dimiliki FinTech berpengaruh besar salah satunya di bidang *e-payment*. Nilai dari transaksi FinTech di pasar global mencapai angka US\$ 1,025,519 M di tahun 2017. Transaksi FinTech terbesar berada pada segmen pembayaran digital dengan jumlah nilai transaksi mencapai US\$ 738,340 M tahun 2017. Sistem pembayaran secara digital lahir sejak munculnya kecanggihan transaksi *e-commerce* (Sumanjeet, 2009). Menurut Shon dan Swatman (1998), *e-Payment* merupakan pertukaran dana melalui saluran elektronik. *E-payment* membutuhkan koneksi internet untuk bekerja. *E-payment* berfungsi pada penggunaan layanan keuangan di lingkungan perbankan elektronik (*e-banking*) dan belanja elektronik (*e-shopping*). Perkembangan marketplace terkait pinjaman di dunia mengalami peningkatan yang sangat cepat khususnya pada periode 2014 sampai menuju prediksi di tahun 2020. Negara yang memiliki jumlah perkembangan paling besar yaitu China, tidak heran jika saat ini di negara tersebut *startup* FinTech menjadi elemen penting dalam menyokong perkembangan ekonomi negaranya. Berbagai manfaat yang dapat dirasakan dari kehadiran *startup* FinTech secara umum diterima oleh dua pelaku. Pelaku pertama yaitu sebagai konsumen mendapatkan manfaat sebagai berikut :

1. Perluasan pilihan produk
2. Peningkatan kualitas pelayanan
3. Penurunan harga
4. Transaksi aman, mudah, dan praktis



Lalu untuk pelaku kedua yaitu bertindak sebagai pelaku bisnis, manfaat yang didapatkan diantaranya :

1. Memperpendek rantai transaksi
2. Meningkatkan efisiensi modal dan resiliensi operasional
3. Meningkatkan inklusi keuangan
4. Memperlancar arus informasi

Dari kedua pelaku tersebut, secara ekonomi manfaat yang didapatkan dari implementasi penggunaan produk *startup* FinTech yaitu :

1. Mempercepat transmisi kebijakan moneter
2. Meningkatkan kecepatan uang beredar
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Beberapa jenis *startup* FinTech yaitu :

1. Manajemen aset.

Lahirnya *startup* ini untuk memudahkan aktivitas operasional perusahaan seperti ketika penggajian, pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan, dan lain-lain. Contoh *startup* FinTech yang bergerak di bidang manajemen aset yaitu *Jojonomic*. *Startup* FinTech ini menyediakan platform atau wadah Expense Management System yang membantu sebuah usaha beroperasi lebih praktis dan efisien. Beberapa keunggulan yang diberikan oleh *Jojonomic* yaitu salah satunya dapat mengaplikasikan program paperless hal ini dikarenakan rekapan pergantian biaya yang awalnya dilakukan secara manual, dengan menggunakan *Jojonomic* cukup dilakukan melalui aplikasi.

2. Crowdfunding

Startup jenis ini menyediakan suatu wadah untuk penggalangan dana dan selanjutnya disalurkan kepada orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, perang, maupun pihak yang memerlukan suatu bantuan. Sesuai dengan trend teknologi FinTech, kegiatan penggalangan dana dilakukan secara online. Contoh *startup* crowdfunding yaitu *Kitabisa.com*.

3. E-money

e-money lebih sering dikenal dengan uang elektronik, yaitu berbentuk uang yang dikemas dalam fitur digital sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Biasanya e-money digunakan untuk berbagai keperluan seperti membayar berbagai tagihan dan sering dipakai bagi orang-orang yang cenderung malas membawa uang tunai. Penggunaan e-money kini mulai gencar dilakukan oleh masyarakat dan mendukung suksesnya program cashless society. Contoh *startup* FinTech e-money yaitu *Doku*. *Doku* dapat digunakan sebagai uang tunai maupun fitur link kredit.



4. Insurance

Beberapa tahun terakhir, program asuransi yang dulunya dilakukan dengan cara konvensional dengan cara menyisihkan uang per bulan sebagai premi, kini dengan hadirnya FinTech melahirkan suatu *startup* yang dapat digunakan untuk mendaftar asuransi misalnya yaitu *HiOscar.com*. *startup* ini dibangun untuk membantu pelanggan dalam menjaga kesehatan. Cara kerja *startup* FinTech insurance *HiOscar.com* yaitu menyediakan layanan kepada pengguna berupa informasi rumah sakit, dokter profesional, dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia kesehatan lainnya.

5. P2P lending

FinTech P2P lending menyediakan wadah untuk memberikan pinjaman secara online, misalnya akses layanan modal. FinTech jenis ini jauh lebih mudah dan lebih efisien jika dibandingkan dengan mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan konvensional. Contoh *startup* yang bergerak di bidang P2P lending yaitu *Uangteman.com* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara mengisi berbagai kuisioner dan formulir yang disediakan di aplikasi tersebut.

6. Payment gateway

Payment gateway bertujuan untuk menjadi penghubung antara e-commerce dengan pelanggan dalam hal pembayaran. Contoh *startup* yang bergerak di bidang payment gateway yaitu *iPaymu*.

7. Remittance

FinTech jenis remittance sangat membantu bagi pembayaran antar negara. Dengan adanya FinTech remittance proses pengiriman akan lebih mudah dan biaya yang dibutuhkan juga lebih murah. Contoh *startup* remittance yaitu *SingX* yang didirikan di Singapura.

8. Securities

Investasi seperti saham, reksadana, dan jenis investasi lain kini dilakukan melalui online. Contoh *startup* yang bergerak di bidang securities yaitu *Bareksa.com* yang menyediakan wadah berinvestasi khususnya di jenis reksadana, saham, obligasi, dan lainnya.

Permulaan perkembangan *Startup* FinTech di Indonesia memiliki konteks sedikit berbeda dengan di dunia internasional yang dikarenakan krisis keuangan tahun 2008. Perkembangan *Startup* FinTech di Indonesia terjadi karena salah satunya *e-commerce* yang tumbuh sangat cepat, sehingga harus ditanggapi dengan pembaruan sistem *payment* yang lebih efektif dan efisien dari segi instrumen maupun metode. Industri *FinTech* di Indonesia memang tengah menjadi bahan pembicaraan dan berusaha didorong pertumbuhannya agar mampu bersinergi untuk membangun perekonomian negara yang semakin baik kedepannya serta



mampu bersaing secara global. *Startup FinTech* di nusantara merupakan suatu hal yang populer kedua setelah *Startup* bentuk *e-commerce*, hal ini berdasarkan pada jumlah *startup* yang mendapatkan bantuan pendanaan untuk pengembangan usaha sepanjang tahun 2015. Berdasarkan data dari World Bank pada tahun 2014, negara berkembang seperti Indonesia dengan tingkat penetrasi keuangan hanya sebesar 35,8%, *Startup FinTech* dapat berperan mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan pada masyarakat.

Pihak pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) berusaha untuk mendorong inklusivitas keuangan (*financial inclusion*) dengan menerbitkan berbagai program, seperti Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai. *Financial inclusion* di Indonesia mendorong masyarakat menengah ke bawah dapat menabung secara teratur, sehingga berbagai layanan keuangan bank maupun non bank tidak ragu memberikan kredit kepada masyarakat karena pendanaan yang cukup. Jika kredit yang diberikan keseluruhan digunakan untuk hal-hal produktif, perekonomian nasional akan berjalan baik. *Startup FinTech* di sektor pembayaran digital merupakan salah satu sektor yang paling berkembang. Sektor pembayaran digital menjadi hal yang diharapkan pemerintah untuk membuka akses masyarakat kepada layanan keuangan secara luas, memperbaiki iklim keuangan inklusif, serta mendukung pemerataan pembangunan di Indonesia. Transaksi pembayaran *FinTech di Indonesia* akan diatur dalam National Payment Gateway (NPG). NPG adalah infrastruktur yang mengintegrasikan berbagai saluran pembayaran untuk memfasilitasi transaksi pembayaran elektronik. Setelah NPG berjalan sempurna maka diharapkan akan tercipta *cashless society* sesuai rencana pemerintah. Berbagai *Startup FinTech* yang tersebar di Indonesia harus mampu memberikan nilai tambah bagi publik dan harus dapat memanfaatkan secara maksimal dan bijaksana. Konteks *Startup FinTech* di Indonesia harus diperluas, yaitu dalam pengertian Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), sehingga kemanfaatannya harus seimbang dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. *Startup FinTech* sejauh ini masih didominasi oleh kegiatan payment atau pembayaran sebanyak 32 persen di Indonesia. Salah satu alasan tingginya pertumbuhan *Startup FinTech* di bidang pembayaran karena *e-commerce* kini masih terus mengalami perkembangan sangat pesat dan begitu diminati oleh sebagian masyarakat di Indonesia sehingga sangat diperlukan. Selain itu, adanya program *cashless society* mendorong penggunaan uang digital atau elektronik, sehingga saat ini masyarakat mulai menghindari transaksi dengan menggunakan uang tunai dan lebih memilih membayar menggunakan uang elektronik contohnya *e-wallet*. Produk *Startup FinTech* terbesar kedua yaitu kategori lending yang berada di angka 17,78 persen. Meningkatnya sektor bisnis atau khususnya UMKM membuat kebutuhan modal kian melejit. Pengajuan pinjaman melalui lembaga keuangan konvensional selama ini terkesan rumit dan memakan waktu yang lama. Dengan hadirnya berbagai *Startup FinTech* khususnya di bidang P2P lending, maka salah satu manfaat yang dapat dirasakan yaitu efisiensi dan efektivitas, sehingga pelaku ekonomi kini banyak memanfaatkan produk *Startup FinTech* di bidang lending untuk pembiayaan usaha.



Melesatnya perkembangan *Startup* FinTech tidak lepas dari semakin meratanya akses internet yang dapat dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Pada dasarnya FinTech membutuhkan akses internet dalam beroperasi. Begitu pula dengan perkembangan startup FinTech di Indonesia yang semakin menjamur karena hampir seluruh masyarakat Indonesia yang melek internet dan dapat mengakses dimanapun mereka berada. Dari data BPS menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 telah mencapai 132,7 juta (51,8 %) dari total populasi penduduk Indonesia yang mencapai 256 juta pengguna. Penyebaran pengguna internet di Indonesia banyak didominasi di pulau Jawa sebanyak 65 persen (86,3 juta orang) selanjutnya dengan Sumatera (15,7 %), Sulawesi (6,3%), Kalimantan (5,8 %), Bali dan Lombok (4,7%), Maluku dan Papua (2,5%). Dapat disimpulkan bahwa bantuan internet menjadi salah satu faktor yang menunjang perkembangan bisnis FinTech dan pembayaran digital di Indonesia. Salah satu prinsip *Startup* FinTech yaitu *Trust*. Apabila masyarakat tidak menaruh kepercayaan pada *Startup* FinTech, maka bisa dipastikan bisnis tersebut tidak dapat berkembang dengan baik. Di Indonesia bisnis FinTech dipercaya memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan bisnis keuangan konvensional yang biasa menimbulkan kesan kaku.

Startup FinTech menggunakan perpaduan teknologi, software, dan Big Data. *Startup* FinTech selain menggunakan tiga komponen tersebut, juga memanfaatkan data dari sosial media, yang dapat dijadikan sebagai bagian dari analisis resiko serta untuk mempelajari perilaku konsumen. *Startup* FinTech sering mendapat sebutan “*menghancurkan*” bidang perbankan konvensional, akan tetapi sebenarnya FinTech dibentuk dengan tujuan memberikan solusi permasalahan serta kemudahan akses keuangan bagi masyarakat. Justru dengan hadirnya berbagai macam *Startup* FinTech, bank konvensional mampu melebarkan sayap dan menjangkau lapisan masyarakat secara mudah. Perkembangan bisnis FinTech aktif didukung oleh adanya berbagai inovasi secara terus menerus di bidang learning machines, cloud computing, block chain distributed ledgers, digital & mobile payment, dan yang populer akhir-akhir ini ‘big data’. Berdasarkan data yang dihimpun dari Bank Indonesia, terdapat lebih dari 100 perusahaan berbasis FinTech yang tengah beroperasi di Indonesia. Jumlah perusahaan yang berbasis FinTech menurut data dari Asosiasi FinTech Indonesia dan OJK menunjukkan mulai tahun 2013 menuju tahun 2015 terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan jumlah perusahaan FinTech di tahun 2013-2014 berada di angka 40. Namun pada tahun 2015-2016 jumlah perusahaan FinTech di Indonesia melaju ke angka 165. Jumlah tersebut meningkat 4 kali lipat dari jumlah perusahaan FinTech sebelumnya. Besarnya potensi yang dimiliki oleh FinTech menunjukkan indikasi bahwa perlunya diberikan ruang tumbuh di dunia bisnis Indonesia. Selain itu dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sentuhan FinTech memberikan stimulus positif bagi berkembangnya startup FinTech yang ada di Indonesia.

Salah satu contoh startup FinTech yang kini sedang gencar-gencarnya dipopulerkan di kalangan masyarakat yaitu Go-Pay. Go-Pay merupakan salah satu fitur yang dibentuk oleh aplikasi Go-Jek. Go-Pay merupakan fitur untuk media pembayaran transportasi maupun pembayaran di restoran dan tempat belanja lainnya. Sehingga Go-Pay yang dahulu hanya menjadi media pembayaran transportasi online Go-Jek, kini menjelma menjadi layaknya uang elektronik dan dapat digunakan di berbagai transaksi. Isi ulang Go-Pay juga tergolong mudah, yaitu melalui



transfer ATM, *m-banking*, *i-banking*, atau *top up* secara langsung dengan *driver*. Go-Pay juga memberikan berbagai bonus bagi customer yaitu dengan menghadirkan program Go-Points. Go-Points nantinya akan memberikan sejumlah poin bagi customer yang telah melakukan setiap transaksi menggunakan Go-Pay. Poin-poin tersebut nantinya jika diakumulasikan dengan jumlah tertentu akan dapat ditukarkan dengan berbagai *voucher* maupun promo. Menurut riset lembaga JakPat (Aplikasi platform survei online di Indonesia) pada Desember 2016, persentase penggunaan pembayaran digital pada Go-Pay di Indonesia telah mencapai 27,1%. Pengguna Go-Pay berada di urutan keempat setelah layanan FinTech Mandiri e-Money yang mencapai angka 43,8%, lalu disusul dengan BCA Flazz sejumlah 39,1%, serta Telkomsel T-Cash sejumlah 29,1%. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa layanan FinTech yaitu Go-Pay yang merupakan *Startup* dan masih berjalan sekitar satu tahun mendapatkan respon bagus dari masyarakat. Terdapat kemungkinan posisi layanan Go-Pay akan mendapatkan posisi yang tinggi di Indonesia dibandingkan *startup* fintech lainnya dalam layanan transaksi digital. Selain Go-Points, Go-Pay juga memberikan cashback ke customer hingga 50 persen, sehingga hal tersebut semakin membuat masyarakat beramai-ramai menggunakan Go-Pay. Layanan yang diberikan oleh *startup* FinTech yaitu khususnya untuk pembayaran secara digital semakin diminati masyarakat karena efisien dari segi waktu dan kepuasan pribadi terjamin. Terdapat sejumlah ancaman yang menyangkut kejahatan siber yang dikhawatirkan akan menimpa layanan bisnis FinTech. Beberapa contoh *cyber crime* yang sering terjadi di bisnis FinTech yaitu misalnya transaksi fiktif, *carding*, penipuan di pasar online, hingga adanya *skimming*. Berbagai ancaman tersebut dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan customer, padahal prinsip utama dari bisnis FinTech adalah *trust*. Polda Metro Jaya melaporkan bahwa telah terjadi 1.207 sepanjang 2016 yang diakibatkan oleh *cyber crime*, mayoritas adalah kasus *malware* (*virus*, *ransomware*).

Pengendalian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama melalui teknis dan melalui kebijakan. Ditinjau dari sisi penyedia layanan, hal utama yang dapat dilakukan adalah menggunakan *user id* dan *password* (kata sandi) sebagai tindakan proteksi paling dasar dan umum. Tindakan kedua yaitu, menambahkan pengamanan yang dibuat khusus untuk pengguna, contohnya berupa kartu atau token. Aspek ketiga, melahirkan penjagaan keamanan yang lebih rumit dan tidak mudah dibajak seperti misalnya fitur biometrik. Aspek terakhir dengan melakukan tindakan proteksi data dari jaringan dan *server* melalui berbagai teknik rahasia. Masyarakat harus berhati-hati dalam memilih penyedia jasa keuangan dan harus waspada ketika menjadi konsumen dari bisnis FinTech. Campur tangan pemerintah dinilai sebagai tonggak terbesar pengamanan bisnis FinTech melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kementerian yang terkait telah merumuskan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebagai aksi proteksi dari kejahatan siber. Tentunya peraturan dan langkah proteksi harus diuji secara terus menerus agar mampu berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai salah satu regulator FinTech, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan. Kemudian, Satgas pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan juga akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) untuk pelaku industri FinTech, tujuan pembentukan peraturan yaitu tercipta lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bisnis FinTech di Indonesia. Pengembangan industri FinTech ke depannya tidak akan berjalan baik tanpa



koordinasi dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan yakni regulator, institusi finansial, investor, *startup*, inkubator, asosiasi industri, serta kalangan akademisi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan *startup* FinTech di Indonesia yaitu penyediaan infrastruktur regulasi, dukungan insentif bagi pembiayaan usaha *startup*, hingga edukasi dan pembinaan bagi para calon-calon pengusaha *startup* FinTech. OJK menanggapi perkembangan *startup* FinTech di Indonesia merumuskan beberapa kebijakan dan peraturan diantaranya :

1. Penerbitan regulatory sandbox

Manfaat regulatory sandbox secara umum :

- a. Kebijakan : lebih adaptif terhadap laju inovasi akibat semakin kecilnya response time otoritas
 - b. Pengaturan : memperkecil gap waktu perubahan industri dengan pengaturan tanpa mematikan inovasi
 - c. Perizinan : smoothening sebelum masuk ke dalam rezim perizinan
 - d. Pengawasan : memberikan kesempatan bagi pengawas untuk mendeteksi resiko sejak dini
2. Penerbitan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Langsung Berbasis Teknologi Informasi (LMPUBTI)
3. Secepatnya OJK akan menyusun peraturan mengenai beberapa aktivitas FinTech seperti crowdfunding, digital banking, dan lain-lain.

Kemudian, Bank Indonesia menyatakan terdapat tiga hal yang wajib dilakukan perusahaan FinTech dalam menjalankan bisnis. Hal pertama yaitu FinTech harus mempunyai institusi dan badan hukum di Indonesia, kedua yaitu transaksi yang dilakukan di Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah. Ketiga adalah kegiatan bisnis FinTech seperti deposit, pinjaman, dan suntikan modal, maka dana tersebut harus disimpan di sistem perbankan umum, bukan di lembaga keuangan nonbank. Pengaturan FinTech sangat diperlukan baik untuk negara maju dan terutama untuk negara berkembang. Tujuan pemberian kebijakan dan regulasi yaitu agar bisnis FinTech terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga akan meningkatkan perekonomian nasional secara keseluruhan. Adanya mekanisme pelaporan dan penanganan jika terjadi kasus menjadi sebuah keharusan agar tidak terdapat kekhawatiran terkait keamanan layanan FinTech. Setiap inovasi yang muncul pasti selalu membawa resiko disamping manfaat yang diberikan, namun harus terkontrol dalam koridor yang dapat diterima oleh seluruh pihak.

Hubungan antara teknologi dan keuangan semakin tidak terpisahkan karena segala yang berakitan dengan kegiatan keuangan dapat dilakukan secara fleksibel. Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi (FinTech) di Indonesia telah menjadi keniscayaan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. FinTech telah menghasilkan respon yang positif bagi pelaku usaha e-commerce maupun *startup*. Adanya FinTech mendorong terbentuknya berbagai jenis startup atau bisnis rintisan yang berbasis keuangan digital. Terbukti di Indonesia kini bermunculan jasa keuangan digital baik untuk pembayaran, asuransi, maupun untuk pinjaman.



Peranan *startup* FinTech bagi Indonesia :

1. Memberi solusi bagi pertumbuhan industri Indonesia yang berbasis elektronik.
2. Mendorong pembentukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta memberikan stimulus atau dorongan pembentukan wirausahawan muda.
3. Turut mengembangkan usaha kreatif yang berkualitas unggul serta berdaya saing di kancah global.
4. Memperluas jangkauan pelayanan keuangan dan memudahkan akses masyarakat dalam hal pendanaan.
5. Meningkatkan *financial inclusion* Indonesia.
6. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan nasional melalui kemudahan akses modal.

Perkembangan bisnis FinTech di Indonesia dapat dikatakan masih dalam tahap permulaan. Terdapat sejumlah industri dan usaha kreatif yang belum terjamah (*underdeveloped*) dan belum dikelola secara maksimal. Meningkatnya konektivitas Internet dan perangkat *mobile* memberikan stimulus positif terhadap perkembangan bisnis FinTech di Indonesia. Kehadiran bisnis FinTech memberikan berbagai macam manfaat diantaranya menjawab permasalahan masyarakat yang menginginkan transaksi mudah, aman, dan paktis. Manfaat selanjutnya yaitu contohnya memudahkan pelaku *startup* yang membutuhkan modal untuk mendapatkan pinjaman dengan mudah dan tanpa memberatkan bagi peminjam. Respon masyarakat dengan hadirnya berbagai *startup* FinTech memberikan efek positif yang dapat dibuktikan dengan jumlah konsumen yang semakin meingkat di Indonesia. Benefit munculnya *Startup* FinTech yang beragam ternyata terdapat kelemahan yang perlu diatasi. Regulator perlu menyusun kebijakan strategis yang memastikan risiko *Startup* FinTech dapat diantisipasi dan dimonitor agar mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kecepatan akses FinTech sampai saat ini ternyata masih menimbulkan beberapa permasalahan baik bagi pelaku maupun konsumen *Startup* FinTech. Sehingga diperlukan kebijakan dan aturan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Diharapkan lembaga pengatur lalu lintas FinTech tidak hanya menindaklanjuti permasalahan yang telah terjadi, tetapi juga harus berusaha untuk mencegah dan mengantisipasi agar kasus yang ditimbulkan dari pemanfaatan FinTech tidak sampai terjadi. Kolaborasi antar pelaku ekonomi secara bersama-sama diperlukan guna mengembangkan *Startup* FinTech di Indonesia yang lebih berkualitas demi kemaslahatan bersama.



Daftar Referensi

- Arner, Barberis, dan Buckley. 2015. Banking and Fintech: A Challenge or Opportunity.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. <https://www.bps.go.id>. [Diakses : 30 Agustus 2018].
- Dapp, 2014. Fintech-The Digital (r)evolution in the financial sector. Frankfurt : Deutsche Bank Research.
- Gojek Indonesia. 2015. <http://bisnisojek.com/2015/09/17/apa-itu-go-jek/> [Diakses : 30 Agustus 2018]
- Go-Pay. 2015. <http://www.go-pay.co.id/terms> [Diakses : 30 Agustus 2018].
- Shon dan Swatman. 1998. Identifying Effectivness Criteria for Internet Payment Systems. Melbourne : Swinburne University of Technology.
- Sumanjeet S. 2009. Emergence of Payment Systems in the Age of Electronic Commerce : The State of Art. New Delhi : University of Delhi.
- World bank, 2014. <https://worldbank.org>. [Diakses : 30 Agustus 2018]

Tentang Penulis

Curriculum Vitae

RIZQI FITRIANA



PERSONAL IDENTITY

Tempat, Tgl Lahir	: Bilir, 23 Februari 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat Sekarang	: Jl. Babakan Tengah No. 35, Bogor.
Telephone	: 08.5882153877
Email	: Rizqifitriana90@gmail.com
Hobby	: membaca novel dan menulis essay

FORMAL EDUCATION

- > **TK PERTIWI**
Lulus tahun 2004
- > **SDN KEBONDUREN 01**
Tahun 2004-2010
- > **SMPN 1 SRENGAT**
Tahun 2010-2013
- > **SMAN 1 SRENGAT**
Tahun 2013-2016
- > **S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor**
Tahun 2016 - Sekarang.

ORGANIZATION EXPERIENCES

- > **EKSTRAKURIKULER PADUAN SUARA SMPN 1 SRENGAT**
 - Sebagai Sekretaris
- > **OSIS SMAN 1 SRENGAT**
 - Sebagai Bendahara I
- > **LEGISLATIVE SCHOOL 53**
 - Sekretaris Komisi IV (Olahraga dan Seni)
- > **YAYASAN HAMADA FOUNDATION**
 - Sekretaris divisi pendidikan Hamada Bogor
- > **Green Active Youth**
 - Chief Financial Officer Accounting and Bookkeeper

- **ORANGE LEGACY 2017**
 - Anggota komisi I
- **HIPOTESA 2017**
 - Sebagai Bendahara Divisi LABEL

COMITTEE EXPERIENCES

- **PANITIA PEMIRA PPKU 53**
 - Suatu event dalam rangka pemilihan ketua BEM PPKU 53
 - Sebagai sekretaris Divisi Acara
- **PANITIA The 14th HIPOTEX-R**
 - Suatu event perlombaan nasional dari program kerja HIPOTESA
 - Sebagai Sekretaris Divisi Fundraising
- **PANITIA SMARTFEM 2017**
 - Suatu event perlombaan antar fakultas di FEM IPB.
 - Sebagai Staff Divisi Perlombaan
- **PANITIA PEMIRA FEM 2017**
 - Suatu event pemilihan ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Manajemen
 - Sebagai sekretaris divisi Logistik dan Transportasi
- **PANITIA SPORAKULER 2017**
 - Suatu event pertandingan olahraga SMA se-Jabodetabek Dan pertandingan olahraga antar departemen di FEM IPB
 - Sebagai bendahara divisi fundraising
- **PANITIA The 15th HIPOTEX-R**
 - Suatu event perlombaan debat ekonomi nasional oleh IE IPB
 - Sebagai Ketua Divisi Fundraising

WORK EXPERIENCE

1. FREELANCER CONTENT WRITER PT. AGROMARET
2. FREELANCER PENGAJAR DI SENTRAL EDUKASI
3. FREELANCER PENGAJAR DI ADI INDONESIA
4. TUTOR EKONOMI UMUM KATALIS CORP.

ACHIEVEMENT

- **JUARA III OLIMPIADE SAINS KABUPATEN BLITAR**
 - Sebuah perlombaan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan di Tingkat Kabupaten.
 - Lomba yang diikuti bidang Ekonomi.

- **10 BESAR OLIMPIADE SAINS PROVINSI JAWA TIMUR**
 - Sebuah perlombaan lanjutan dari Olimpiade Sains Kabupaten bagi yang mendapat 3 terbaik di Kabupaten.
 - Masuk dalam daftar 10 terbaik bidang Ekonomi.

➤ **JUARA III OLIMPIADE AKUNTANSI NASIONAL UM**

- Perlombaan yang diadakan oleh himpunan mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Malang.
- Juara III babak penyisihan.

➤ **5 BESAR OLIMPIADE AKUNTANSI NASIONAL UM**

- Perlombaan lanjutan dari babak penyisihan.
- Masuk dalam daftar 5 teratas.

SKILL

LINGUISTIK	●●●●●●●●	Ms Word	●●●●●●●●
PUBLIC SPEAKING	●●●●●●●●	Ms Excel	●●●●●●●●
ABILITY TO INFLUENCE	●●●●●●●●	Ms Powerpoint	●●●●●●●●
ACADEMIC	●●●●●●●●		

MY STRENGTH AND WEAKNESS

- **STRENGTH**
 1. Disiplin
 2. Teratur
 3. Rajin
- **WEAKNESS**
 1. Melankolis

MY 3 BIGGEST DREAM

- S2 di University of Melbourne (Basiswa LPDP)
- Gubernur Bank Indonesia
- Mendirikan Sekolah Harapan di Seluruh Daerah Indonesia

Sincerely

Rizqi Fitriana



Teknologi Finansial : Dari Keuangan Inklusif Menuju Pembangunan Inklusif melalui Skema *Peer to Peer (P2P) Lending* bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Oleh: Hanif Alif Naufal
Universitas Sebelas Maret

Latar Belakang

Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia sedang menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0 yang telah mempengaruhi berbagai sendi kehidupan, termasuk pada sektor lembaga keuangan. Dengan adanya pergeseran tersebut menimbulkan efek digitalisasi ke berbagai layanan keuangan. Lembaga keuangan dapat mengintegrasikan langsung layanan keuangannya dengan komputer membuat setiap transaksi dapat dilihat secara *real time*. Apabila lembaga keuangan formal maupun informal tidak dapat beradaptasi dengan perubahan digital ini, akan tergantikan oleh perusahaan-perusahaan keuangan baru yang dapat beradaptasi dengan digitalisasi.

Telah terjadi *shifting* ke arah digital ini membuat lembaga keuangan di Indonesia ditantang untuk menjadikannya sebagai sebuah peluang untuk dihadapi. Layanan keuangan mulai berinovasi untuk meninggalkan sistem konvensional yang inefisiensi di era digital ini. Perubahan pola konsumen layanan keuangan yang memiliki pola pikir serba cepat dan mudah akan menjadi ancaman bagi lembaga keuangan konvensional apabila tidak segera merespon. Lembaga keuangan mulai mengkolaborasi antara layanan keuangan dengan gawai yang terhubung dengan koneksi internet atau dikenal dengan teknologi finansial.

Dengan munculnya berbagai inovasi teknologi finansial memiliki pengaruh untuk terciptanya keuangan inklusif yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Perbedaan kemampuan dalam mengakses kepemilikan sumber daya modal menjadi penyebab permasalahan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Keterbatasan modal tersebut menjadi penghambat bagi para pelaku usaha untuk berdaya saing dengan pasar global dikarenakan jumlah persediaan modal menjadi unsur yang secara aktif untuk menentukan tingkat output yang dihasilkan.

Kepemilikan modal yang terbatas dalam jenis UMKM menyebabkan adanya transaksi pinjaman dana kepada perbankan. Namun yang disayangkan perbankan belum dapat membantu pinjaman yang diajukan oleh UMKM. Sulitnya dalam mengakses pinjaman berdampak pada *gap* pembiayaan yang semakin lebar. Padahal peluang UMKM sangatlah besar untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Lahirnya era digital pada teknologi finansial ditandai dengan munculnya layanan keuangan berbasis teknologi, seperti *peer to peer (P2P) lending*. Layanan keuangan tersebut diharapkan menjadi sebuah solusi guna mengurangi ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh modal. Dengan kemajuan akses internet yang semakin luas, apabila itu dimanfaatkan oleh UMKM untuk mengakses layanan *peer to peer (P2P) lending* akan mendorong pembangunan inklusif di Indonesia.

Teknologi Finansial : Dari Tantangan Menjadi Sebuah Peluang

Telah terjadinya pergeseran generasi di Indonesia dari *baby boomers* ke generasi Y. Generasi tersebut merupakan anak kandung internet yang lahir pada tahun 1980-2000 dan sekarang pengguna internet di Indonesia didominasi generasi tersebut. Dengan dimudahkan dengan akses internet yang semakin luas dan gawai yang telah melekat dalam setiap kegiatan sehari-hari membuat setiap aktivitasnya banyak dalam genggaman tangan.

Penetrasi jumlah pengguna internet sebesar 50 persen dapat menjadikan peluang sebagai pasar ekonomi dan menjadi pangsa layanan teknologi. Adaptasi dengan dunia digital adalah kunci untuk mencegah ketertinggalan dalam daya saing produk Indonesia. Layanan keuangan telah mulai beradaptasi sejak 1950 dengan munculnya ATM, pada tahun 1990 adanya aplikasi internet banking, dan pada awal dekade 2000-an mulai munculnya *smartphone* yang diterapkan pada layanan mobile banking di atau digitalisasi keuangan.. Digitalisasi telah banyak mengubah sistem dan struktur pasar lembaga keuangan.

Gambar 1, Intervensi Teknologi di Indonesia



Sumber : We Are Social 2018

Akibat digitalisasi keuangan menimbulkan *disruptive* terhadap layanan keuangan tradisional, penerapan teknologi juga mengubah sistem layanan kredit untuk meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Internet yang dapat di jangkau dimana pun akan memperluas akses keuangan, keterbukaan informasi, menghilangkan peran perantara dan dapat menekan biaya operasional.

Pergeseran digitalisasi pada era yang baru memunculkan inovasi pada layanan keuangan yaitu Tekfin (teknologi finansial) yang akan mempermudah dan mempercepat fungsi

intermediasi keuangan antara perusahaan dengan konsumen. Teknologi finansial telah menggeser intermediasi keuangan tradisional yang seharusnya nasabah datang ke bank untuk bertransaksi, namun sekarang konsumen dimanjakan dengan gawainya yang dapat mengakses berbagai layanan keuangan dengan terhubung lewat internet.

UMKM di Indonesia

Di Indonesia jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dikarenakan selain penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB), jenis usaha tersebut akan membuka banyak lapangan kerja. Namun, peluang pembangunan inklusif tersebut terhambat dengan minimnya akses pembiayaan oleh lembaga keuangan bagi para pelaku UMKM.

Jenis UMKM yang didominasi oleh usaha rintisan, sehingga sering mengalami pasang surut keuangan yang belum stabil. Kepemilikan modal UMKM yang terbatas membuat perlunya bantuan pinjaman dana untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Berdasarkan tabel dibawah, dapat dilihat besaran kredit UMKM yang diberikan oleh perbankan mengalami tren peningkatan tiap tahunnya. Pada 2013, besaran kredit yang disalurkan kepada UMKM sebanyak Rp. 639,47 triliun dan pada tahun 2014 jumlahnya meningkat menjadi Rp. 767,57 triliun atau sebesar 20 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah kredit yang diberikan oleh perbankan terus meningkat hingga 2017 mencapai Rp. 935,44 triliun.

Tabel 1, Perkembangan Baki Debet Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Perbankan 2013-2017 (Miliar / Billion Rp)

Baki Debet	2013	2014	2015	2016	2017
Kredit UMKM	639,471.5	767,577.6	830,656.2	900,389.8	935,445.3
Kredit Non UMKM	2,744,758.9	3,012,536.6	3,345,787.1	3,605,398.3	3,690,587.3
Kredit Perbankan	3,384,230.3	3,780,114.3	4,176,443.3	4,505,788.1	4,626,032.6

Sumber : Bank Indonesia

Meskipun jumlah kredit terus mengalami peningkatan, akan tetapi porsi kredit yang diberikan kepada UMKM ternyata jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan non UMKM. Pada tahun 2017, proporsi kredit yang diberikan kepada UMKM sebesar 935.445,3 atau hanya 20,22 persen dari total kredit perbankan yang disalurkan, sedangkan sisanya hampir 80 persen disalurkan ke jenis usaha besar.

Lembaga keuangan formal yang seharusnya menjadi pendanaan utama di dalam negeri, namun belum dapat memberikan bantuan pinjaman kepada UMKM. Dikarenakan perbankan konvensional beranggapan bahwa UMKM sebagai usaha yang berisiko, belum terjangkaunya akses perbankan keberbagai daerah dan sulitnya persyaratan untuk diterima sebagai penerima pinjaman menjadi alasan sulitnya UMKM untuk mendapatkan pinjaman kepada perbankan.

Ketidakmampuan tersebut menyebabkan adanya *gap* atau jarak pemberian pinjaman yang belum terpenuhi oleh lembaga keuangan formal. Berdasarkan riset Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2017 terdapat *gap* pembiayaan sebesar USD 57 miliar atau sebesar Rp.988 triliun yang belum mampu dipenuhi oleh perbankan. Perbankan sebagai lembaga keuangan formal belum dapat memenuhi permintaan pembiayaan yang menandakan belum adanya pemerataan dalam mengakses pinjaman keuangan. Dengan keadaan yang seperti ini mengindikasikan bahwa perbankan di Indonesia belum dapat menciptakan inklusi keuangan.

Tabel 2, Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012 - 2013

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2012 ⁽¹⁾		TAHUN 2013 ⁽²⁾		PERKEMBANGAN TAHUN 2012-2013	
			JUMLAH	PANGSA [%]	JUMLAH	PANGSA [%]	JUMLAH	(%)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	56.539.560		57.900.787		1.361.227	2,41
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	56.534.592	99,99	57.895.721	99,99	1.361.129	2,41
	- Usaha Mikro (UMI)	(Unit)	55.856.176	98,79	57.189.393	98,77	1.333.217	2,39
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	629.418	1,11	654.222	1,13	24.803	3,94
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	48.997	0,09	52.106	0,09	3.110	6,35
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	4.968	0,01	5.066	0,01	98	1,97
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	110.808.154		117.681.244		6.873.090	6,20
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	107.657.509	97,16	114.144.082	96,99	6.486.573	6,03
	- Usaha Mikro (UMI)	(Orang)	99.859.517	90,12	104.624.466	88,90	4.764.949	4,77
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	4.535.970	4,09	5.570.231	4,73	1.034.262	22,80
	- Usaha Menengah(UM)	(Orang)	3.262.023	2,94	3.949.385	3,36	687.363	21,07
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	3.150.645	2,84	3.537.162	3,01	386.517	12,27
3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	8.241.864,3		9.014.951,2		773.086,9	9,38
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	4.869.568,1	59,08	5.440.007,9	60,34	570.439,8	11,71
	- Usaha Mikro (UMI)	(Rp. Milyar)	2.951.120,6	35,81	3.326.564,8	36,90	375.444,2	12,72
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	798.122,2	9,68	876.385,3	9,72	78.263,1	9,81
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	1.120.325,3	13,59	1.237.057,8	13,72	116.732,5	10,42
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	3.372.296,1	40,92	3.574.943,3	39,66	202.647,2	6,01

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Jenis perusahaan UMKM merupakan usaha dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada 2013 saja, jumlah usaha UMKM di Indonesia mencapai 57,8 juta unit usaha atau sekitar 99,9 persen dari pelaku usaha nasional. Pada tahun yang sama jumlah usaha besar di Indonesia 5.066 ribu unit usaha atau hanya 0,01 persen dari total usaha nasional.

Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang dipengaruhi oleh jenis UMKM tumbuh sebesar 11 persen pada tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat menjadi pendorong tewujudnya Indonesia sebagai *high income country*, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 jenis usaha besar menyumbang Rp. 3.574 triliun, sedangkan jenis UMKM menjadi penyumbang terbesar PDB dengan nilai Rp. 5.440 triliun atau sebesar 60,34 dari PDB nasional.

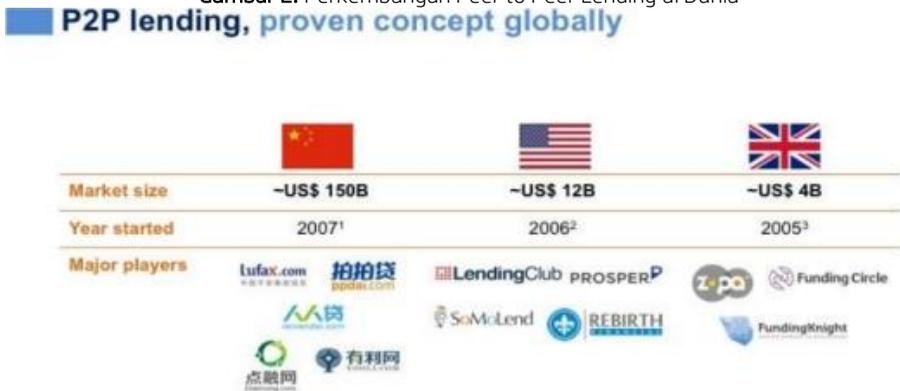
Tidak hanya menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, namun UMKM menjadi pendukung terciptanya pembangunan inklusif dari penyerapan tenaga kerja UMKM pada tahun 2013 memperkerjakan 114.114.082 juta jiwa atau sekitar 96,99 persen dari perkerja nasional. Pada tahun 2013 juga usaha besar dapat memperkerjakan 3.537.162 juta jiwa atau hanya 3,01 persen dari total pekerja nasional. Dari data tersebut melihtakan bahwa UMKM memiliki potensi daya serap tenaga kerja yang tinggi dibandingkan jenis usaha besar dan sangat tepat apabila UMKM diberikan perhatian lebih untuk dikembangkan di Indonesia yang diproyeksikan jumlah penduduk usia muda akan mengalami peningkatan pada 2030.

UMKM sangat memiliki peranan penting bagi Indonesia yaitu sebagai salah satu upaya untuk memberantas kemiskinan. Dengan UMKM juga diharapkan dapat membantu perputar roda perekonomian di setiap daerah. Di Indonesia jenis UMKM memiliki peranan penting untuk mengatasi masalah ketimpangan kesejahteraan antar daerah yang juga dapat mengatasi kesenjangan pendapatan antar masyarakatnya. Namun, apabila dilihat dari sebaran wilayah, kredit UMKM yang tersalurkan ternyata masih terpusat di daerah Jawa dan Bali. Peluang Indonesia dengan 50 persen lebih masyarakat telah menjadi *internet user*, apabila hal itu dimaksimalkan dengan maksimal akan membantu UMKM dalam mengakes keuangan.

Perkembangan Peer To Peer (P2P) Lending

Adanya peluang yang besar untuk terciptanya pembangunan inklusif di Indonesia melalui UMKM, namun disisi lain adanya hambatan dalam pembiayaan kredit memunculkan sebuah inovasi pinjaman dengan skema *peer to peer lending* (P2P *lending*). Skema ini dapat mempertemukan para peminjam dengan pemberi pinjaman sesuai dengan mudah, cepat dan aman.

Gambar 2. Perkembangan Peer to Peer Lending di Dunia



1. Year PPDai was founded; 2. Year Lending Club was founded; 3. Year Zopa was founded; 4. Lending Club, Prosper, Lufax, CRF, Dianrong
 Source: Industry reports, Company analysis, Shanghai Daily, Business Insider, Crunch Base © Modalku. Private & Confidential

Sumber : Industry reports, Company analysis, Shanghai Daily, Business Daily, dan Cruch Base

Pada tahun 2006 pertama kali muncul skema *peer to peer lending* (P2P) di Inggris dan disusul oleh negara Amerika Serikat dan China. Walaupun China bukan lah negara yang pertama memulai skema *peer to peer lending* ini, namun dia adalah negara yang memiliki *marketsize* yang sangat besar dibandingkan Amerika Serikat dan Inggris. Dapat dilihat perbandingan yang cukup jauh antara China yang memiliki *marketsize* US\$ 150 B, sedangkan Inggris dan Amerika Serikat masing-masing sebesar US\$ 4 B dan US\$12 B.

Indonesia perlu belajar dari China yang sukses menubuhkan skema tersebut dengan jumlah yang banyak dan cepat. Hal yang membuat China memiliki *marketsize* paling besar dikarenakan banyaknya jumlah UMKM disana dan membutuhkan akan bantuan pinjaman dana sangat besar. Selain itu, para pemberi dana juga yakin untuk memberikan pinjaman dana ke negeri China dikarenakan jenis UMKM disana memiliki *track record* daya saing yang bagus terbukti bahwa berbagai produk telah masuk dipasar global.

Dengan bermodalkan internet dengan gawai dapat menjadi pertemuan *online* antara pemberi pinjaman atau investor dengan peminjam atau sebagai suatu perusahaan yang mempertemukan para pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman dapat menjadi suatu skema untuk mengurangi *gap* atau jarak kebutuhan pendanaan bagi para pengusaha UMKM.

Gambar 3, Cara Kerja *Peer to Peer* (P2P) Lending



Sumber : InvesTree

Skema *peer to peer* (P2P) *lending* memiliki sistem kerja yang sederhana, perusahaan hanya berfungsi sebagai tempat bertemu atau *marketplace* untuk mempertemukan antara *lender* sebagai pemilik modal dan *borrower* sebagai pemilik usaha. Para pemilik dana yang berlebih menginginkan uangnya untuk di investasikan pada sektor yang menguntungkan dan dipertemukan oleh para pelaku usaha yang membutuhkan bantuan dana. Perusahaan memberikan wadah peretemuan dalam bentuk aplikasi secara *online*, sehingga setiap transaksi yang tertera dalam aplikasi adalah *real time*. Selain itu juga perusahaan *peer to peer* (P2P) *lending* juga memberikan jaminan keamanan terhadap para nasabahnya dengan melakukan pengawasan antara *lender* dengan *borrower*, sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Dengan adanya skema *peer to peer* (P2P) *lending* ini akan membuat akses pinjaman dana semakin mudah untuk terus meningkatkan inklusi keuangan yang ada di Indonesia. Tidak adanya batasan negara untuk mengakses layanan ini akan semakin banyaknya juga pemberi dana, hal tersebut apabila Indonesia memiliki iklim investasi yang baik.

Menurut Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, indeks inklusi keuangan skala nasional mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 dan 2016 yang masing-masing sebesar 59,74 persen dan 67,82 persen, sedangkan pada 2017 indeks inklusi keuangan meingkat dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 69 persen dari populasi penduduk. Hal tersebut dikarenakan digitalisasi layanan keuangan yang mulai diakses oleh masyarakat semakin meningkatkan.

Invoasi *peer to peer* (P2P) *lending* ini memiliki efek multiplier untuk menciptakan pembangunan yang inklusif. Terbukti bahwa menurut studi Oxford Economics setiap 1 persen kenaikan penetrasi perangkat mobile akan meningkatkan produk domestic bruto (PDB) sebanyak USD 640 juta di tahun 2020 dan menciptakan 10.700 pekerja formal. Penelitian yang dikeluarkan oleh World Bank apabila adanya peningkatan fasilitas sistem inklusi keuangan sebesar 1 persen bisa menaikkan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 0,03 persen. Apabila Pemerintah Indonesia maupun masyarakat semakin besar untuk mendukung penetrasi digital pada layanan keuangan bukan hanya meningkatkan PDB, namun akan meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia karena dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

Tabel 3. Ikhtisar Data Keuangan Fintech (*Peer To Peer Lending*) Periode Januari - Mei 2018

No	Deskripsi	Januari 2018	Febuari 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018
1. Akumulasi Jumlah Lender (Satuan akun)						
a.	Jawa (Lender dari Jawa)	87.728	101.543	115.050	128.287	158.512
b.	Luar Jawa (Lender dari Luar Jawa)	26.430	24.660	28.865	31.809	38.638
c.	Luar Negeri (Lender dari Luar Negeri)	1.781	1.916	2.050	2.177	2.389
d.	Agregat (Total)	115.939	128.119	145.965	162.273	199.539
2. Akumulasi Jumlah Borrower (Satuan akun)						
a.	Jawa (Borrower dari Jawa)	300.785	501.947	927.837	1.323.250	1.665.219
b.	Luar Jawa (Borrower dari Luar Jawa)	29.869	44.747	104.939	153.532	185.413
c.	Agregat (Total)	330.154	546.694	1.032.776	1.476.782	1.850.632
3. Akumulasi Jumlah Pinjaman (Rp)						
a.	Jawa (Borrower dari Jawa)	2.578.631.203.736	3.073.375.402.105	3.904.530.910.516	4.763.706.598.398	5.445.508.009.996
b.	Luar Jawa (Borrower dari Luar Jawa)	423.318.733.493	470.221.636.831	568.263.630.056	652.063.829.503	714.609.000.751
d.	Agregat (Total)	3.002.548.937.229	3.544.197.038.936	4.472.294.540.572	5.415.770.427.901	6.160.117.010.747
4. Rata-Rata Mislitar Pinjaman						
	Rasio Pinjaman Lancar (<= 30 hari)	94,65%	97,62%	98,65%	98,72%	98,13%
	Rasio Pinjaman Tidak Lancar (30 hari <= 90 hari)	4,07%	1,60%	0,81%	0,75%	1,12%
	Rasio Pinjaman Macet (> 90 hari)	1,28%	0,78%	0,55%	0,53%	0,64%
5. Karakteristik Pinjaman						
	Nilai pinjaman terendah (Rp)	210.000	243.000	161.500	5.000	5.000
	Rata-rata nilai pinjaman terendah (Rp)	12.816.250	34.686.344	44.155.149	36.134.317	33.377.100
	Rata-rata nilai pinjaman yang dibayarkan (Rp)	88.464.986	56.484.072	75.781.491	87.376.156	94.050.384

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan



Deputi Komisiner OJK Institute, mengatakan bahwa portofolio penyaluran dana melalui skema *peer to peer* (P2P) *lending* per Desember 2017 telah mencapai Rp2,5 triliun. Hal tersebut terus meningkat, hanya waktu 5 bulan tepatnya pada Mei 2018 jumlah pinjaman meningkat secara signifikan sejumlah Rp. 6,1 triliun. Peningkatan jumlah transaksi pinjaman yang cukup besar mengindikasikan adanya permintaan UMKM yang cukup besar permintaan dana pada sistem pinjaman *online* ini dan berpeluang untuk terus tumbuh seiring bertambahnya informasi mengenai bisnis ini.

Para pemberi pinjaman mulai tertarik untuk menginvestasikan dananya pada skema *peer to peer* (P2P) *lending*, dikarenakan terus mengalami peningkatan para pemberi pinjaman. Dari data OJK saat Januari 2018 para pemberi pinjaman 115.939 ribu orang dan terus mengalami peningkatan hingga data terakhir Mei 2018 sejumlah 199.539 ribu orang. Sedangkan dari sisi para peminjam meningkat secara signifikan tercatat saat Januari 2018 sebesar 330.154 ribu orang hingga pada 2018 sejumlah 1.850.682 juta orang atau meningkat 440 persen. Antusiasme masyarakat untuk meminjam dana sangat lah banyak, namun dari sisi pemberi pinjaman sangat lah sedikit.

Skema *peer to peer* (P2P) *lending* sangat lah menguntungkan bagi para peminjam dana yaitu para UMKM. Selain akses yang lebih mudah dan cepat dibandingkan perbankan, skema ini juga tidak memberatkan para UMKM karena bunga yang relatif kecil dibandingkan perbankan.

Pertumbuhan pinjaman berbasis *online* yang cukup pesat di Indonesia dikarenakan investor melihat skema pinjaman ini lebih menguntungkan dan minim risiko. Ketika perbankan memiliki rasio kredit bermasalah pada Februari 2018 sebesar 2,88 persen, namun apabila dibandingkan dengan skema *peer to peer lending* memiliki risiko kredit macet hanya 0,64 persen. Dikarenakan pada skema ini satu orang hanya dapat mendanai 20 persen dari total pendanaan sebagai bentuk diversifikasi risiko. Dengan dibatasinya pendanaan tersebut akan meminimalisir risiko gagal bayar yang cukup besar karena kerugian akan ditanggung bersama dengan para pendana lain.

Dalam skema pinjaman ini investor dapat mengenal peminjam dana secara terbuka sebagai bentuk transparansi risiko dan leluasa untuk memilih kategori *risk credit scoring* yang ingin didanainya, Apabila semakin tinggi risikonya, maka semakin tinggi bunga yang harus dibayar. Dan begitu juga sebaliknya, semakin rendah risikonya, maka pengembalian bunga semakin rendah. Hubungan antara si peminjam dan investor memiliki sifat yang terbuka sebagai bentuk transparansi dalam layanan keuangan. Dengan terintegrasi secara *online* layanan keuangan akan terlihat secara *real time* informasi pinjaman dan pendanaan. Hal tersebut akan memberikan informasi terkait dengan proses pendanaan, sehingga dapat jelas melihat lalu lintas transaksi dana.

Skema *peer to peer* (P2P) *lending* yang masih minim akan pencerdasan informasi mengenai skema kepada masyarakat dan *branding* yang kalah dibanding perbankan. Sehingga dana modal yang diterima tidak lah lebih besar dari perbankan. Untuk menciptakan keuangan inklusif di Indonesia perusahaan fintech tidak lah dapat bersendirinya sendiri, perbankan diharapkan dapat mengaplikasikan skema pinjaman ini untuk kesejahteraan masyarakat.



Pemerintah Sebagai Regulator

Pertumbuhan yang signifikan didukung oleh regulator yang proaktif dalam mengatur regulasi untuk memberikan jaminan kepada konsumen. Bank Indonesia (BI) sebagai lalu lintas moneter terpengaruh dengan adanya digitalisasi sektor keuangan ini dikarenakan untuk menjaga kestabilan keuangan di Indonesia. BI harus responsif terhadap perubahan layanan keuangan, terbukti bahwa BI sudah 3 kali melakukan perubahan aturan pada tahun 2009, 2016 dan yang terakhir pada Mei 2018 tentang uang elektronik atau *e-money*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfokus untuk mengatur lalu lintas sektor jasa keuangan menjadi kunci penting agar tetap terjaganya peluang pertumbuhan digitalisasi layanan keuangan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi *peer to peer* (P2P) *lending* adalah respon yang positif dari pemerintah dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem pinjam meminjam ini adalah legal dan dijamin kemanannya oleh Negara. Layanan keuangan modern ini menjadikan sebuah peluang, namun di satu sisi perlu hati-hati dalam mengeluarkan regulasi. Regulasi *fintech* yang begitu ketat seperti di United Kingdom (UK) sangat lah bagus karena baik dari sisi pelaku dan di industri akan stabil. Akan tetapi, ketika regulasi tersebut terlalu *strict* akan menghambat iklim investasi.

Namun, regulasi yang terbuka juga tidak bagus untuk keamanan dalam negeri, Ketika adanya *lag* regulasi yang menandakan perkembangan teknologi lebih cepat dibandingkan regulasinya, dapat menyebabkan risiko tidak dapat dimanajemen. Seperti di Negara China ketika regulasi dilepas sebebaskan-bebasnya selama 10 tahun karena kebutuhan dana dalam negeri, menimbulkan industri layanan keuangan tumbuh secara liar. Akibat adanya *lag* tersebut menimbulkan perusahaan *fintech* di China mulai tutup dikarenakan belum siapnya ketika adanya regulasi yang mulai diperketat.

Negara Indonesia yang tergolong masih baru dalam mengadopsi layanan *fintech* ini perlu banyak belajar dari negara-negara lain. Bagaimana menjadikan sebuah peluang untuk menciptakan pembangunan ekonomi dengan membuka iklim investasi pinjaman meminjam, namun dibarengi dengan pengawasan layanan keuangan untuk menjaga stabilitas layanan keuangan.

Indonesia mencoba memposisikan diri ditengah-tengah antara dua negara yang sukses dalam investasi maupun peraturan. Kerjasama antara OJK dengan BI menghasilkan *regulatory sandbox* untuk membuat ruang uji terbatas guna mencoba produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis perusahaan layanan keuangan. *Sandbox* ini juga sebagai bentuk mitigasi risiko pertumbuhan perusahaan *fintech* yang begitu cepat dan tidak lupa juga memberikan ruang inovasi bagi perusahaan untuk memunculkan layanan keuangan yang lebih efektif dan efisien .

Kesimpulan

Era baru finansial teknologi ini telah terjadinya pergeseran layanan keuangan. dapat menjadi sebuah peluang untuk terciptanya inklusi keuangan. Digitalisasi telah melahirkan inovasi baru dalam mempercepat dan mempermudah intermediasi layanan lembaga keuangan dengan



memanfaatkan teknologi secara *online* yang terhubung langsung dengan layanan keuangan.. Adanya *shifting* dalam industri keuangan memunculkan inovasi skema pinjaman secara *online* yaitu *peer to peer* (P2P) *lending* diharapkan menjadi solusi atas *gap* pembiayaan kredit usaha di Indonesia.

Peluang UMKM di Indonesia apabila dimanfaatkan dengan maksimal dapat menciptakan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Terlihat bahwa jenis usaha tersebut berkontribusi setengah dari PDB di Indonesia. Bukan hanya meningkatkan pertumbuhan pendapatan, disisi lain dapat membuka lapangan pekerjaan. UMKM yang berbasis padat karya akan melibatkan banyak manusia dalam proses produksinya, hal tersebut sangat pas dengan kondisi penduduk Indonesia yang kian meningkat.

Peluang UMKM sebagai sektor yang mampu mengatasi masalah ketimpangan ekonomi sering mengalami hambatan dalam pemberian kredit. Masyarakat Indonesia banyak meminjam dana ke perbankan, namun dari permintaan pendanaan yang banyak tersebut banyak ditolak oleh perbankan. Usaha yang didominasi oleh perusahaan rintisan, sehingga belum dapat kepercayaan dari bank untuk diberikan pinjaman karena takut akan risiko gagal bayar.

Potensi yang besar pada UMKM dengan adanya dalam layanan *peer to peer* (P2P) *lending* merupakan hal baru di Indonesia, sehingga perlunya menjaga iklim ekosistem keuangan dan pertumbuhan dengan didukung berbagai kebijakan. Namun layanan ini diyakini akan berkembang secara progresif dan dapat menjadi bagian dari solusi untuk mencapai Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Perkembangan layanan teknologi finansial yang begitu cepat perlu diwasani dan diberikan jaminan kepada para konsumen maupun investor untuk menjaga iklim investasi berbasis *peer to peer* (P2P) *lending* terus tumbuh. Dengan dikeluarkan berbagai aturan oleh pemerintah diharapkan akan membuat rasa aman bagi para penggunanya dan tidak puas begitu saja, pemerintah juga perlu responsive setiap permasalahan baru yang terus bermunculan. Pemerintah telah mengeluarkan *regulatory sandbox* yang diharapkan menjadi tempat perusahaan *fintech* untuk berinovasi sesuai batasan yang telah ditetapkan untuk menjaga kestabilan layanan keuangan di Indonesia.



Daftar Referensi

- <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx>
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/ikhtisar%20Data%20Keuangan%20Fintech%20%28P2P%20Lending%29%20Periode%20Mei%202018.xlsx>
- <https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/data/Pages/Data-Kredit-UMKM-Juni-2017.aspx>
- <https://www.investree.id/how-it-works>

Tentang Penulis



Hanif Afif Naufal

MAHASISWA EKONOMI PEMBANGUNAN,
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS
SEBLAS MARET

KONTAK

-  : 085786177918
-  : hanifafin@gmail.com
-  : Komplek Kodim 0506 no. 29, Tangerang
-  : hanifafinauf

TENTANG SAYA

- Saya adalah seorang mahasiswa yang mencoba peka dengan permasalahan bangsa melalui membuka ruang diskusi bersama pemerintah dan sekarang mencoba melalui tulisan. Karena bagi saya tulisan maupun mencoba membuka ruang diskusi adalah hal yang saling melengkapi.

PENDIDIKAN

- Prodi Ekonomi Pembangunan, FEB, UNS
- SMAN 2 Tangerang
- SMPN 1 Tangerang
- SDN Periuk 1 Tangerang

PENGALAMAN DAN PRESTASI ORGANISASI

BEM FEB UNS 2017
Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan

BEM UNS 2017
Staf Bidang Jaringan dan Aksi

BPPI FEB UNS 2017
Staf Bidang Dana Usaha

BEM FEB UNS 2018
Menteri Kajian Strategis

PENGALAMAN SEBAGAI TRAINER DAN PEMATERI

- Trainer dalam Assistant Motivation Training, FEB UNS 2018
- Pemateri dalam PKKMB, FEB UNS 2018 Pemateri dalam Diskusi Pubulik, FEB UNS 2018



SOCIAL CROWDFUNDING ANCAMAN PERBANKAN?

Mengetahui Bagaimana Platform KitaBisa Dapat Menghimpun Dana Dari Masyarakat Begitu Besar Meski Tidak Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Oleh: Ilham Gresnaidi
Universitas Muhammadiyah Gresik

"Banyak orang berfikir bahwa untuk berinovasi hanya perlu sebuah ide yang bagus, tapi sebenarnya yang paling penting adalah bisa beradaptasi lebih cepat dan selalu mencoba banyak hal" - Mark Zuckerberg

Masih begitu awal bagi saya saat itu untuk mengenal *platform* KitaBisa. Salah satu kampanye iklan di salah satu media sosial membawa saya lebih dekat dengan *platform social crowdfunding* tersebut. Masih begitu jelas memori yang membawa saya dalam impresi pertama melihat kampanye tersebut. Haru, dan simpati. Kekuatan magis tersebut membawa saya mendalami *platform* ini.

Sebelum masyarakat mengetahui keberadaan KitaBisa, banyak sekali kampanye donasi yang dibagikan dengan mengirim pesan dari satu ke satu orang lain lewat media sosial. Saya masih ingat betapa banyaknya *broadcast* membanjiri grup di *Whatsapp* atau postingan status di Facebook teman-teman saya pada tahun 2011-2014. Meski merasa sedikit bersimpati terhadap korban dalam kampanye tersebut namun nampaknya pesan-pesan kampanye tersebut tidak menggugah hati saya untuk menyisihkan beberapa uang saya untuk didonasikan kepada mereka. Bukan karena memang tidak ada uang di dompet saya, tapi karena saya masih belum begitu percaya dengan kredibilitas penghimpun dana donasi tersebut. Bahkan beberapa *broadcast* mengisyaratkan indikasi penipuan.

Atau mungkin nampaknya saya memang sedang berhati keras saat itu, namun hal tersebut tentu bukan tanpa alasan. Saya masih ingat dengan kasus Darsem di tahun 2011, TKW di Arab Saudi yang hampir saja dihukum pancung karena diduga membunuh majikannya namun berhasil selamat setelah pemerintah berhasil membayar uang diyat sebesar Rp4,1 miliar, lalu kini hidup bermegah-megahan menggunakan sumbangan dana yang digalangkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Atau kasus yang menimpa Cak Budi tahun lalu karena terduga bersalah menggunakan dana sumbangan masyarakat untuk hidup bermewahan dengan membeli mobil Fortuner, dan barang mewah lainnya yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Kedua contoh kasus tersebut tentu memberikan trauma bukan hanya untuk saya tapi kemungkinan besar seluruh masyarakat Indonesia yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Kampanye iklan tersebut tidak lantas memberikan saya alasan sehingga saya dengan mudah mengeluarkan uang untuk berpartisipasi menjadi donatur dalam penggalangan dana tersebut. Namun, begitu gencarnya kampanye iklan *platform* tersebut yang terus-menerus



muncul dalam linimasa di sosial media saya tentu membuat saya kembali berfikir. Untuk memastikan kembali kepercayaan yang telah lama hilang, saya kemudian melakukan *screening* mendalam terhadap kredibilitas *platform* ini. Hasilnya memang luar biasa, meski baru seumur jagung, namun nampaknya saya telah jatuh hati terhadap *platform social crowdfunding* ini. Akhir cerita, sekarang saya begitu menikmati sekali untuk berpartisipasi dalam kampanye penggalangan dana yang di adakan lewat *KitaBisa*. Terutama kampanye-kampanye yang sifatnya menggerakkan atau membantu seseorang untuk bangkit dan hidup normal kembali, seperti kasus-kasus masyarakat proleter yang membutuhkan suntikan dana untuk operasi segera, ataupun baru-baru ini, menggalang dana untuk membantu pengungsi akibat gempa di Lombok.

*** *KitaBisa.com*

KitaBisa merupakan proyek yang digagas oleh salah alumni Rumah Perubahan yang merupakan lembaga yang diprakarsai oleh Profesor Rhenald Kasali, yakni Muhammad Alfatih Timur pada 6 Juni tahun 2013. Pemuda kelahiran Padang, Sumatera Barat, tahun 1991, Muhammad Alfatih Timur atau yang biasa dipanggil Timmy ini juga merupakan alumni serta mantan aktivis di Universitas Indonesia. Timmy awalnya tergerak setelah mendapatkan inspirasi dari banyaknya situs daring *crowdfunding* yang sedang marak di luar negeri saat itu. Lewat instingnya yang kuat, Timmy melihat hal ini juga dapat diterapkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah di Indonesia hingga pada akhirnya lahir *platform KitaBisa* yang merupakan wadah yang menggabungkan pergerakan sosial dengan kekuatan teknologi digital sehingga dapat menghubungkan orang-orang baik di Indonesia. Lahirnya *Platform* ini tentunya memberikan warna baru bagi euforia dunia *startup* di Tanah Air.

Platform ini awal mulanya didirikan sebagai solusi untuk memfasilitasi masalah sulitnya mahasiswa dalam menggalang dana di masyarakat. Namun sayangnya, *platform* tersebut tidak mendapatkan atensi yang cukup banyak di kalangan masyarakat. Setelah ditelisik alasannya ternyata proyek mahasiswa adalah kampanye penggalangan dana yang tidak begitu menarik untuk didonasikan. Kemudian untuk mempertahankan *platform* yang kini sudah menjadi badan usaha resmi tersebut, Timmy beserta tim mencoba menyelam ke beberapa sektor, akhirnya medis menjadi sektor *market* yang paling *fit* di kala itu. Kampanye penggalangan dana yang berhubungan dengan medis dan sosial yang memiliki urgensi seperti orang yang sedang membutuhkan biaya rumah sakit segera diminati dan mendapatkan sambutan yang hangat oleh banyak orang sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan donasi.

Meski bermain dalam bidang *social based crowdfunding* yang memang pada dasarnya pemainnya tidak sebanyak *lending based crowdfunding* yang sudah terlebih dahulu diprakarsai oleh munculnya Modalku, Crowdo, dan lain sebagainya nyatanya setelah lima tahun berdiri *KitaBisa* masih bisa bertahan dan menjadi tempat bagi para penggalangan dana untuk mengkampanyekan donasinya. Vikra Ijas, Co-Founder dan CMO *KitaBisa* menjelaskan ada tiga *value* yang diberikan pada penggunaannya sehingga *KitaBisa* mampu bertahan sampai saat ini. Pertama adalah kemudahan, penggalang dana tidak perlu susah-susah untuk mengkampanyekan kembali kepada setiap orang mengenai aktivitas donasinya, sebab informasi



mengenai apa dan mengapa donasi tersebut dibuat sudah secara rinci dapat dibaca pada laman kampanye. Kedua adalah tanggung jawab, dimana jumlah transaksi dan nama-nama donatur dapat dilihat secara transparan di laman kampanye, kemudian juga ada fitur *update* informasi terkini sehingga penggalangan dana dapat memberikan informasi teraktual mengenai aktivitas donasi tersebut. Ketiga adalah faktor *viral*, dengan memanfaatkan faktor psikologis pada manusia tentunya setiap orang akan tergugah membagikan cerita-cerita dari informasi dan aktivitas donasi tersebut melalui *whatsapp*, terutama diperkuat dengan dukungan kredibilitas dari laman *KitaBisa* itu sendiri. Selain itu untuk tetap dapat mendanai aktivitas operasional perusahaan *KitaBisa* juga mengenakan *charge* maksimal 5% dari dana yang terkumpul. Meski begitu, inti dari *social entrepreneurship* tetap menjadi poin utama dalam *platform* ini.

Sampai tulisan ini ditulis *KitaBisa* telah menyalurkan sebanyak Rp366 miliar donasi serta zakat dengan 13.246 kampanye yang terdanai dan sudah memiliki 906.404 pengguna atau Timmy menyebutnya sebagai “Orang Baik”. Timmy memakai sebutan tersebut untuk merepresentasikan siapa saja yang sudah berani mengambil langkah nyata untuk membantu sesama. Lewat sebutan itu pula, *KitaBisa* juga telah memunculkan banyak proyek-proyek kebaikan atau kampanye donasi yang menakjubkan. Salah satunya adalah kampanye Pak Roger Umrah, pria penjual pulsa bernama asli Cecep Hidayatullah yang biasa mangkal menjajakan pulsa di kawasan kampus IPB ini membuat sekelompok mahasiswa di IPB untuk membantu beliau melaksanakan ibadah Umroh. Yang Lebih mengejutkannya, dari target awal donasi kampanye terkumpul sebesar Rp40 juta di akhir pengumpulan dana, kampanye tersebut justru mampu lebih banyak menggaet donatur sehingga bisa mengumpulkan dana lebih dari Rp130 juta. Selain itu *KitaBisa* juga merupakan suksesor dalam proyek penggalangan dana lain seperti pembangunan Masjid Chiba di Jepang dengan total dana terkumpul hingga Rp3,2 miliar, ataupun dukungan untuk Rio Haryanto untuk bisa mengikuti Formula 1 senilai Rp273 juta, bantuan Banjir Garut dengan nilai total Rp883 juta, Shelter Garda Satwa Indonesia senilai total Rp285 juta, dan juga proyek-proyek kampanye penggalan dana lainnya.

*** *Finance Technology*

Berkembangnya *platform* Kita Bisa tidak lepas dari mulai dikenalnya *financial technology* atau biasa disingkat *fintech* di Indonesia. Stein dan Dhar mendefinisikan *financial technology* sebagai inovasi dari sektor finansial yang melibatkan model bisnis yang telah terintegrasi dengan teknologi yang dapat memfasilitasi peniadaan perantara; dapat mengubah cara perusahaan yang sudah ada dalam membuat dan menyediakan produk dan layanan; dapat menangani masalah privasi, regulasi, dan tantangan hukum; memberikan peluang untuk pertumbuhan yang inklusif. Bank Indonesia secara resmi mengklasifikasi *financial technology* menjadi empat klasifikasi. Pertama adalah *crowdfunding dan peer-to-peer lending*, kedua adalah *market aggregator*, ketiga adalah *risk and investment management*, dan terakhir adalah *payment, settlement, dan clearing*.



Crowdfunding merupakan *platform* yang akan menghimpun dana masyarakat secara massal, *crowdfunding* tentu sangat berguna untuk keperluan penggalan dana untuk mendanai suatu proyek ataupun kampanye donasi seperti *KitaBisa*, sedangkan *Peer-to-Peer lending* merupakan layanan dari *finance technology* untuk memudahkan UMKM dalam meminjam dana ataupun masyarakat yang ingin memberikan pinjaman investasi terutama bagi mereka yang belum memiliki rekening di bank. *Market aggregator* merupakan *comparison site* atau situs yang membandingkan sekumpulan data finansial dari berbagai lembaga keuangan untuk dijadikan referensi untuk pengguna, untuk contohnya secara umum mirip seperti *CekAja.com* dan *kreditqogo.com*. *Risk and Investment Management* adalah platform yang memiliki fungsi yang sama seperti *financial planner*, pengguna akan dibantu untuk menemukan produk investasi yang paling cocok sesuai dengan preferensi yang diberikan, beberapa contoh diantaranya adalah *NqaturDuit.com*. Terakhir, *payment, settlement, clearing* merupakan *platform financial technology* dalam memawadahi pembayaran seperti *payment gateway* termasuk didalamnya *e-wallet*, untuk *platform* yang bermain di bidang ini nantinya akan secara khusus diawasi oleh Bank Indonesia dimana alasannya adalah karena didalam aktivitasnya nanti ada perputaran uang yang sudah tentu adalah tanggung jawab Bank Indonesia, salah satu contohnya adalah *iPaymu.com*.

Dikutip dari *cekindo.com* bahwa data menunjukkan hanya kurang dari 50% orang dewasa yang memiliki akun bank. Menariknya, data valid menunjukkan bahwa 50% dari populasi mengirimkan uang melalui bank, sedangkan 44% meminjam uang melalui kenalan. Hanya 27% masyarakat yang menyimpan uang di bank dan 9% membayar tagihan dan hutang melalui kartu kredit. Perkembangan penggunaan *finance technology* juga kian meroket dari yang hanya 7% pada tahun 2006/2007 kini menjadi 78%. Bukti-bukti ini tentu menunjukkan betapa besarnya potensi yang dapat ditargetkan *finance technology* terutama dalam bidang *Peer-to-Peer Lending*. *Finance technology* juga digadang-gadang pemerintah sebagai media untuk meningkatkan inklusi keuangan 75% pada 2019 nanti.

Untuk mencapai hal tersebut pemerintah menyarankan agar para pelaku industri *financial technology* untuk bekerjasama dengan institusi lainnya, seperti telekomunikasi dan terutama institusi perbankan. Hal ini nantinya diharapkan akan memberikan simbiosis mutualisme di setiap masing-masing pelaku industri. Bahkan menurut kajian World Economic Forum, bisnis konvensional tidak akan mampu bertahan apabila tidak segera mengambil langkah untuk segera berkolaborasi dengan pemain non-tradisional (termasuk didalamnya adalah *finance technology*) demi mempertajam spesialisasi bisnis.

Meski belum menjamah sekitar kurang lebih 69 persen populasi masyarakat yang menggunakan gawai atau ponsel pintar di Indonesia, *financial technology* nampaknya bisa memberikan udara segar bagi para peminjam dana. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa hingga Januari 2018 jumlah peminjam di perusahaan *finance technology* Sudah mencapai 260 ribu orang dengan nilai pinjaman mencapai Rp2,56 triliun, dan tersebut juga bersumber dari penyedia dana sebanyak 101 ribu orang. Tren *Finance Technology* sepertinya tidak lepas dari munculnya Asosiasi FintechIndonesia yang Lahor pada September tahun 2015 lalu. Asosiasi ini merupakan wadah bagi rekan bisnis yang terpercaya dapat diandalkan untuk membangun ekosistem *financial technology* di Indonesia. Pada tahun berikutnya, 2016, Otoritas Jasa



Keuangan mengeluarkan kebijakan mengenai peraturan baru yang ditunjukkan untuk pelaku *finance technology Peer-to-Peer Lending* tentang peminjaman *off balance sheet* oleh pasar dan oleh proses transaksi pembayaran oleh Bank Indonesia di dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

*** *Badan Yang Mengawasi Financial Technology*

Di dalam institusi keuangan konvensional seperti perbankan ada lembaga lain yang mengawasi aktivitas keuangan dalam lembaga tersebut. Lembaga tersebut biasa kita kenal dengan Otoritas Jasa Keuangan atau singkatnya OJK. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang fungsinya memang ditunjukkan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan termasuk didalamnya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, penggadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan berpusat di Jakarta namun juga memiliki kantor di dalam dan luar wilayah negara Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mengatur keseluruhan kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan tersebut sehingga dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil secara berkesinambungan. Otoritas Jasa Keuangan juga merupakan wadah agar setiap kegiatan dalam sektor keuangan dapat melindungi kepentingan seluruh konsumen dan juga masyarakat.

Dalam melakukan tujuan tersebut Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa tugas serta wewenang. Salah satunya adalah menetapkan peraturan pelaksanaan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Salah satu peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan kebijakan atas aktivitas di dalam *finance technology* adalah dikeluarkannya peraturan bagi *finance technology Peer-to-Peer Lending* yang dituangkan dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Didalamnya berisi panduan pelaksanaan industri *finance technology Peer-to-Peer Lending* mengenai kegiatan usaha, pendaftaran perizinan, mitigasi resiko, pelaporan dan tata kelola sistem teknologi informasi terkait dengan *Peer-to-Peer Lending* seperti pelaku *finance technology* diwajibkan untuk menyediakan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan, serta menempatkan *data center* di dalam negeri. Sekali lagi, peraturan ini dibuat untuk menjaga kebaikan kedua belah pihak baik bagi konsumen dengan melindunginya terakit dengan keamanan dana, serta pencegahan pencucian uang dan lembaga keuangan, meski memang pada satu sisi peraturan ini akan membatasi pelaku *finance technology* untuk dapat bergerak leluasa.. Diharapkan para pemegang saham, termasuk pemerintah dan pihak lainnya yang terkait dapat menciptakan *finance technology* yang kondusif.



Meski telah memberlakukan peraturan bagi para pelaku *financial technology* yang melakukan aktivitas *Peer-to-Peer Lending*, sayangnya sampai saat ini masih belum ada peraturan secara khusus dan spesifik yang berlaku untuk pelaku *financial technology* berbasis *social crowdfunding* seperti KitaBisa. Padahal dalam praktiknya, baik *Peer-to-Peer* ataupun *social crowdfunding* sama-sama menghimpun dana dari masyarakat. Yusman, Kepala Departemen Pengawas IKNB 1A Otoritas Jasa Keuangan menerangkan bahwa pihaknya bukan tidak mau mengatur *social crowdfunding* hanya saja untuk saat ini untuk dapat merealisasikan hal tersebut perlu koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri.

*** *Bagaimana KitaBisa Dapat Menghimpun Dana Begitu Banyak?*

Saat ini KitaBisa telah menyalurkan sebanyak Rp366 miliar donasi ditambah zakat lewat 13.246 kampanye yang terdani dan sudah memiliki 906.404 pengguna. Salah satu kampanye dengan total dana yang fantastis antara lain adalah kampanye untuk mengumrohkan Pak Roger, seorang penjual pulsa yang biasa mangkal di IPB, dengan total dana terkumpul hingga 130 juta lebih dimana angka tersebut tiga kali lebih banyak dari target total donasi yang akan diserahkan. Tentu, angka-angka tersebut cukup fantastis dan menimbulkan banyak pertanyaan mengingat KitaBisa hingga saat ini masih belum diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selengkapnya *startup* lain, KitaBisa juga mengalami banyak tantangan dalam perjalanannya. KitaBisa sempat kesulitan untuk menemukan *product* atau *market fit* serta meningkatkan *trust building*. Dimana, sektor yang digarap oleh KitaBisa adalah berhubungan dengan uang dimana rasa kepercayaan adalah faktor utama dalam aktivitas tersebut. Dalam meningkatkan *trust building* KitaBisa memiliki beberapa cara, diantaranya adalah dengan melakukan kolaborasi dengan intistusi, lembaga, atau pihak-pihak yang prominen. Contohnya saja, KitaBisa menggandeng Palang Merah Indonesia untuk menggunakan platform-nya dalam menggalang dana. Sesuai dengan prediksi, nama besar Palang Merah Indonesia membuat masyarakat cenderung semakin percaya pada *platform* ini. Kedua, KitaBisa juga melakukan pendekatan dengan mengaet *endorser* seperti saat menggalang Dana Beasiswa Dian Sastro, dimana *public figure* tentunya akan meningkatkan *trust* lebih banyak lagi. Selain itu KitaBisa juga melakukan pendekatan marketing konvensional dengan mengkampanyekan iklan mengenai *social experiment* "Bayarain Bensin Orang Lain di SPBU" di platform *streaming* Youtube sehingga dapat mengenai sisi emosional penonton, sehingga menjadi viral yang pada akhirnya meningkatkan *awareness* KitaBisa di masyarakat yang lebih luas lagi.

Meski pada dasarnya *social crowdfunding* bisa dibilang agak telat masuk meramaikan industri *finance technology* di dalam negeri sehingga pada akhirnya sampai saat ini hanya sanggup untuk melayani segmen market kelas menengah ke bawah dan UKM sehingga pada dasarnya tidak mampu untuk melawan kedigdayaan perbankan dan pasar modal namun lembaga keuangan konvensional patutnya harus bersiap-siap dengan era disrupsi ekonomi beberapa tahun kedepan. Word Economic Forum menghimbau agar lembaga keuangan nasional melakukan dua hal ini untuk bertahan, pertama adalah menciptakan produk baru yang mampu bersaing dengan *crowdfunding*. Inovasi perbankan seperti menghadirkan *branchless* atau



lembaga keuangan tanpa kantor kemungkinan besar akan menjadi terobosan baru untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. kedua, dari sisi institusi, lembaga keuangan seperti perbankan patutnya berkolaborasi dengan pemain modern seperti *finance technology* dan mempertajam spesialisasi bisnis.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan konvensional adalah kecepatan pelaku industri *finance technology* dalam beradaptasi dengan jaman. Tidak sulit bagi *platform finance technology* terus mengembangkan diri dan melakukan ekspansi dengan terus menerus memperbaiki *business model* mereka. Hal ini tentu adalah hal yang agaknya mustahil dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional karena sudah memiliki pasar yang besar ditambah sulitnya untuk mengubah kebijakan manajerial dalam perusahaan yang sudah lama berdiri, kesulitan tersebut juga dipengaruhi oleh budaya organisasi dari lembaga konvensional yang mungkin sudah merasa nyaman dengan keadaan saat ini.

Itulah kenapa lembaga keuangan konvensional harus bersiap-siap dengan segala inovasi yang kemungkinan lahir dari pelaku *finance technology* kemudian menjadi pilihan di masyarakat sehingga tahap demi tahap menculik nasabah-nasabah dari lembaga keuangan konvensional. Contohnya, saat ini KitaBisa sudah mulai memperkenalkan fitur *e-wallet* nya yang dinamai Dompot KitaBisa. *E-Wallet* ini memang pada dasarnya digunakan bagi para pengguna untuk melakukan donatur di KitaBisa secara mudah dan singkat, karena ketika mereka ingin berdonasi, tinggal dipotong dari dana *e-wallet* tersebut. Meskipun pengguna Dompot KitaBisa masih dibawah 1%, namun tidak ada yang bisa memberikan kepastian jika di masa depan KitaBisa tetap terus menerus menjadi layanan *social crowdfunding*, artinya, ada kemungkinan jika ada tren positif pengguna Dompot KitaBisa, perusahaan tersebut dapat mengubah *business model* mereka menjadi lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada masyarakat, persis dengan yang dilakukan salah satu *e-commerce* terbesar di Indonesia, Tokopedia. Tentu ini akan menjadi alarm bagi lembaga keuangan konvensional karena mereka harus berbagi *product market share* mereka di dalam sektor perkreditan dengan KitaBisa.

**** Kesimpulan**

KitaBisa merupakan *finance technology* yang bergerak dalam bidang *social crowdfunding* yang berkembang cukup cepat. Hingga saat ini, di tahun ke lima-nya, KitaBisa telah menyalurkan kurang lebih Rp366 miliar lewat 13.246 kampanye dan memiliki 906.404 pengguna. Meski untuk saat ini KitaBisa tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, KitaBisa tetap berhasil membangun kepercayaan kepada masyarakat luas untuk menyalurkan dananya di KitaBisa. Tentu hal itu adalah hal yang sangat sulit terutama bagi sektor KitaBisa yang berhubungan dengan uang sehingga tentunya sarat akan kepercayaan. Namun hal tersebut bisa dilalui KitaBisa melalui strategi yang cukup efektif melalui bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang sudah memiliki nama besar serta melakukan *endorsement public figure* sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang lebih luas. Meski saat ini KitaBisa tidak secara langsung *apple-to-apple* melawan lembaga keuangan konvensional seperti perbankan dimana keduanya memang tidak menghimpun dana untuk tujuan yang sama, dimana



KitaBisa melakukan penghimpunan dana untuk tujuan sosial, sedangkan lembaga konvensional seperti perbankan lebih bertujuan untuk bisnis, namun lembaga keuangan konvensional seperti perbankan patutnya memasang kuda-kuda untuk bersiap-siap dalam era disrupsi beberapa tahun kedepan. Terutama adalah karena begitu cepatnya pelaku industri *finance technology* seperti KitaBisa dalam beradaptasi dengan pasar sehingga dapat mengenal dan mengetahui kebutuhan pasar saat ini. Hal tersebut tentu menjadi alasan lain yang bisa mendasari perubahan *business model* bagi KitaBisa di masa depan. Mungkin saja beberapa tahun kedepan KitaBisa mulai membuka jasa perkreditan yang tentunya harus membuat lembaga keuangan konvensional seperti perbankan menelan ludah karena harus berbagi *product market share*. Terutama hal tersebut kemungkinan besar dapat terjadi melihat KitaBisa saat ini sudah melayani donasi menggunakan *e-wallet* yang dinamakan Dompet KitaBisa, dimana pengguna nantinya akan dimudahkan ketika ingin berdonasi di KitaBisa dengan hanya memotong saldo dari *e-wallet* tersebut.



Daftar Referensi

- Alvin Abyan, Muhammad (2018). Konsep Penggunaan *Financial Technology* Dalam Membantu Masyarakat *Sub-Urban* di Indonesia Dalam Melakukan Transaksi Finansial. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Bachdar, Syafiq (2017). Social Crowdfunding, Fintech yang Terlupakan?. <http://marketeers.com/social-crowdfunding-fintech-yang-terlupakan/>. Diakses terakhir 2 September 2018.
- Cekindo (2018). Perkembangan Teknologi Finansial (FinTech) di Indonesia. <https://www.cekindo.com/id/perkembangan-teknologi-finansial-fintech-di-indonesia.html>. Diakses terakhir 2 September 2018.
- Mag (2015). Mempelajari Lebih Dalam Tentang Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.mag.co.id/otoritas-jasa-keuangan/>. Diakses terakhir 2 September 2018.

1995

born on 11 november



WHATSAPP ME?



ILHAM GRESNAIDI

2002

studied on
SD Muhammadiyah GKB

2008

studied on
SMP Muhammadiyah 12 Gresik

2011

studied on
SMA Negeri 1 Gresik

2014

study on
Universitas Muhammadiyah Gresik
Major Management

SNEAK PEAK

Hallo. My name is Ilham Gresnaidi. Now, i am studying Management minor Finance on my beloved Universitas Muhammadiyah Gresik. I choosed Management due to my interest to micro economic, especially on business. On the last two years, i was developing my self by join and attend any workshops, volunteering activity and competition. I also learn design because i am sure this skill will be on top demand on years ahead.

ORGANIZATION

- WAKIL KETUA II OSIS
SMA NEGERI 1 MANYAR
- PIMPINAN REDAKSI
JURNALISTIK
SMA NEGERI 1 MANYAR

RELATED SKILL



COMMUNICATION ADAPTABILITY

ACHIEVEMENT

- 🏆 TOP 50 VOLUNTEER DELEGATES
INDONESIA GLOBAL NETWORK
SASAMBO GREENERATION OF EARTH
- 🏆 TOP 48 VOLUNTEER DELEGATES
YOU CAN INDONESIA
GLOBAL HEROES INDIA 2017

ARTIFICIAL INTELEGENCE (AI) YANG DIINTEGRASIKAN DENGAN SISTEM BLOCKCHAIN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN KEAMANAN TEKNOLOGI FINANSIAL ERA DISRUPTIF DI INDONESIA

Oleh: Farrel Alfaiz
Universitas Islam Indonesia

FinTech (*Financial Technology*) atau Teknologi Finansial berkontribusi dalam menangani berbagai kasus permasalahan transaksi keuangan maupun yang ingin menggunakan sebuah fitur demi mendapatkan kemudahan dalam mengolah keuangan. Menitikberatkan pada keamanan yang dimiliki oleh Teknologi Finansial, literasi keuangan yang mewabah ke masyarakat menjadikan inklusif keuangan semakin meningkat. Keamanan yang semakin canggih sudah diterapkan oleh pengguna *FinTech* di Amerika, seperti *PCI DSS* (*Payment Card Industry Data Security Standard*) sebuah sertifikasi keamanan yang menjaga dan menjamin kerahasiaan data pengguna ataupun *DevOps* dari belgia yang merupakan sebuah konsep tindak lanjut pelengkapan pengujian keamanan. Dengan keamanan yang mereka miliki, hal ini bertolak belakang dengan Infrastruktur Indonesia yang belum tertata, regulasi yang belum jelas, dan tingkat keamanan yang masih lemah. Terbukti *Cyber Crime* (Kejahatan Siber) menjadi sebuah ujung tombak dalam mengganggu keamanan Indonesia khususnya di bidang *FinTech*. *Symantec* suatu perusahaan yang mewedahi Internet Security Report melaporkan serangan terhadap jaringan internet global, Indonesia pada 2015 menduduki peringkat ke-29 namun kini di tahun 2016, Indonesia naik menduduki peringkat 17. Kemudian berdasarkan data Direktorat Reserse kriminal Khusus Polda Metro Jaya tahun 2017 terdapat 1763 kasus cyber crime di Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut, relasi yang telah terbangun antara teknologi dan layanan keuangan menimbulkan kekhawatiran yang semakin kompleks pada keamanan *FinTech* sehingga rawannya serangan terhadap sektor layanan keuangan *FinTech* yang semakin 'Royal' dalam menawarkan kenyamanan bagi para pengguna.

FinTech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien (World Bank Group, 2016). Meskipun kata 'efisien' menjadi sebuah tujuan bukan berarti kata tersebut menjadi sebuah makna yang aman dan bermanfaat saja, dibalik itu *FinTech* memiliki berbagai problematika yang masih harus dipecahkan. Satu diantaranya ialah Keamanan *FinTech* menjadi sebuah permasalahan yang seharusnya lebih diperhatikan oleh Indonesia, berbagai contoh kasus seperti *Virus*, *Malware*, *Ransomware*, *Phising*, *Illegal Acces* merupakan ancaman yang mengarah ke *FinTech*. Mengingat jejak rekam kasus yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan permasalahan ini bukan hal yang harus dipandang sebelah mata, jika keamanan *FinTech* saja masih terombang-ambing pertahanannya, bagaimana dengan masalah keamanan lain yang lebih rumit persoalannya.

Masalah keamanan dapat menjurus pada privasi para penggunanya. Sebagai Contoh sebuah kasus yang melanda Indonesia dengan sebuah media sosial terbesar di dunia Facebook dan pemiliknya Mark Zuckerberg. Sebuah firma Analisis *Cambridge Analytica* telah memanfaatkan facebook untuk mencuri 1 Juta pengguna di Indonesia untuk keperluan kampanye pemilihan



presiden Amerika Serikat pada tahun 2016, begitupula di negara mereka sendiri yang telah mengambil 50 Juta Pengguna untuk keperluan yang sama dan menjadikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (Efri Ritonga, 2018). Dengan dampak tersebut Facebook pun memiliki masalah besar seperti tekanan yang menyerang dari Petinggi Amerika Serikat dan negara di Asia Tenggara yang juga terserang, tidak hanya itu terjadinya krisis kepercayaan dari para pengguna, Pengiklan, dan Investor membuat Facebook semakin terancam eksistensinya. Meskipun permasalahan ini tidak berdampak besar untuk Indonesia dikarenakan menurut Ketua Pengelolaan Domain Internet Indonesia (Pandi) Andi Budimansyah, menuturkan bahwa *Security Awareness* (kepedulian terhadap keamanan) di Indonesia masih terbilang rendah dikarenakan kasus *Cyber Crime* (kejahatan siber) yang masih merajalela dan kurang pedulinya Indonesia terhadap permasalahan tersebut namun kasus ini perlu menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Berangkat dari kasus tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa *Big Data* (kumpulan himpunan data yang besar) memiliki kelemahan disisi keamanan itu sendiri. Jika kita mengimplementasikan dalam *FinTech* yang tengah berkembang saat ini tidak menutup harapan jika kasus seperti Facebook dapat berimbas kepada *FinTech* dengan cara serangan yang berbeda-beda.

Maka dari itu, sebuah perusahaan memiliki sebuah resiko atau yang dapat kita sebut dengan resiko usaha. Resiko usaha memiliki 3 faktor yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh ekonomi, alam, dan perilaku manusia (Abbas Salim, 2007). Ketidakpastian ini menjadikan sebuah keraguan terhadap keamanan dari suatu perusahaan terlebih pada perusahaan yang bekerjasama dengan *FinTech* maupun startup yang mencoba mengembangkan *FinTech*. Hal ini dapat kita kategorikan lagi sebagai risiko *FinTech*, resiko *FinTech* muncul selain dari manusia itu sendiri juga muncul karena kerentanan sistem dan proses data (*cyber risks*) yang berbasis komputer yang saling terkait dan dapat dimanfaatkan oleh para *hacker* untuk kesenangan atau niat kriminal (Narain, 2016 dan Wellisz, 2016). Resiko tersebut selain dari Data (*cyber risks*) juga berpengaruh terhadap operasional (*operational risks*) perusahaan *FinTech* kepada Infrastruktur pasar keuangan atau bahkan *stakeholder* yang rentan terhadap guncangan. Dengan demikian risiko yang mengalir dapat berdampak sistemik terhadap keuangan secara keseluruhan, Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pemecah masalah yang dapat menjadi solusi untuk permasalahan *FinTech* di Indonesia.

Pesatnya perkembangan teknologi zaman sekarang menimbulkan inovasi-inovasi baru muncul demi memenuhi kebutuhan masyarakat, tatkala dengan berkembang dan majunya sebuah inovasi tersebut menimbulkan sebuah era tersendiri di tiap perkembangannya yang harus siap diterima masyarakat, satu diantara era tersebut ialah era disruptif teknologi yang menjadikan perusahaan harus siap dalam menghadapi tantangan tersebut. Era disruptif menurut guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Prof. Rhenald Kasali dalam bukunya yang berjudul "Disruption: Menghadapi Lawan-Lawan Tak Kelihatan dalam Peradaban Uber" menyebutkan bahwa era disruptif merupakan sebuah inovasi yang akan menggantikan "pasar lama", Industri, dan teknologi yang menghasilkan suatu kebaruan yang lebih efisien dan menyeluruh dan bersifat destruktif dan kreatif (Rhenald Kasali, 2017) selain itu juga ada Inovasi disruptif atau *disruptive innovation* merupakan inovasi yang berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses,



kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Istilah ini dilontarkan pertama kalinya oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bower di tahun 1995. "*Disruptive Technologies: Catching the Wave*", *Harvard Business Review* (1995). Inovasi Disruptif ini biasanya mengambil segmen pasar tertentu yang kurang diminati atau dianggap kurang penting bagi penguasa pasar, namun inovasinya bersifat *breakthrough* dan mampu meredefinisikan sistem atau pasar yang eksisting. Munculnya Inovasi Disruptif jika tidak diantisipasi dengan baik oleh dunia usaha dapat menyebabkan kejatuhan. (Hadad, 2017). Jika kita menggali lebih dalam, inovasi di era disruptif berpotensi mengacaukan bisnis atau mengacaukan sistem yang ada. Sebagai contoh ialah kehadiran startup Gojek yang dimasanya membawa perubahan yang besar sehingga mengacaukan eksistensi dari transportasi konvensional sehingga teknologi informasi yang digunakan mengubah kehidupan manusia dari peradaban *time series* menjadi *real series*. Keamanan *FinTech* pun menjadi suatu acuan di-era disrupsi ini, Keuangan adalah hal yang sangat sensitif pengelolaannya. Tentunya harus ditangani dengan hati-hati dan penuh perhatian. Melacak transaksi keuangan maupun membuat suatu fitur yang lebih efisien terbukti bermanfaat dalam menjaga kekuatan dan keamanan dari keuangan tersebut. Hal inilah yang menjadi hadirnya beberapa lembaga keuangan maupun perusahaan diberbagai bidang menggunakan teknologi sistem keamanan terancang untuk menjaga diri mereka agar tidak runtuh dari era disruptif ini.

Kecerdasan Buatan atau "Artificial Intelligence" (*AI*) menjadi suatu pertahanan terbaru dalam dunia keamanan *FinTech*. Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) ialah sebuah tempat penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas (H. A. Simon, 1987). *AI* memiliki kontribusi dalam membantu manusia meningkatkan efisiensi pekerjaan, dalam makna yang lebih luas *AI* mencoba membangun komputer sehingga dapat berpikir sebagaimana manusia berpikir untuk meningkatkan tindakan perlindungan mereka dan meningkatkan tingkat *throughput*, akurasi, dan efisiensi. *Artificial Intelligence (AI)*. Dalam hal Keuangan *AI* juga memiliki kemampuan dalam mengubah maupun mengawasi arus keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilansir oleh *Mckinsey Global Institute* tentang "*Artificial Intelligence: why a digital base critical*" adopsi *AI* dapat menjadi sebuah investasi dalam mengembangkan teknologi yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan hal tersebut dapat terjadi jika perusahaan dengan tenaga kerja berkualitas serta basis teknologi yang kuat sehingga penggunaan *AI* pada perusahaan dapat menyeluruh dan mengintegrasikan ke teknologi yang ada (Mckinsey.com, 2018).

Sinergi dapat dilakukan antara *AI* dengan *FinTech*, *AI* dapat membantu *FinTech* tidak hanya dari segi operasional dan *big data* namun juga dari sisi keamanan yang sangat dibutuhkan dikarenakan pentingnya menjaga perusahaan dan kepercayaan pengguna. Permasalahan volume besar transaksi yang diambil melalui sistem dan setiap margin kesalahan cenderung memiliki konsekuensi bencana, dengan bantuan *AI* tingkat kesalahan pembuatan berkurang dikarenakan lajunya kesamaan pola yang sedang berkembang terdeteksi dan ditangani dengan cara terbaik. Jika ada transaksi mencurigakan dalam aliran transaksi, program kecerdasan buatan dapat menggunakan sebuah database untuk memastikan bahwa setiap catatan cocok dengan transaksi yang telah terjadi. Agar proses berjalan dengan baik dibutuhkan sebuah pondasi yang



dapat membantu kinerja *AI*, dengan *Machine Learning* (pembelajaran mesin) waktu yang diperlukan untuk mendeteksi kesalahan dapat diperkecil dan celahnya bisa tertutup. Pola yang dapat terbaca dari waktu ke waktu seperti disaat pinjaman maupun transaksi meningkat ketika akhir bulan dapat terdeteksi dan menjadi sebuah refleksi ke dalam sistem yang kemudian mampu memanfaatkan inferensi kecil yang dibuat dari kumpulan *Big Data*. Pendekatan *Machine Learning* untuk membuat transaksi keuangan lebih lancar dan aman agar Bank atau Perusahaan *FinTech* dapat dipercaya dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Hal ini juga berguna dikarenakan mencegah terjadinya transaksi ganda dan sebagai hasilnya, penipuan dan kejahatan keji lainnya ditangani dengan cara yang otomatis dan cerdas. Pencegahan transaksi ganda yang berarti, setiap pembalikan yang perlu dilakukan akan ditangani dengan pola dan sistem yang dilakukan dengan seksama dengan cara yang mudah. Kecerdasan buatan juga didasarkan pada rutinitas yang sudah ada dan seiring berjalannya waktu, pelanggan yang melakukan transaksi melalui portal bank atau perusahaan *FinTech* dapat memperoleh akses ke akun mereka bahkan ketika itu bukan pada jam operasional normal.

AI pun menjadi sebuah kekuatan dalam menangani kasus keamanan di *FinTech*.namun kita tidak dapat menyimpulkan bahwa dengan Sistem *AI* itu sendiri dapat menangani permasalahan keamanan secara instan, diperlukan aksi ganda yang dapat memperkokoh keamanan *FinTech* dikarenakan berdasarkan data yang dilansir dari Symantec oleh Alejandri Bolgia sebagai manajemen Produk untuk divisi Analisis dan Riset Keamanan Symantec menjelaskan bahwa Serangan *AI* maupun *Machine Learning* pertama kali diprediksi akan dimanfaatkan para penjahat siber ditahun 2018 untuk melancarkan serangan yang akan merusak konteks keamanan siber berupa illegal Acces, Virus, dan jenis serangan terbaru yang akan melanda dunia *FinTech* (Alejandre Bolgia, 2018). Untuk itu agar pertahanan *FinTech* kokoh dibutuhkan kolaborasi sistem yang dapat membantu *AI* dalam menangani masalah keamanan, sistem tersebut ialah *Blockchain*.

Blockchain merupakan sebuah teknologi yang dikenalkan bersama dengan Bitcoin oleh seorang atau kelompok yang menamakan dirinya Satoshi Nakamoto yang pertamakali digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dari bitcoin. Sistem *blockchain* memiliki ciri khas tersendiri, dalam konteks yang sederhana sistem *blockchain* berupa struktur data yang tidak dapat dirubah dan hanya bisa ditambahkan sehingga setiap data dari *blockchain* saling berhubung. *Blockchain* memiliki mekanisme, dalam sistem keuangan untuk menjamin tidak ada uang yang hilang maupun salah transaksi membutuhkan catatan mengenai transaksi perpindahan dalam sebuah buku besar (Nakamoto, bitcoin.org, 2018). Buku besar akan memastikan jumlah uang keluar masuk catatan dengan benar, dalam platform *FinTech*, seperti alipay maupun paypal yang melibatkan sejumlah institusi keuangan berbeda, maka sang perantara yang bertanggungjawab untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan. Sistem ini mengharuskan memiliki hanya 'satu' buku besar yang dikelola oleh penyedia platfotm, sebagai rujukan tunggal kepada pihak yang bertransaksi. Konsep tersebut yang menjadikan kekuatan sehingga disebut sebagai 'single point of failure' yang berarti peretas mendapatkan akses terhadap buku besar yang dikelola oleh *FinTech*. *Blockchain* menghilangkan perantara tersebut dengan mendistribusi-



kan buku besar pencatat transaksi ke dalam jaringan komputer yang terliba, semua transaksi yang terjadi harus diumumkan untuk diverifikasi oleh seluruh komputer pemegang buku besar itu sebelum dinyatakan sah. Transaksi yang sudah diverifikasi, diletakkan dalam blok blok ternkripsi, yang 'dirantai' secara permanen dengan blok transaksi sebelum dan sesudahnya, itulah mengapa sistem tersebut disebut *Blockchain* (McKinsey.com, 2017).

Dengan sistem pencatatan transaksi yang demikian, terdistribusi dan terikat dalam rantai blok yang terenkripsi, membuat platform ini sangat aman. Dibutuhkan kemampuan yang luar biasa untuk bisa meretas ini, Hambatan pertama ada pada blok transaksi yang terenkripsi. Untuk bisa meretas satu transaksi, berarti harus juga meretas blok transaksi sebelum dan sesudahnya. Itu artinya sama saja dia harus bisa meretas seluruh blok transaksi yang pernah tercatat, karena semuanya terkait satu dengan lainnya. Kedua, dengan sistem pencatatan transaksi yang terdistribusi secara identik pada entah berapa banyak server di dunia ini, maka kalaupun bisa menaklukkan satu salinan *blockchain*, seorang peretas harus bisa juga mendapatkan verifikasi dari server penyedia salinan *blockchain* lain. Karena itu platform *blockchain* ini memberikan tingkat keamanan yang luar biasa tinggi hingga ke level hampir mustahil diretas. Tapi disisi lain, semakin banyak transaksi yang terjadi, akan membutuhkan kemamuan dan sumberdaya komputasi yang semakin besar pula. Meskipun hal itu sudah disiasati oleh Satoshi Nakamoto dengan membuatnya sebagai sebuah sistem terdistribusi (Nakamoto, bitcoin.org, 2018).

Blockchain pun memiliki keuntungan keamanan yang dinamis yaitu sistem paling aman dikarenakan menggunakan hashing ganda (memastikan integritas yang sama), Transparansi yang membantu aplikasi dalam menyimpan data dan menghindari penipuan dan cacat, Konsensus sebagai bentuk kepercayaan dan privasi pengguna, dan terjadinya transaksi pintar yang efisien. Begitupula dengan keuntungan *AI* seperti otomatisasi yang meningkat dimana dapat melihat laporan secara cepat dan efisien sehingga didapatkan transparansi, mengurangi waktu pemrosesan untuk menghindari Illegal Acces, dan tentunya meningkatkan keamanan dari segi perilaku curang, transaksi merugikan dan potensi serangan di masa depan (McKinsey, 2017). Dengan kecanggihan sistem canggih yang dirancang sedemikian rupa serta manfaat keamanan yang diterima juga adanya keterkaitan fungsi satu sama lain. Kita dapat mengebalorasi kan kedua sistem tersebut menjadi sebuah pertahanan terbaru dalam dunia Teknologi finansial.

Elaborasi tersebut terbukti dapat membangkitkan sistem keamanan yang baru, sinergi antara dua gerakan komputer yang kuat ini ternyata lebih besar dikarenakan *AI* dapat menggunakan informasi yang diperoleh dan dimanipulasi oleh *blockchain* untuk menyelesaikan masalah dan meperkuat keamanan daripada sebelumnya tanpa terbatas pada satu set data atau pembatasan entitas tunggal. Elaborasi antara *AI* dengan *Blockchain* telah terbukti menghasilkan sebuah teknologi maupun aplikasi baru, seperti *DeepBrain Chain* yaitu sebuah Pasar layanan *AI* terdesentralisasi dengan jaringan saraf mereka sendiri dan dimotori oleh *blockchain*, tujuannya untuk mengurangi biaya masuk untuk pengembangan *AI* yang digunakan untuk memasok kekuatan pemrosesan kepada perusahaan yang ingin mengembangkan teknologi *AI* dengan motor *Blockchain* dan *Namahe* sebuah platform yang bertujuan untuk secara besar besaran merombak industri yang terlibat dalam rantai pasokan (sebuah jaringan yang sangat rumit yang



menghubungkan konsumen di ujung rantai, kepada para pekerja di awal rantai, melalui beberapa perantara termasuk produsen, pemasok, dan pengecer) dengan memasukkan lapisan *AI* dan *Blockchain* ke dalam campuran. Berangkat dari contoh tersebut dapat kita katakan bahwa ketika industri berkembang seperti terjadinya revolusi Industri 4.0, kita akan mulai melihat *blockchain* telah diterapkan dan produk berbasis non *blockchain* memanfaatkan keunggulan *AI* itu sendiri, perkembangan *AI* yang benar-benar responsif dan dapat beradaptasi telah lama menjadi arena fiksi ilmiah belaki kini di tahun 2018 maupun tahun berikutnya akan terjadi permulaan masa depan di era disruptif. gabungan *AI* dan *Blockchain* memiliki potensi jangka panjang yang layak mendekati masa depan keamanan *FinTech* Indonesia dimana tingkat inovasi disruptif semakin maju.

Meskipun *AI* dan *Blockchain* merupakan masa depan *FinTech* Indonesia namun sejatinya, Indonesia masih memiliki tantangan terbaru dalam menerapkan teknologi tersebut. Kita akan menghadapi tiga hal yang menjadi tantangan dalam bergerak ke era disruptif, pertama ialah yang paling utama Sumber Daya Manusia, dalam menerapkan *AI* dan *Blockchain* dibutuhkan pengembangan SDM untuk mendapatkan ahli di bidang tersebut yang memiliki keterampilan bisnis, teknologi, dan analitik sehingga dapat mewujudkan generasi yang menciptakan *AI* dan *Blockchain* untuk kebutuhan perusahaan di Indonesia maupun pemerintah, sejauh ini dalam rangka ulang tahun bukalahap ke-8 Chief Executive Officer (CEO) Bukalahap Ahmad Zaky berencana membuat pusat riset dan pengembangan atau R&D demi mengembangkan Artificial Intelligence serta *Blockchain* di Indonesia (Tempo, 2017). Kedua Infrastruktur maupun teknologi di Indonesia sendiri, infrastruktur Indonesia masih belum tertata dalam membangun *AI* dan *Blockchain*, namun inilah menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi Indonesia sehingga Indonesia dapat memiliki teknologi canggih yang dapat mendukung pembangunan *AI* dan *Blockchain* di Indonesia. yang terakhir ialah jika Indonesia mau menggunakan teknologi tersebut Indonesia juga harus memperhatikan masalah syarat untuk menggunakan dan regulasi yang ada. Indonesia memiliki Analisis SWOT, menurut (Kotler dan Armstrong, 2008) analisis SWOT merupakan penilaian menyeluruh terhadap kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) suatu perusahaan. Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis yang dapat digunakan sebagai dasar tujuan dan penetapan strategis suatu organisasi. Maka analisis SWOT merupakan instrumen yang mampu menganalisis strategi untuk menilai kualitas layanan, sehingga diharapkan mampu meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu lembaga perbankan serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi, hal ini penting dikarenakan terdapat peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *financial technology*.

Masa depan Indonesia di era disruptif memiliki tantangan yang berat sehingga perlunya semangat dan optimis untuk menyambut sebuah sistem keamanan baru bagi teknologi finansial, Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi *FinTech* di Indonesia tidak dapat ditolak dan dihindari sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Meningkatnya konektivitas Internet dan perangkat *mobile* mendorong perkembangan infrastruktur layanan



keuangan yang memadai. Perkembangan *FinTech* di Indonesia masih dalam tahap awal dan perkembangan dimana banyak industri yang belum terjamah dan banyak peluang yang belum terkesplorasi maksimal. Sesuai dengan konsep Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI), *FinTech* harus mampu bersinergi dengan industri keuangan yang ada untuk memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Regulator perlu menyusun kebijakan strategis untuk menangkap peluang dan menghadapi tantangan perkembangan *FinTech* untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kita turut bersyukur bahwa teknologi finansial telah didukung oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan yang berbasis teknologi informasi yang dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional dengan diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 77/POJK 01/2016 tentang layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Dengan terwujudnya Artificial Intelligence yang diintegrasikan dengan *Blockchain* diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan keamanan *FinTech* di era disruptif sehingga terciptanya teknologi keuangan yang aman dan digunakan untuk kemajuan potensi bangsa Indonesia.

Daftar Referensi

- Hadad, Muliaman D. (2017). *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*, Kuliah Umum tentang *FinTech* – IBS, OJK Jakarta, 2 Juni 2017.
- Borgia, A. (2018). Automating the Discovery and Investigation of Targeted Attacks with {AI} and Machine Learning.
- Christensen, C. M., & Bower, J. L. (1996). Customer power, strategic investment, and the failure of leading firms. *Strategic management journal*, 17(3), 197-218.
- <http://industri.bisnis.com/read/20180110/105/725308/bukalapak-bangun-rd-untuk-ai-dan-blockchain-pertengahan-2018>
- <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/ai-automation-and-the-future-of-work-ten-things-to-solve-for>
- <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/ten-red-flags-signaling-your-analytics-program-will-fail>
- <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/ai-automation-and-the-future-of-work-ten-things-to-solve-for>
- <https://news.okezone.com/read/2017/12/21/337/1833784/tahun-2017-polisi-tangani-1-763-kasus-kejahatan-siber>
- https://www.huffingtonpost.com/entry/how-ai-is-changing-FinTech_us_5a1c4e9ce4b0e580b35371e0
- <https://www.technofication.com/2017/10/blockchain-explained.html>
- <https://nasional.tempo.co/read/694788/indonesias-cyber-security-awareness-still-low-observer>
- <https://investigasi.tempo.co/249/skandal-data-facebook-kronologi-pemain-kunci-dan-kasus-di-10-negara>
- Kasali, R. (2018). Disruption “Tak Ada Yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup” Menghadapi Lawan-Lawan Tak Kelihatan dalam Peradaban Uber. *PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta*.
- Maharesi, Yogie. (2017) *Fintech dan Transformasi Industri Keuangan*, Departemen Komunikasi dan Internasional Otoritas Jasa Keuangan, industry.co.id, 2 August 2017. <http://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesian/fintech-dan-transformasi-industri-keuangan.html>
- Nakamoto, S. (2018, 4 10). *bitcoin.org*. Retrieved from [satoshi@gmx/ com](mailto:satoshi@gmx.com).www.bitcoin.org: Satoshi Nakamoto sathosin@gmx.com. www.bitcoin.org
- Narain, A. (2016). Two faces of change. *Finance & Development* (September), Vol. 53, No. 3. Washington DC, International Monetary Funds.
- Salim, A. (2007). Asuransi dan Manajemen Risiko. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Simon, H. A. (1987). Two heads are better than one: the collaboration between AI and OR. *Interfaces*, 17(4), 8-15.
- World Bank Group. (2016). *The Little Data*. World Bank Publications.
- Warta fiskal edisi #5/2017 mohammad Afdi Nizar
- Wellis, C. (2016). The dark side of technology. *Finance & Development* (September), Vol. 53, No. 3. Washington DC, International Monetary Funds.

Tentang Penulis



Farrel Alfaiz

College Student

Phone: 085820980438
Address: Jl. Parit H. Husin 2, Komp. Balimas 2 No. B-8
Status: Mahasiswa
Email: loqkqaritma@yahoo.co.id

Hi! Nama saya Farrel Alfaiz, saya lahir di Pontianak, 7 Agustus 2000. saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di universitas swasta terbaik di Indonesia yaitu Universitas Islam Indonesia di Jogjakarta tahun 2018, Fakultas Teknologi industri Jurusan Teknik Industri. Ibu saya bernama Tri Indriastuty yang lahir di Pontianak dan Ayah saya bernama Windu Priyo Widodo yang lahir di solo, abang saya bernama Alvin Diyandra saat ini tengah menempuh pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor jurusan Arsitektus Lanskap

POTENSI DAN PENGALAMAN DIRI

Hi, Jika ditanya mengenai potensi dan pengalaman diri. saya memiliki potensi dalam lingkup berbicara di depan orang terbukti saya telah mengikuti perlombaan Duta Internet Cerdas, Kreatif, dan Produktif dari kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahu 2016 dan mendapat predikat sebagai duta untuk Kalimantan Barat selain itu saya memiliki sifat kepemimpinan yang baik terbukti dengan menjabat sebagai Bendahara Organisasi GESPRO (Ganesha Science Project), sebuah organisasi karya tulis remaha yang saya emban selama 2 tahun di masa SMA. selain itu saya memiliki jiwa seni yang tinggi, terbukti dengan raihan saya dalam ajang lomba baca puisi tingkat Kota yang diadakan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Hobi saya ialah membaca buku dan menulis.

EDUCATION

TK Islam Al-Azhar 21 Pontianak	2005-2006
SD Islam Al-Azhar 21 Pontianak	2006-2012
SMP Islam Al-Azhar 17 pontianak	2012-2015
SMA Negeri 1 Pontianak	2016-2018

TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA DAN CITA-CITA

Saya memilih jurusan Teknik Industri dikarenakan keinginan saya untuk memimpin sebuah perusahaan besar seperti Startup. Jurusan Teknik Industri dapat membantu saya mewujudkan apa yang saya inginkan terlebih mahasiswa Teknik Industri dituntut untuk mempelajari seluk beluk dari suatu perusahaan atau industri. Selain itu saya yakin dengan kemampuan, rencana, dan integritas saya, saya dapat mengejar cita-cita sebagai CEO perusahaan.



PERKEMBANGAN *FINTECH* DI INDONESIA

Oleh: Chairunisa Puspa Juwita
Universitas Singaperbangsa Karawang

Teknologi Finansial (Tekfin) atau sering disebut juga dengan *Financial Technology* (*Fintech*) merupakan industri berbasis teknologi yang melahirkan inovasi di bidang jasa keuangan yang memfasilitasi layanan keuangan (startup) di luar lembaga keuangan konvensional yang mempermudah masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan transaksi. Dalam pengertian lebih luas, *fintech* adalah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien (World Bank, 2016). Untuk membantu meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, pemerintah mendukung perkembangan teknologi finansial di Indonesia melalui regulasi yang dikeluarkannya. Indonesia sebagai populasi terbesar keempat di dunia dan terbesar di Asia Tenggara menjadikan Indonesia sebagai pangsa besar bagi *fintech*. Selain itu, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 143.26 juta yang diperkirakan akan terus naik setiap tahunnya.¹ Hal ini dimanfaatkan oleh teknologi finansial sebagai peluang dalam memberikan layanan jasa keuangan berbasis teknologi kepada masyarakat yang lebih praktis dan efisien dalam melakukan transaksi, seperti mempermudah masyarakat untuk memperoleh modal khususnya di bidang UMKM, dan lainnya. Perusahaan-perusahaan *fintech* diharapkan saling berkolaborasi untuk mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi sehingga membantu meningkatkan perekonomian nasional.

Dikutip dari sumber CNBC Indonesia mengenai *fintech*, awalnya *fintech* dianggap oleh regulator sebagai bank gelap. Regulator menganggap bahwa *fintech* melakukan bisnis layanan keuangan tidak berizin. Terjadi salah kaprah mengenai hal tersebut, kesalahan tersebut diperbaharui. Namun, dengan hadirnya Asosiasi Perusahaan FinTech di Indonesia (AFTECH) dan regulasi yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) membuat *fintech* diakui sebagai Industri Keuangan di Indonesia.²

Asosiasi FinTech Indonesia (AFI/AFTECH) merupakan asosiasi yang resmi dipublikasikan ke publik pada September 2015 sebagai wadah bagi perusahaan dan institusi di bidang sektor layanan jasa keuangan dengan menggunakan teknologi untuk menjalankan usahanya. Berdasarkan data sumber Asosiasi FinTech Indonesia dan OJK tahun 2017, jumlah perusahaan *fintech* di Indonesia pada 2006-2016 mengalami peningkatan. Sebelum tahun 2006, jumlah perusahaan *fintech* berjumlah 4 perusahaan dan pada tahun 2006 sampai 2007, jumlah perusahaan *fintech* bertambah menjadi 16 perusahaan. Setelah tahun tersebut, dalam kurun

¹ Sakina Rakhma, "Tahun 2017, Pengguna Internet di Indonesia mencapai 143,26 Juta Orang", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang> (diakses pada 8 September 2018, pukul 10.00)

² Roy Franedyta, "Fintech Awalnya Dianggap Sebagai Bank Gelap", <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/2018110134756-37-1111/fintech-awalnya-dianggap-sebagai-bank-gelap> (diakses pada 27 September 2018, pukul 16.20)



waktu 4 tahun terjadi penambahan 9 perusahaan yang melakukan aktivitas *fintech* sehingga pada tahun 2011-2012 jumlah perusahaan menjadi 25 perusahaan atau tumbuh sekitar 177,78%. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2006-2007 yang mencapai sekitar 300%. Dalam tahun 2013-2014 terjadi penambahan jumlah perusahaan *fintech* sebanyak 15 perusahaan sehingga pada tahun tersebut jumlah perusahaan menjadi 40 perusahaan atau tumbuh sekitar 60%.

Laporan Accenture di wilayah Asia Pasifik, menyebutkan nilai investasi ke dalam bidang *Financial technology (fintech)* selama sembilan bulan pertama di tahun 2015 sudah mencapai US\$3,5 miliar atau hampir empat kali lebih besar dari tahun 2014.³ Artinya, pada tahun 2015 orang yang berinvestasi di sektor keuangan berbasis teknologi semakin banyak.

Pada tahun 2015-2016, jumlah perusahaan meningkat drastis sebanyak 165 perusahaan, artinya perusahaan telah bertambah sebesar 125 perusahaan atau tumbuh sekitar 312.5% dibandingkan tahun sebelumnya.⁴ Jumlah pemain *fintech* di Indonesia pada tahun 2015-2016 menurut Asosiasi FinTech Indonesia (AFI) mengalami pertumbuhan sebesar 78%.⁵ Sepanjang tahun 2015-2016, Fintech telah mengalami perkembangan pertumbuhan secara pesat. Artinya, banyak sekali pemain-pemain *fintech* yang baru muncul untuk berkecimpung di sektor keuangan. Dengan hal ini, kreativitas baru akan muncul dalam sektor keuangan. Berbagai inovasi keuangan akan muncul beragam-ragam yang dapat menarik perhatian masyarakat Indonesia untuk menggunakan layanan jasa keuangan sehingga sesuai harapan pemerintah indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia dapat meningkat.

Berdasarkan laporan publikasi CCAF (Cambridge Centre For Alternative Finance) dalam *The 2nd Asia Pacific Region Alternative Finance Industry Report – Cultivating Growth*, yang ditulis oleh Garvey K. et. Al terdapat jenis 9 Model Pembiayaan *fintech* di Indonesia pada tahun 2013-2016 yaitu P2P (market place) business lending, P2P (market place) consumer lending, P2P (market place) real estate lending, donation-based crowdfunding, equity-based crowdfunding, reward-based crowdfunding, revenue-sharing crowdfunding/profit-sharing funding, debentures (debt-based securities), balance sheet consumer lending. Dari 9 model tersebut, 3 jenis model sudah tersedia sejak tahun 2013 seperti P2P (market place) business lending, donation-based crowdfunding, reward-based crowdfunding, sedangkan 6 model lainnya baru diperkenalkan

³ Reny Widya, "Tren dan Peran Besar Startup Fintech di Tahun 2016", <https://kreditgogo.com/artikel/Digital-Banking/Tren-dan-Peran-Besar-Startup-Fintech-di-Tahun-2016.html> (diakses pada 8 Agustus 2018, pukul 10.05)

⁴ Muhammad Afdi Nizar. 2017. *Teknologi Keuangan Fintech : Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Nizar2/publication/323629323_Teknologi_Keuangan_Fintech_Konsep_dan_Implementasinya_di_Indonesia/links/5aa10a5fa6fdcc22e2d0a382/Teknologi-Keuangan-Fintech-Konsep-dan-Implementasinya-di-Indonesia.pdf?origin=publication_detail

⁵ PWC Indonesia, "Fintech dan Transformasi Industri Keuangan", <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesian/fintech-dan-transformasi-industri-keuangan.html> (diakses pada 8 Agustus 2018, pukul 10.10)



pada tahun 2016.⁶ Model-model tersebut merupakan kategori dari jenis inovasi Fintech startup teknologi yang mempunyai produk dan jasa inovasi keuangan.

Tahun 2016 merupakan tahun puncak bagi *fintech*. Berdasarkan laporan publikasi central CCAF (Cambridge Centre for Alternative Centre) pasar pembiayaan *online* meluas secara pesat sehingga hal ini menjadikan *fintech* sebagai bisnis startup kedua terpopuler di Indonesia setelah e-commerce. Berbagai layanan start-up *fintech* yang menjadi tren di Indonesia adalah *ending platform* (peminjaman), *payment gateway* (alat pembayaran), P2P, *platform* perbandingan layanan bank dan asuransi. *Startup Fintech* yang telah berdiri dan beroperasi di Indonesia antara lain CekAja, UangTeman, CekPremi, Bareksa, Doku, Veritrans, Kartuku, Halomoney, dan Modalku.⁷ Startup tersebut menawarkan kepada kita berbagai layanan jasa keuangan seperti peminjaman, perbandingan asuransi, pembelian reksadana, dan lain-lain secara online.

Menurut data Tech in Asia Indonesia, *fintech* merupakan sektor bisnis dengan jumlah investasi terbanyak kedua di Indonesia. Sebenarnya *fintech* sendiri sudah ada keberadaannya sebelum tahun 2006, namun jumlah perusahaan pada saat itu hanya terdapat 4 perusahaan. Menurut Asosiasi FinTech Indonesia pada tahun 2015-2016, jumlah perusahaan Fintech di Indonesia berjumlah 165 perusahaan dibanding tahun 2013-2014 berjumlah 40 perusahaan. Terjadi peningkatan jumlah perusahaan Fintech sekitar 312.5% pada tahun 2015-2016 dibanding tahun 2013-2014. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indeks oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Literasi Keuangan 29.66% dan Indeks Inklusi Keuangan 67.82%.⁸ Dapat kita lihat, peningkatan pemain *fintech* membawa dampak signifikan terhadap Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia. Hasil Indeks tersebut membawa bukti bahwa *fintech* dapat memberikan harapan bagi Indonesia dalam meningkatkan inklusi keuangan dan membantu mengembangkan perekonomian nasional sehingga memicu Indonesia untuk menaikkan target indeks di tahun selanjutnya.

Selanjutnya, guna mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *Peer-to-Peer (P2P) Lending*, yang akan disusul dengan ketentuan lain terkait fintech agar regulasi kian jelas dan lengkap sehingga diharapkan dapat memberi berkontribusi lebih terhadap perekonomian nasional. Selain itu, Bank

⁶ Muhammad Afdi Nizar. 2017. *Teknologi Keuangan Fintech : Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Nizar2/publication/323629323_Teknologi_Keuangan_Fintech_Konsep_dan_Implementasinya_di_Indonesia/links/5aa10a5fa6fdcc22e2d0a382/Teknologi-Keuangan-Fintech-Konsep-dan-Implementasinya-di-Indonesia.pdf?origin=publication_detail

⁷Erwin Kurnia, "Pengaruh Munculnya Startup Fintech pada Industri Keuangan di Indonesia", <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/23/081500926/Pengaruh.Munculnya.Start-up.Fintech.pada.Industri.Keuangan.di.Indonesia> (diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, pukul 10.15)

⁸ PWC Indonesia, "Fintech dan Transformasi Industri Keuangan", <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesian/fintech-dan-transformasi-industri-keuangan.html> (diakses pada 8 Agustus 2018, pukul 10.10)



Indonesia mendirikan FinTech Office yang berfungsi untuk membuat regulatory sandbox untuk memberi keleluasaan kepada para *startup fintech* agar terus beroperasi dalam pengawasan mereka.⁹ Dengan ini, perusahaan-perusahaan *fintech* yang menjalankan usahanya diatur oleh regulasi pemerintah dan diawasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo menyatakan bahwa transaksi *fintech* pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 14,5 miliar dollar AS, atau Rp 188,5 triliun (kurs 13.000 per dollar AS) dan penggunaan terbanyak atau 56 persen adalah berupa kategori satu, atau sistem pembayaran.¹⁰ Artinya, transaksi *fintech* di Indonesia sangat besar dan mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Bisnis *E-commerce* yang merupakan bisnis terpopuler di Indonesia memerlukan *FinTech*, khususnya di bidang sistem pembayaran. Hal itu dikarenakan para merchant online memanfaatkan teknologi tersebut sebagai solusi yang mudah dalam menerima uang dari konsumen, contohnya adalah Faspay dalam hal transaksi pembayaran, Investree dalam hal pembiayaan dan pendanaan, bareksa untuk pembelian reksadana, dan lainnya. Selain itu, *Fintech* juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pasar online, meningkatkan pertumbuhan UMKM dan wiraswasta.

E-banking dan *mobile banking* merupakan produk bank yang bekerja sama dengan *startup Fintech* guna mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa jumlah nasabah pengguna *e-banking* pada tahun 2016 meningkat 270% dari 13.6 juta nasabah pada tahun 2012 menjadi 50,4 juta. Dari sisa frekuensi, nilainya tumbuh 169% dari 150.8 juta transaksi pada tahun 2012 menjadi 405.4 juta transaksi pada tahun 2016. Artinya, tahun 2016 merupakan tahun yang signifikan dimana jumlah pengguna *e-banking* dan *mobile banking* meningkat. Banyak masyarakat yang melakukan layanan *e-banking* atau *mobile banking*. Layanan-layanan perbankan yang ditawarkan oleh bank dimanfaatkan oleh masyarakat seperti melakukan transaksi pembayaran, dan lain-lain.

Di tahun 2017, sektor teknologi finansial semakin berkembang dan terus memberikan kontribusi bagi Indonesia. Sektor ini tidak bisa lepas dari dukungan positif pemerintah melalui regulasi-regulasi yang dikeluarkan sepanjang tahun. Pemerintah berperan penting dalam hal ini. Para pelaku usaha melaporkan bahwa mereka puas dengan kinerja Bank Indonesia (BI) dan OJK sepanjang tahun 2017 sehingga tampak dari pelaku usaha yang semakin serius dalam membangun usaha *fintech* yang mereka geluti. 49% perusahaan terbukti telah membangun sendiri atau mengeluarkan belanja modal (capex) untuk meningkatkan solusi keamanan data, 39% mengembangkan solusi penyimpanan data (*data warehousing*), dan 23% mengembangkan solusi tandatangan digital. Mayoritas pelaku usaha *fintech* berdiri dalam kurun tahun 2015-2017, dan

⁹ Aditya Hadi, "Bagaimana Perkembangan Bisnis *Startup Fintech* di tahun 2016", <https://id.technasia.com/perkembangan-startup-fintech-di-indonesia-2016> (diakses pada 8 Agustus 2018, pukul 10.15)

¹⁰ Sakina Rakhma, "BI: Transaksi *Fintech* Indonesia di 2016 mencapai Rp 188,5 triliun", <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/11/14/132335426/bi.transaksi.fintech.indonesia.di.2016.mencapai.rp.188.5.triliun> (diakses pada 8 Agustus 2018, pukul 10.25)



hampir 32% perusahaan memiliki karyawan lebih dari 100.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha *fintech* semakin membesar dari tahun ke tahun dan membawa penyerapan tenaga kerja semakin besar serta membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih produktif.

Pada tahun ini, sektor *fintech* merupakan sektor startup yang paling banyak menerima investasi sebanyak 29 startup, 14 startup e-commerce, 9 startup media, dan sisanya adalah sektor lainnya.¹² Saat ini banyak sekali para investor yang ingin berinvestasi di dunia *fintech*, karena seperti yang diketahui prospek *fintech* saat ini terus berkembang dengan baik dan ditambah dukungan dari pemerintah. Dalam hal ini, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan harus terus melakukan perkembangan untuk memperbarui berbagai regulasi mengenai *fintech*.

Regulasi yang memberikan kepastian kepada industri keuangan dan tingkat literasi keuangan membuat teknologi finansial semakin kuat untuk berkembang di Indonesia. Hal ini membuat Bank Indonesia semakin fokus dalam membuat regulasi mengenai sistem pembayaran dan Otoritas Jasa Keuangan fokus untuk membuat aturan turunan dari POJK NO 77/2016 tentang P2P Lending. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terus mengembangkan peraturan mengenai tata cara dan perlindungan terhadap pengguna layanan jasa keuangan *fintech*

Menurut data OJK, sebanyak 17% di segmen P2P lending, 43% di sistem pembayaran, dan sisanya berbentuk agregator, *crowdfunding*, dan lainnya.¹³ Didukung dalam Laporan tahunan AFTECH, per Desember 2017, mencatat 235 perusahaan *fintech* yang bergerak di Indonesia. Dari jumlah tersebut, subsektor sistem pembayaran masih mendominasi sebesar 39%. Jumlah pelaku usaha subsektor pinjam-meminjam/P2P Lending tercatat tumbuh pesat 15% pada awal tahun 2017 dan pada akhir tahun menjadi 32%. Data OJK melaporkan hasil jumlah transaksi P2P lending hingga November 2017 mencapai Rp. 2,2 triliun. Selebihnya, dari 235 perusahaan, 11% dari subsektor market provisioning, 11% dari manajemen investasi, 4 persen dari insurtech, dan 3% dari equity capital raising.¹⁴ Dapat kita lihat bahwa di sektor *fintech* yang paling banyak pemainnya adalah sistem Pembayaran. Sistem pembayaran masih menjadi primadona di sektor Fintech dan dipercaya akan terus menguat dengan banyaknya potensi dan solusi yang dikeluarkan oleh masing-masing penyelenggara *fintech*. Setelah itu, P2P Lending juga tumbuh pesat setelah segmen pembayaran dan sisanya terbagi dalam sektor lain.

¹¹ Kompas, "Perkembangan Industri Fintech di 2017 Dalam Kacamata Asosiasi", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/210000526/perkembangan-industri-fintech-di-2017-dalam-kacamata-asosiasi> (diakses pada 8 Agustus, pukul 10.30)

¹² Marsya Nabila, "Rangkuman Perkembangan Lanskap Fintech Indonesia Sepanjang Tahun 2017", <https://dailysocial.id/post/rangkuman-perkembangan-lanskap-fintech-indonesia-sepanjang-tahun-2017> (diakses pada 16 Agustus 2018, pukul 14.00)

¹³ PWC Indonesia, "Fintech dan Transformasi Industri Keuangan", <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesian/fintech-dan-transformasi-industri-keuangan.html> (diakses pada 8 Agustus 2018, pukul 10.10)

¹⁴ Kompas, "Perkembangan Industri Fintech di 2017 Dalam Kacamata Asosiasi", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/210000526/perkembangan-industri-fintech-di-2017-dalam-kacamata-asosiasi> (diakses pada 8 Agustus, pukul 10.30)



P2P *lending* yang merupakan pemain baru dalam sektor *fintech* di tahun 2017 telah menyalurkan Rp.1.44 triliun atau tumbuh sebesar 496.51%, secara ytd. Angka tersebut didapat dari hasil akumulasi 22 perusahaan P2P *lending* yang telah memiliki surat tanda terdaftar. Penyalur terbesar berada di Pulau Jawa dengan porsi sebesar 83.2% dan sisanya berasal dari luar Jawa. Total peminjam 120.174 dan total pemberi pinjaman 48.034 pemberi.¹⁵ P2P *lending* yang kerap muncul di tahun 2017 merupakan hal yang menarik bagi para investor dan para peminjam untuk mendapatkan dana pinjaman yang diperoleh melalui *startup* yang menyediakan pinjaman online dengan bunga yang ditawarkan lebih rendah, serta persyaratan yang tidak terlalu sulit.

Menurut data Bank Indonesia uang elektronik pada tahun 2017, volume uang elektronik mencapai 600.5 juta transaksi atau senilai Rp 8.76 triliun. Angka tersebut didapatkan dari hasil akumulasi 26 perusahaan yang sudah memiliki lisensi *e-money* dari BI (data BI)¹⁶. Artinya, penggunaan uang elektronik terus digunakan oleh masyarakat sepanjang tahun 2017 sehingga terjadi transaksi senilai Rp. 8.76 triliun. Berdasarkan data statistik Bank Indonesia, sejak bulan Januari hingga bulan November jumlah instrumen uang elektronik yang beredar terus meningkat, namun pada bulan Desember 2017 jumlah instrumen menurun menjadi 90,003,848 dibanding jumlah sebelumnya pada bulan November sebesar 113,722,577.¹⁷

Pada tahun ini, OJK mendirikan Fintech Innovation Hub. Fintech Innovation Hub memiliki tujuan, yaitu untuk mengefektifkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pengembangan industri *fintech* yang sesuai kebutuhan masyarakat, pengembangan model bisnis *fintech* yang baru dan potensial, serta penyediaan sarana komunikasi antara regulator dan industri *fintech*.¹⁸ Fintech Innovation Hub diharapkan dapat membantu jalannya pengembangan inovasi *fintech* di Indonesia agar terus lebih baik lagi untuk kedepannya.

Selain itu, kolaborasi antar lembaga keuangan, *fintech*, dan perusahaan *startup* diperlukan kerjasamanya untuk mengembangkan berbagai solusi keuangan di Indonesia. Data-data yang dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional bisa dikembangkan bersama melalui inovasi *fintech* dan perusahaan *startup*. Menurut data AFTECH, sepanjang tahun 2017, seluruh pengusaha *fintech* sudah berkolaborasi dengan bank sebanyak 77% (secara langsung) dan 67% (tidak langsung). Sebanyak 63.9% pelaku usaha *fintech* telah terkoneksi dengan bank melalui API. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat respon positif mengenai kolaborasi antara *fintech* dan bank yang

¹⁵ Marsya Nabila, "Rangkuman Perkembangan Lanskap Fintech Indonesia Sepanjang Tahun 2017", <https://dailysocial.id/post/rangkuman-perkembangan-lanskap-fintech-indonesia-sepanjang-tahun-2017> (diakses pada 16 Agustus 2018, pukul 14.00)

¹⁶ Marsya Nabila, "Rangkuman Perkembangan Lanskap Fintech Indonesia Sepanjang Tahun 2017", <https://dailysocial.id/post/rangkuman-perkembangan-lanskap-fintech-indonesia-sepanjang-tahun-2017> (diakses pada 16 Agustus 2018, pukul 14.00)

¹⁷ Bank Indonesia, "Statistik Sistem Pembayaran", <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Contents/Jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx> (diakses pada 16 Agustus 2018, pukul 14.10)

¹⁸ PWC Indonesia, "Fintech dan Transformasi Industri Keuangan", <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesian/fintech-dan-transformasi-industri-keuangan.html> (diakses pada 8 Agustus 2018, pukul 10.10)



sepenuhnya sudah mulai tercapai. Banyak pengusaha *fintech* yang telah bekerja sama dengan bank dan telah terkoneksi dengan bank melalui API (Application Programming Interface).

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan *fintech* merupakan hal dasar yang harus dilakukan. Dengan terciptanya kolaborasi, ekspansi pemanfaatan Fintech bagi masyarakat kian bernilai guna dan membuktikan bahwa layanan keuangan berbasis teknologi tidaklah sulit dalam penggunaannya. Namun, untuk menciptakan pertumbuhan bisnis digital dalam jangka panjang, industri keuangan harus terus berkolaborasi dan berinovasi agar pergerakan perekonomian tersebut menyeluruh hingga ke lapisan bawah.

Perkembangan Fintech di tahun 2018 kian menarik. Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan aturan terkait tentang inovasi keuangan digital mengenai mekanisme pencatatan dan pendaftaran startup Fintech¹⁹. Perkembangan *fintech* yang kian pesat dari tahun ke tahun membuat pemerintah terus melakukan pengembangan regulasi mengenai *fintech*. Selain melakukan pengembangan regulasi, terdapat beberapa hal lain yang harus dilakukan oleh OJK.

Menurut Deputy Komisioner OJK Institute Sukarela Batunaggar, Pada tahun ini terdapat delapan pekerjaan yang akan dicapai oleh OJK terkait keuangan digital. *Pertama*, penyusunan regulasi sebagai payung hukum. Regulasi mengenai Fintech akan disesuaikan dengan keadaan kondisi *Fintech* dan kondisi perekonomian Indonesia.²⁰ Regulasi yang jelas dapat mengurangi risiko gulung tikar bagi pelaku industri *Fintech*. Diharapkan regulasi yang dikeluarkan oleh OJK dapat sesuai dengan harapan para pelaku bisnis Fintech. *Kedua*, OJK akan melakukan *mapping* terhadap industri jasa keuangan berbasis digital.²¹ Dalam hal ini, OJK akan merencanakan untuk membuat satu regulasi yang mencakup kondisi *Fintech* saat ini dan prediksi di tahun berikutnya. *Ketiga*, *regulatory sandbox* dimana setiap *Fintech* yang berada di Indonesia harus melakukan pendaftaran untuk kemudian diobservasi dan di uji oleh OJK.²² OJK akan melakukan proses pencatatan terhadap perusahaan-perusahaan startup lalu akan mengkaji bagaimana perkembangan bisnis perusahaan tersebut. Kemudian melakukan proses *regulatory sandbox* dimana perusahaan *Fintech* harus mendaftarkan diri kepada OJK dan mengikuti beberapa tahapan penilaian. Setelah mengikuti tahapan penilaian, perusahaan akan diberi kesempatan yaitu, memperbaiki sistem atau lanjut untuk proses perizinan. Dengan adanya *regulatory sandbox*, platform bisnis *Fintech* yang ingin beroperasi atau meluncur ke pasar harus melalui

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers : OJK Terbitkan Aturan Inovasi Keuangan Digital”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Terbitkan-Aturan-Inovasi-Kuangan-Digital.aspx> (diakses pada 16 Agustus 2018, pukul 14.15)

²⁰ Nirmala Adinda, “Tahun Ini OJK Akan Kembangkan Keuangan Digital”, <http://finansial.bisnis.com/read/20180202/90/733619/tahun-ini-ojk-akan-kembangkan-keuangan-digital> (diakses pada 16 Agustus 2018, 14.23)

²¹ Nirmala Adinda, “Tahun Ini OJK Akan Kembangkan Keuangan Digital”, <http://finansial.bisnis.com/read/20180202/90/733619/tahun-ini-ojk-akan-kembangkan-keuangan-digital> (diakses pada 16 Agustus 2018, 14.23)

²² Nirmala Adinda, “Tahun Ini OJK Akan Kembangkan Keuangan Digital”, <http://finansial.bisnis.com/read/20180202/90/733619/tahun-ini-ojk-akan-kembangkan-keuangan-digital> (diakses pada 16 Agustus 2018, pukul 14.23)



tahapan uji coba sebelum mendapatkan izin.²³ Jadi bagi perusahaan startup Fintech yang ingin meluncur bisnisnya ke pasar, harus mempunyai izin sebagai perusahaan terdaftar resmi di OJK.

Untuk melindungi konsumen, OJK meresmikan beroperasinya *Fintech Center/Innovation Centre for Digital Financial Technology* (OJK Infinity) sebagai pusat perkembangan inovasi *Fintech* yang berfungsi sebagai wadah diskusi serta kolaborasi antara industri, regulator, pemerintah, akademisi, *innovation hub*.²⁴ Dengan adanya *Fintech Center* ini, pelaku usaha yang ingin berkeluh kesah mengenai masalah industri keuangan mereka seperti regulasi, inovasi produk, dan hal lainnya yang berhubungan dengan perkembangan industri dapat lapor ke OJK Infinity.²⁵ OJK Infinity ini akan terus menjadi sarana belajar dan inovasi pengembangan *fintech* di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah bisa terus mengawasi dan mengendalikan perkembangan *Fintech* terhadap risiko-risiko yang terjadi.

Berdasarkan jenis usahanya, jenis *Fintech* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah sistem *payment* dan P2P *lending*. Kedua sistem tersebut memiliki jumlah pengguna yang terus meningkat dari tahun ke tahun. OJK mencatat terdapat 64 perusahaan *Fintech P2P Lending* yang terdaftar, dan telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 7,64 triliun. Pencatatan tersebut di mulai sejak diterbitkannya Peraturan OJK nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.²⁶ Data OJK menunjukkan, jumlah pinjaman yang disalurkan per Januari 2018 mencapai Rp 3 triliun atau meningkat 17,11% dengan jumlah pelaku 120 *Fintech*.²⁷ Sedangkan pada bulan Juli 2018, jumlah yang disalurkan sebesar Rp 7.8 triliun dan jumlah perusahaan yang terdaftar di OJK adalah 66 perusahaan. Artinya, dari bulan Januari 2018 sampai bulan Juli 2018 jumlah perusahaan yang terdaftar di OJK mengalami peningkatan dan penyaluran jumlah pinjaman juga meningkat.

P2P *lending* juga menyumbangkan sekitar 25 T ke PDB Indonesia.²⁸ Hasil tersebut didapatkan dari kajian yang dilakukan oleh Indef dan Aftech. Dengan masuknya 25 triliun dari *fintech lending* ke produk domestik bruto, hal tersebut menjadikan bukti bahwa *fintech lending* dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Banyak hal menarik dari P2P *lending* yang bisa dinikmati oleh masyarakat salah satunya adalah pencairan dana tunai. Dengan menyediakan pencairan dana cepat, masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan uang

²³ Dwi Aditya, "OJK Segera Terbitkan Aturan Fintech", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3619901/ojk-segera-terbitkan-aturan-fintech>, (diakses pada 16 Agustus, pukul 15.00)

²⁴ Friska Yolanda, "OJK Resmikan Fintech Centre", <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/ojk-resmikan-fintech-center/ar-BBM9x6t?%25252525252525253Bocid=spartandhp> (diakses pada 16 Agustus, pukul 17.00)

²⁵ Desy Setyowati, "OJK : Daripada Mengadu Ke DPR Lebih Baik", <https://katadata.co.id/berita/2018/08/20/ojk-daripada-mengadu-ke-dpr-lebih-baik-ke-fintech-center> (diakses pada 16 Agustus, pukul 18.00)

²⁶ Desy Setyowati, "OJK : Daripada Mengadu Ke DPR Lebih Baik", <https://katadata.co.id/berita/2018/08/20/ojk-daripada-mengadu-ke-dpr-lebih-baik-ke-fintech-center> (diakses pada 16 Agustus, pukul 18.00)

²⁷ Uthan A Rachim, "Regulasi Fintech", <http://id.beritasatu.com/home/regulasi-fintech/173981> (diakses pada 17 Agustus 2018, pukul 14.00)

²⁸ Institute for Development of Economics and Finance (Indef)



tunai. Hal tersebut membuat aktivitas transaksi P2P *lending* meningkat. Namun kemudahan tersebut memiliki risiko yang tinggi seperti suku bunga tinggi dan gagal bayar. Seperti yang diketahui, saat ini OJK sedang menggali lebih dalam mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Inovasi Keuangan Digital.²⁹ Hal tersebut bertujuan untuk menyempurnakan regulasi industri keuangan digital, seperti sistem pembayaran, P2P *lending*, dan lainnya.

Menurut Bank Indonesia, terdapat 15 penyelenggara *Fintech Payment* (sistem pembayaran) telah terdaftar di bank sentral. Setelah startup tersebut telah terdaftar, maka penyelenggara *Fintech* sistem pembayaran melakukan uji coba *regulatory sandbox*.

Dari sisi transaksi, secara umum menunjukkan bahwa transaksi *fintech payment* dan *lending* masih kecil. Mayoritas volume transaksi pelaku *fintech payment* sebesar Rp 10-100 milyar (38%) sedangkan pelaku *fintech P2P lending* Rp 10-100 milyar (30%) dan Rp > 100 milyar (30%).

³⁰ Artinya, transaksi *fintech* di Indonesia masih belum menyeluruh. Masih terdapat masyarakat Indonesia yang belum tersentuh *fintech*. Maka dari itu perlu diadakan kegiatan pengenalan dan sosialisasi mengenai *fintech* kepada masyarakat baik dari pihak bank, pemerintah, dan *fintech*.

Apabila dilihat dari sisi umur, transaksi *fintech* di Indonesia masih sangat muda. Sekitar 50% beroperasi pertama kali pada tahun 2016-2017.³¹ Jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, *fintech* di Indonesia dapat dikatakan masih tergolong muda.³² Seperti yang diketahui, *fintech* sendiri di Indonesia mulai mengalami peningkatan pada tahun 2016 beserta regulasi yang dikeluarkan mengenai peraturan P2P *lending*.

Dari sisi kolaborasi antara bank dan *fintech*, di tahun ini bank terus melakukan sinergi terhadap *fintech* guna meningkatkan bisnis digital. Menurut Direktur Bank Rakyat Indonesia, *fintech* mempunyai banyak sisi inovatif dan kreatif yang dapat dimanfaatkan untuk perkembangan digital.³³ *Fintech* melakukan banyak inovasi di bidang layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan potensi internet dan smartphone yang selalu dipakai oleh masyarakat. Selain itu, *fintech* mendukung target pemerintah dalam mencapai inklusi keuangan sebesar 75% di tahun 2019 dan *lending gap* Indonesia yang hampir Rp 1.000 triliun.³⁴

Fintech merupakan harapan negara dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih baik. Kontribusi *fintech* terhadap perekonomian sudah mulai terbukti melalui sumbangan 25T ke Produk Domestik Bruto. Jumlah perusahaan dan pelaku *fintech* meningkat dari tahun ke tahun.

²⁹ Satria K Yudha, "Pelaku *Fintech* Nantikan Aturan Inovasi Keuangan Digital", <https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/08/21/pdsvoa416-pelaku-fintech-nantikan-aturan-inovasi-keuangan-digital> (diakses pada 18 Agustus 2018, pukul 09.00)

³⁰ KSK Bank Indonesia

³¹ KSK Bank Indonesia

³² KSK Bank Indonesia

³³ Kontan, "BRI Ajak *Fintech* Sinergi Dengan Layanan Digital Perbankan", <https://keuangan.kontan.co.id/news/bri-ajak-fintech-sinergi-dengan-layanan-digital-perbankan> (diakses pada 30 Agustus 2018, pukul 06.00)

³⁴ Septian Deny, "Dukung Inklusi Keuangan, *Fintech* Ini Perluas Jangkauan Hingga ke Papua", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3619923/dukung-inklusi-keuangan-fintech-ini-perluas-jangkauan-hingga-ke-papua> (diakses pada 30 Agustus 2018, pukul 06.07)



Berbagai permasalahan keuangan di Indonesia seolah memberi berkah bagi perkembangan *fintech*. *Fintech* dapat membantu mengatasi masalah yang tidak mampu digarap oleh lembaga keuangan konvensional, seperti masyarakat yang belum menjadi pengguna jasa keuangan. Maka dengan adanya *fintech* diharapkan dapat menambah daya tarik masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Membuktikan kepada masyarakat bahwa *fintech* menjadikan semuanya lebih praktis dan efisien.

Daftar Referensi

- Aditya Hadi, “Bagaimana Perkembangan Bisnis Startup Fintech di tahun 2016”, <https://id.technasia.com/perkembangan-startup-fintech-di-indonesia-2016> (diakses pada 8 Agustus 2018, pukul 10.15)
- Bank Indonesia, “Statistik Sistem Pembayaran”, <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Contents/Jumlah%20Uang%20Elektronik.aspx> (diakses pada 16 Agustus 2018, pukul 14.10)
- Desy Setyowati, “OJK : Daripada Mengadu Ke DPR Lebih Baik”, <https://katadata.co.id/berita/2018/08/20/ojk-daripada-mengadu-ke-dpr-lebih-baik-ke-fintech-center> (diakses pada 16 Agustus, pukul 18.00)
- Dwi Aditya, “OJK Segera Terbitkan Aturan Fintech”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3619901/ojk-segera-terbitkan-aturan-fintech>, (diakses pada 16 Agustus, pukul 15.00)
- Erwin Kurnia, “Pengaruh Munculnya Startup Fintech pada Industri Keuangan di Indonesia”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/23/081500926/Pengaruh.Munculnya.Startup.Fintech.pada.Industri.Kuangan.di.Indonesia> (diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, pukul 10.15)
- Friska Yolanda, “OJK Resmikan Fintech Centre”, <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/ojk-resmikan-fintech-center/ar-BBM9x6t?%25252525252525253Bocid=spartandhp> (diakses pada 16 Agustus, pukul 17.00)
- Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
- Kompas, “Perkembangan Industri Fintech di 2017 Dalam Kacamata Asosiasi”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/16/210000526/perkembangan-industri-fintech-di-2017-dalam-kacamata-asosiasi> (diakses pada 8 Agustus,pukul 10.30)
- Kontan, “BRI Ajak Fintech Sinergi Dengan Layanan Digital Perbankan”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/bri-ajak-fintech-sinergi-dengan-layanan-digital-perbankan> (diakses pada 30 Agustus 2018, pukul 06.00)
- KSK Bank Indonesia
- Marsya Nabila, “Rangkuman Perkembangan Lanskap Fintech Indonesia Sepanjang Tahun 2017”, <https://dailysocial.id/post/rangkuman-perkembangan-lanskap-fintech-indonesia-sepanjang-tahun-2017> (diakses pada 16 Agustus 2018, pukul 14.00)
- Muhammad Afdi Nizar. 2017. Teknologi Keuangan Fintech : Konsep dan Implementasinya di Indonesia. https://www.researchgate.net/profile/Muhammad_Nizar2/publication/323629323_Teknologi_Kuangan_Fintech_Konsep_dan_Implementasinya_di_Indonesia/links/5aa10a5fa6fdcc22e2d0a382/Teknologi-Kuangan-Fintech-Konsep-dan-Implementasinya-di-Indonesia.pdf?origin=publication_detail
- Nirmala Adinda, “Tahun Ini OJK Akan Kembangkan Keuangan Digital”, <http://finansial.bisnis.com/read/20180202/90/733619/tahun-ini-ojk-akan-kembangkan-keuangan-digital> (diakses pada 16 Agustus 2018, pukul14.23)
- Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers : OJK Terbitkan Aturan Inovasi Keuangan Digital”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Terbitkan-Aturan-Inovasi-Kuangan-Digital.aspx> (diakses pada 16 Agustus 2018, pukul 14.15)
- PWC Indonesia, “Fintech dan Transformasi Industri Keuangan”, <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesia/fintech-dan-transformasi-industri-keuangan.html> (diakses pada 8 Agustus 2018, pukul 10.10)
- Reny Widya, “Tren dan Peran Besar Startup Fintech di Tahun 2016 ”, <https://kreditgogo.com/artikel/Digital-Banking/Tren-dan-Peran-Besar-Startup-Fintech-di-Tahun-2016.html> (diakses pada 8 Agustus 2018, pukul 10.05)

- 
- Roy Franedy, "Fintech Awalnya Dianggap Sebagai Bank Gelap", <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180110134756-37-1111/fintech-awalnya-dianggap-sebagai-bank-gelap> (diakses pada 27 September 2018, pukul 16.20)
- Sakina Rakhma, "BI: Transaksi Fintech Indonesia di 2016 mencapai Rp 188,5 triliun", <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/11/14/132335426/bi.transaksi.fintech.indonesia.di.2016.mencapai.rp.188.5.triliun> (diakses pada 8 Agustus 2018, pukul 10.25)
- Sakina Rakhma, "Tahun 2017, Pengguna Internet di Indonesia mencapai 143,26 Juta Orang", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang> (diakses pada 8 September 2018, pukul 10.00)
- Satria K Yudha, "Pelaku Fintech Nantikan Aturan Inovasi Keuangan Digital", <https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/08/21/pdsvoa416-pelaku-fintech-nantikan-aturan-inovasi-keuangan-digital> (diakses pada 18 Agustus 2018, pukul 09.00)
- Septian Deny, "Dukung Inklusi Keuangan, Fintech Ini Perluas Jangkauan Hingga ke Papua", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3619923/dukung-inklusi-keuangan-fintech-ini-perluas-jangkauan-hingga-ke-papua> (diakses pada 30 Agustus 2018, pukul 06.07)
- Uthan A Rachim, "Regulasi Fintech", <http://id.beritasatu.com/home/regulasi-fintech/173981> (diakses pada 17 Agustus 2018, pukul 14.00)

Tentang Penulis



I. Data Pribadi

1. Nama : Chairunisa Puspa Juwita
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Lampung, 13 September 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Lajang
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat : Perum Griya Mukti Blok J. 42 Ciwareng, Purwakarta, Jawa Barat
9. Nomor Telepon / HP : 085759993801
10. e-mail : chairunisadorry@gmail.com
11. Kode Pos : 41151

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
2004	-	2010	SDI AL-GHOZALI	-	SD
2010	-	2013	MTSN PURWAKARTA	-	SMP
2013	-	2016	SMAN 2 PURWAKARTA	IPA	SMA
2016	-		UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG	AKUNTANSI	KULIAH

III. Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

Tahun	Lembaga / Instansi	Keterampilan
2012	NUGRAHA COLLEGE	BAHASA INGGRIS

IV. Penguasaan Bahasa

No.	Bahasa	Kemampuan			
		Membaca	Menulis	Berbicara	Mendengar
	INGGRIS				

V. Lain-lain : SUMMER SCHOOL THAILAND 2018